

LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN 2021



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAROS

TAHUN ANGGARAN 2022





PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Nasrun Amrullah No.3 Maros Sul-Sel, Telp.(0411)371256, Faks (0411)371256 Kode Pos 90516
Email : Inspektorat@Maroskab.go.id Website : www.maroskab.go.id

**PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2021**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Maros untuk Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Maros.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Maros, 31 Maret 2021



Ir. H. Muhammad Alfian Amri., M.Si, CCMs

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19661226199301 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Nasrun Amrullah No.3 Maros Sul-Sel, Telp.(0411)371256, Faks (0411)371256 Kode Pos
90516 Email : Inspektorat@Maroskab.go.id Website : www.maroskab.go.id

Maros, 31 Maret 2022

Nomor : 700/075/REV/ITDA/2022
Lampiran : -
Perihal : **Laporan Hasil Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Kabupaten Maros
Untuk Tahun Anggaran 2021**

Kepada
**Yth. Bupati Maros
di
Maros**

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Maros untuk Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut :

1. Pernyataan Reviu

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Maros untuk Tahun Anggaran 2021 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Maros.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

2. Dasar Reviu

- a. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah;
- d. Surat Perintah Bupati Maros, Nomor: 094/47/A.4/ITDA tanggal 11 Maret 2022;

3. Pelaksanaan Reviu

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Maros untuk Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan mulai tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan 01 April 2022.

4. Tujuan dan Sasaran Reviu

Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Sasaran reviu adalah Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2021.

5. Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup reviu adalah penelaahan terhadap format, mekanisme penyusunan dan substansi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2021.

6. Catatan Hasil Reviu

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Tim Reviu Inspektorat Kabupaten Maros telah melaksanakan reviu terhadap draft Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Maros dengan metode reviu melalui desk evaluation dan konfirmasi kepada Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Maros selaku Tim penyusun Laporan Kinerja, terdapat hal – hal yang perlu diperhatikan lebih lanjut pada simpulan dan rekomendasi dibawah ini.

7. Simpulan dan Rekomendasi

7.1 Simpulan

7.1.1 Format

Kesimpulan terhadap format Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- 7.1.1.1 Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan tujuan, sasaran, indikator sasaran sesuai RPJMD namun belum menyajikan target kinerja sesuai Tabel 5.3 pada RPJMD.

7.1.2 Mekanisme Penyusunan

Kesimpulan terhadap mekanisme penyusunan laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- 7.1.2.1 Laporan Kinerja IP telah disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi dalam penyusunan laporan;
- 7.1.2.2 Mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun Laporan Kinerja belum memadai karena permintaan data kinerja dari unit kerja belum di formalkan berupa permintaan resmi dari unit penyusun sesuai dengan SOP/mekanisme penyusunan Lkj;

- 7.1.2.3 Penanggungjawab pengumpulan data/informasi belum ditetapkan di setiap unit kerja terkait melalui Surat Keputusan Bupati Maros;
- 7.1.2.4 Analisis/penjelasan dalam Laporan Kinerja (LKj) belum diketahui oleh unit kerja terkait.

7.1.3 Subtansi

Kesimpulan terhadap subtansi laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- 7.1.3.1 Terdapat perbedaan redaksional terhadap satu (1) indikator kinerja dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Indeks Kesiapsiagaan Bencana
- 7.1.3.2 Terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu;
- 7.1.3.3 Indikator Kinerja Sasaran strategis secara umum telah memenuhi syarat SMART dan cukup;
- 7.1.3.4 Laporan Kinerja (LKj) telah menyajikan alternatif solusi atas setiap sasaran strategis;
- 7.1.3.5 Laporan Kinerja (Lkj) belum menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan tiap sasaran strategis;
- 7.1.3.6 Laporan Kinerja (Lkj) telah menyajikan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan tiap sasaran strategis;
- 7.1.3.7 Laporan Kinerja (Lkj) belum menyajikan analisis efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya atas setiap sasaran strategis.

7.2 Rekomendasi

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami rekomendasikan kepada Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Maros:

1. Dalam hal format laporan kinerja, agar menampilkan tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sesuai Tabel 5.3 RPJMD.
2. Dalam hal mekanisme penyusunan, agar:
 - a. Mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun Laporan Kinerja didukung dengan adanya surat edaran yang berisi mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun Laporan Kinerja (LKj);
 - b. Penanggungjawab pengumpulan data /informasi ditetapkan di setiap PD terkait/unit kerja melalui Surat Keputusan Bupati Maros;
 - c. Analisis/penjelasan dalam Laporan Kinerja (LKj) diketahui oleh unit kerja terkait.
3. Dalam hal substansi, agar:
 - a. Menyelaraskan tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja (LKj) dengan tujuan/sasaran dalam RPJMD;.
 - b. Menyelaraskan indikator kinerja dalam Laporan Kinerja (LKj) dengan indikator kinerja dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama;
 - c. Laporan Kinerja (Lkj) menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan;
 - d. Laporan Kinerja (Lkj) menyajikan analisis efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya atas setiap sasaran strategis.

8. Tindak Lanjut Hasil Reviu Sebelumnya.

Hasil reviu sebelumnya belum sepenuhnya ditindaklanjuti.

Demikian laporan hasil reuiu ini kami sampaikan sebagai bahan lebih lanjut.

Maros 31 Maret 2022



Ir. H. Muhammad Alfian Amri, M.Si, CCMs

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19661226199301 1 001



KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT, karena hanya dengan berbagai limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Maros Tahun 2021 ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 merupakan pelaksanaan ketentuan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa beberapa kewajiban Kepala Daerah antara lain adalah memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) kepada DPRD serta menginformasikan Ringkasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) kepada Masyarakat.

Selain itu, laporan ini disusun untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Adapun sistematika laporan ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

- a. Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Maros
- b. Data Geografis Kabupaten Maros
- c. Jumlah Penduduk
- d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan
- e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah
- f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah



- a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah
- b. Visi dan Misi
- c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen RPJMD 2021-2026
- d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen RKPD Tahun 2021

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. Capaian Kinerja Makro

- a. Indeks Pembangunan Manusia
- b. Angka Kemiskinan
- c. Angka Pengangguran
- d. Pertumbuhan Ekonomi
- e. Pendapatan Per Kapita
- f. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)

2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

- a. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- b. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021 Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- c. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2020 Dibandingkan dengan Tahun 2021
- d. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021 Dibandingkan dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah
- e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan



Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai

- f. Analisis Program dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

- 3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Kabupaten Maros
- 3.2. Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Kabupaten Maros

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

- 4.1. Urusan Pendidikan
- 4.2. Urusan Kesehatan
- 4.3. Urusan Pekerjaan Umum
- 4.4. Urusan Perumahan Rakyat
- 4.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- 4.6. Urusan Sosial

BAB V PENUTUP

Dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dijelaskan bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Oleh karena itu, sangat beralasan jika Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi bahan evaluasi, informasi, dan referensi bagi pemerintah pusat serta sebagai acuan dalam memberikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian demi pengembangan daerah dimasa yang akan datang. Di sisi lain, penyusunan LPPD ini merupakan salah satu bentuk upaya Pemerintah Kabupaten Maros untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.



Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Maros tahun 2021 ini disampaikan, semoga dapat memberi manfaat dalam terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik di Kabupaten Maros. Penghargaan yang setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada seluruh masyarakat dan berbagai pihak yang telah mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Maros.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Maros, 31 Maret 2022



H. Q. S. CHAIDIR SYAM, S.I.P., M. H

**DAFTAR ISI**

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.1.1 Penjelasan Umum	2
a. Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Maros	4
b. Data Geografis Pembentukan Kabupaten Maros	6
c. Jumlah Penduduk	7
d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	11
e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah	22
f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros Tahun 2020	28
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	53
a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah	56
b. Visi dan Misi	56
c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen RPJMD 2016-2021	58
d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen RKPD Tahun 2020	73
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	79
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	84
2.1. Capaian Kinerja Makro	84
a. Indeks Pembangunan Manusia	85
b. Angka Kemiskinan	85
c. Angka Pengangguran	86
d. Pertumbuhan Ekonomi	86
e. Pendapatan Per Kapita	87
f. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	88



2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	88
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output).....	90
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	163
2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Usuran Pemerintahan	197
2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.....	200
a. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021	200
b. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2020 Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2021	202
c. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021 Dibandingkan dengan Target Tahun 2020	231
d. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021 Dibandingkan dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah	234
e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai	236
f. Analisis Program dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja	241
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	258
3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Kabupaten Maros	258
3.2. Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Kabupaten Maros	259
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	260
4.1. Usuran Pendidikan	261
4.2. Usuran Kesehatan	280
4.3. Usuran Pekerjaan Umum	289
4.4. Usuran Perumahan Rakyat	293
4.5. Usuran Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	297
4.6. Usuran Sosial	310
BAB V PENUTUP	316



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kinerja Pemerintah Daerah antara lain dapat dinilai dari tertibnya administrasi laporan penyelenggaraan pemerintahan, baik dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mencakup laporan kinerja instansi Pemerintah Daerah, dan sebagaimana tercantum pada Pasal 70 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, LPPD digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Pusat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanahkan kewajiban Kepala Daerah menyampaikan LPPD sebagai upaya pertanggungjawaban publik untuk mendorong terwujudnya pelaksanaan Otonomi Daerah yang sejalan dengan cita-cita menciptakan pemerintahan yang bersih (*clean government*), bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata Pemerintahan yang baik (*good governance*). Kewajiban yang dimaksud disampaikan kepada Pemerintah Pusat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Masyarakat.

Respon dan kepekaan Pemerintah Daerah dalam menjalankan amanah Undang-Undang tersebut sangat dibutuhkan. Kabupaten Maros sebagai salah satu Kabupaten Daerah Otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.



1.1.1 Penjelasan Umum

Kabupaten Maros dengan ibukota kabupaten adalah Kota Maros yang berperan sebagai pusat pemerintahan dengan segala aktivitas sosial, ekonomi, budaya, dan politik terletak di Kecamatan Turikale. Jika dilihat dari geografis wilayah yang lebih mikro, Kota Maros terbagi atas 3 (tiga) segmen kawasan yang merupakan bagian dari pusat-pusat pemerintahan Kabupaten Maros dan dihubungkan oleh jaringan jalan arteri. Sedangkan ditinjau dari perkembangan wilayah, juga terjadi pada arah jaringan jalan arteri sekunder yang menghubungkan dengan wilayah Kabupaten Bone, yang meliputi wilayah Kecamatan Bantimurung, Simbang, Cenrana, Camba dan Mallawa.

Secara umum, wilayah Kabupaten Maros memiliki peranan yang sangat besar terhadap pembangunan regional dan nasional melalui peranannya dalam berbagai aspek, yakni :

1. Pusat pelayanan transportasi udara internasional, yakni Bandar Udara Sultan Hasanuddin. Bandar udara ini terletak di Kecamatan Mandai yang merupakan wilayah perbatasan dengan Kota Makassar. Pertumbuhan pelayanan bandar udara Hasanuddin yang begitu pesatnya, sehingga dilakukan pengembangan bandar udara baru dengan luas lahan pengembangan 554,6 Ha. Bandar udara Hasanuddin merupakan wilayah pintu gerbang Sulawesi Selatan dan KTI yang mengindikasikan bahwa Kabupaten Maros adalah gerbang utama pembangunan regional dan nasional.
2. Pusat Penelitian Pertanian, yakni dengan adanya pengembangan Balai Penelitian Tanaman Sereal dan Tanaman Pangan yang berlokasi di Kecamatan Turikale. Balai penelitian ini melakukan serangkaian penelitian untuk menghasilkan inovasi teknologi pertanian sekaligus mendiseminasikan secara terarah guna mendukung upaya peningkatan produksi pertanian sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Pusat Penelitian Kelautan dan Perikanan, yakni dengan adanya kawasan riset tentang potensi kelautan dan perikanan. Hal ini sangat mendasar karena wilayah Kabupaten Maros sebagai daerah pesisir dengan kontribusi pada sektor perikanan di Sulawesi Selatan cukup besar, terutama dalam memenuhi



kebutuhan wilayah Kota Makassar sebagai ibukota provinsi Sulawesi Selatan. Disamping itu, kegiatan perikanan yang diusahakan dan dikembangkan oleh masyarakat Kabupaten Maros adalah perikanan budidaya air payau yang mencapai luas tambak 9.581,50 Ha.

4. Militer, yaitu wilayah Kabupaten Maros merupakan wilayah yang dijadikan sebagai Pusat Pelatihan dan Pendidikan TNI-AD, yaitu dengan adanya kawasan pelatihan dan pendidikan Kostrad TNI-AD. Lokasi kegiatan ini berlokasi pada dua kecamatan, yakni Sambueja Kecamatan Bantimurung dan Kariango Kecamatan Tanralili. Disamping itu, Kecamatan Mandai juga di jadikan sebagai pangkalan udara TNI Angkatan Udara yang berlokasi di Bandar Udara Sultan Hasanuddin.
5. Pusat Kegiatan Keagamaan, yakni suatu kegiatan yang dilakukan oleh jamaah Halwatiah Sammang. Pada setiap hari besar Maulid Nabi Muhammad SAW, jamaah Halwatiah Sammang bersatu melakukan sikir akbar yang berlokasi di Patte'ne Kecamatan Marusu. Asal jamaah Halwatiah Sammang tersebut telah tersebar diseluruh nusantara, bahkan ada yang berasal dari Malaysia.
6. Bagian Wilayah Pengembangan Kawasan Metropolitan Mamminasata, yaitu suatu kebijakan pengembangan wilayah yang pertama di KTI, dimana sebagian wilayah Kabupaten Maros masuk dalam Kawasan Perkotaan Metropolitan tersebut. Wilayah Kecamatan yang masuk dalam pengembangan ini adalah Kecamatan Mandai, Moncongloe, Tompobulu, Bantimurung, Marusu, Turikale, Tanralili, Lau, Maros Baru, Simbang, Bantimurung, dan Bontoa. Dari luas wilayah pengembangan Kawasan Mamminasata sebesar 2.462 Km², wilayah Kabupaten Maros yang menjadi bagian kawasan pengembangan tersebut adalah 1.039 Km² atau 42,20%. Hal ini tentunya sangat memberi manfaat bagi wilayah Kabupaten Maros ditinjau dari segi penyediaan dan pembangunan infrastruktur, penyediaan lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja, PAD dan lain sebagainya.



a. Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Maros

Wilayah Kabupaten Maros pada mulanya adalah suatu wilayah kerajaan yang dikenal sebagai Kerajaan Marusu yang kemudian bernama Kabupaten Maros sampai saat ini. Selain nama Maros, masih terdapat nama lain daerah ini, yakni Marusu dan/atau Buttasalewangan. Ketiga nama tersebut oleh sebagian masyarakat Kabupaten Maros sangat melekat dan menjadikan sebagai lambang kebanggaan tersendiri dalam mengisi pembangunan daerah.

Berdasarkan data-data yang diperoleh, yang memuat sejarah Kabupaten Maros. Kabupaten Maros pada awalnya adalah sebuah wilayah kerajaan yang dipengaruhi oleh dua kerajaan besar di Sulawesi Selatan, yakni Kerajaan Bone dan Kerajaan Gowa, yang mana pada waktu itu, Maros memiliki nilai strategis yang sangat potensial. Kabupaten Maros dari dulu hingga saat ini dihuni oleh dua suku, yakni Suku Bugis dan Suku Makassar.

Pada masa kemerdekaan, yakni tujuh tahun setelah Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 oleh pemerintah Republik Indonesia dikeluarkan peraturan No. 34 1952 juncto PP. No. 2/1952 tentang pembentukan Afdelling Makassar yang di dalamnya tercakup Maros sebagai sebuah Onderafdelling dengan 16 buah distrik, masing-masing :

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Distrik Turikale | Dipimpin oleh Karaeng |
| 2. Distrik Marusu | Dipimpin oleh Karaeng |
| 3. Distrik Simbang | Dipimpin oleh Karaeng |
| 4. Distrik Bontoa | Dipimpin oleh Karaeng |
| 5. Distrik Lau' | Dipimpin oleh Karaeng |
| 6. Distrik Tanralili | Dipimpin oleh Karaeng |
| 7. Distrik Sudiang | Dipimpin oleh Gelarang |
| 8. Distrik Moncongloe | Dipimpin oleh Gelarang |



9. Distrik Bira	Dipimpin oleh Gelarang
10. Distrik Biringkanaya	Dipimpin oleh Gelarang
11. Distrik Mallawa	Dipimpin oleh Arung
12. Distrik Camba	Dipimpin oleh Arung
13. Distrik Cendrana	Dipimpin oleh Arung
14. Distrik Laiya	Dipimpin oleh Arung
15. Distrik Wanua Waru	Dipimpin oleh Arung
16. Distrik Gantarang Matinggi	Dipimpin oleh Arung

Keenam belas distrik di atas merupakan pusat-pusat pemerintahan di Kabupaten Maros pada masa lampau yang kemudian berkembang seiring dengan kemajuan pembangunan secara lokal maupun regional, maka sebagian wilayah Kabupaten Maros terintegrasi ke wilayah administrasi Kotamadya Ujung pandang (Ujung pandang berubah nama menjadi Kota Makassar). Adapun wilayah distrik Kabupaten Maros tersebut yang terintegrasi di wilayah administrasi Kota Makassar tersebut adalah Distrik Bira, Suding dan Biringkanaya. Pelepasan wilayah Bira, Sudiang dan Biringkanaya tersebut dari wilayah Kabupaten Maros terjadi pada tahun 70-an.

Wilayah Kabupaten Maros dalam sejarahnya telah mengalami pemekaran wilayah. Pada tahun 1963, Kabupaten Maros terbagi atas 4 (empat) kecamatan, yakni Kecamatan Maros Baru, Bantimurung, Mandai, dan Camba. Memasuki tahun 1989, diadakan pemekaran wilayah kecamatan dengan dibentuknya 3 (tiga) kecamatan perwakilan, yakni Kecamatan Perwakilan Tanralili, Maros Utara, dan Mallawa, yang hingga saat ini saat ini terdapat 14 wilayah kecamatan. Masing-masing wilayah kecamatan tersebut memiliki potensi tersendiri dalam menunjang pembangunan wilayah. Disampin itu, Kabupaten Maros memiliki peranan yang sangat berarti dalam pembangunan Kota Makassar sebagai



ibukota provinsi dan sekaligus sebagai pusat pengembangan wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI). Peluang inilah membawa pengaruh yang sangat signifikan terhadap perkembangan wilayah Kabupaten Maros, terutama wilayah-wilayah yang berbatasan dengan Kota Makassar. Sedangkan rencana pembangunan wilayah secara eksternal, sebagian wilayah Kabupaten Maros masuk dalam pengembangan Kawasan Mamminasata sebagai kawasan kota metropolitan.

Setelah menjalani titian sejarah selama lima abad dimulai dengan berdirinya Kerajaan Marusu pada awal abad XV yang selanjutnya terjadi kehidupan yang berdinamika bagi setiap kerajaan mulai dari sistem Monarki menjadi daerah Regentschap kemudian menjadi daerah Adat Gemeenschap sampai dekade terakhir menjadi distrik, maka dalam sebuah masa peralihan antara fase pemerintahan klasik/tradisional dengan pemerintahan konstitusional lahir Undang-undang No. 29 Tahun 1959 (14 tahun setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945). Maros kemudian berdiri sendiri menjadi Daerah Tingkat II Maros berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822).

b. Data Geografis Kabupaten Maros

1. Batas Administratif

Secara geografis, kabupaten Maros terletak antara $40^{\circ} 45'$ - $50^{\circ} 07'$ Lintang Selatan dan $109^{\circ} 205'$ - $129^{\circ} 12'$ Bujur Timur yang berbatasan dengan:

Di sebelah Utara : Dengan Kabupaten Pangkep;

Di sebelah Timur : Dengan Kabupaten Bone;

Di sebelah Tenggara : Dengan Kabupaten Gowa;

Di sebelah Selatan : Dengan Kota Makassar;

Di sebelah Barat : Dengan Selat Makassar.

Jika dilihat dari posisinya terhadap Kota Makassar sebagai Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Maros memiliki posisi yang sangat



strategis karena berbatasan langsung dengan Kota Makassar. Karena posisinya tersebut, Kabupaten Maros termasuk dalam bagian wilayah pengembangan konsep kota terpadu Metropolitan Mamminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar). Wilayah kecamatan yang termasuk dalam pengembangan ini adalah kecamatan Mandai, Moncongloe, Tompobulu, Bantimurung, Marusu, Turikale, Tanralili, Lau, Maros Baru, Simbang, Bantimurung, dan Bontoa.

2. Topografi

Topografi Kabupaten Maros sangat bervariasi, mulai dari wilayah datar sampai wilayah pegunungan. Luas daerah kondisi datar sekitar 70.882 Ha atau 43,80% dari luas Kabupaten Maros. Sedangkan, daerah yang mempunyai kemiringan lereng diatas 40% atau wilayah yang bergunung-gunung mempunyai luas 49.869 Ha atau sebesar 30,80% dari luas wilayah Kabupaten Maros.

Ketinggian wilayah Kabupaten Maros berkisar antara 0 sampai 881 meter di atas permukaan laut. Daerah tertinggi di atas 700 meter terdapat pada kecamatan Camba dan Mallawa, sedangkan daerah terendah terdapat pada kecamatan Maros Baru, Marusu, Turikale, dan Bontoa.

Jenis air permukaan berasal dari sungai-sungai yang berjumlah 12 sungai, yaitu sungai Maros, Parang Pakku, Marusu, Puse, Boringkaluku, Batu Pute, Matturunge, Marana, Campaya, Pattumanagasae, Bontotenga dan Tanralili.

Iklim Kabupaten Maros termasuk iklim tropis basah, dengan curah hujan rata-rata sekitar 395 mm setiap bulannya dengan jumlah hari hujan berkisar 148 hari. Interval suhu udara antara 23,4°C sampai 33,3°C, dengan kelembaban rata-rata 75,55%. Adapun kecepatan angin antara 2 knot sampai dengan 10 knot.

c. Jumlah Penduduk

Hingga akhir tahun 2021, jumlah penduduk Kabupaten Maros tercatat sebanyak 388.738 jiwa yang terdiri dari laki-laki 194.808 jiwa, perempuan 193.930 jiwa dan tersebar di 14 Kecamatan, dengan jumlah penduduk terbesar yakni 50.746 jiwa yang terdapat pada Kecamatan Mandai. Adapun kecamatan



dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah kecamatan Mallawa dengan jumlah penduduk 13.080 jiwa.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Maros pada tahun 2021 telah mencapai **3,36** jiwa per km². Kecamatan Turikale adalah Kecamatan terpadat dengan tingkat kepadatan yang sudah mencapai 1.593 jiwa per km², sedangkan Kecamatan yang tingkat kepadatannya paling rendah adalah Kecamatan Mallawa yaitu 55,44 jiwa per km².

Adapun Jumlah Penduduk berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Maros untuk Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Maros
Tahun 2021**

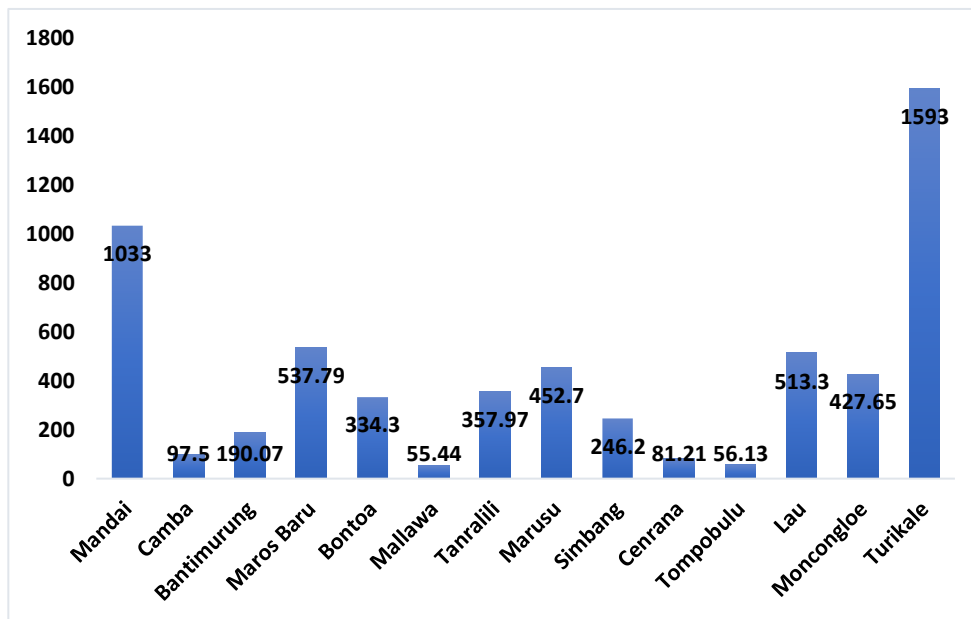
No.	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)			KEPADATAN PENDUDUK (Jiwa/Km2)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6
1	Mandai	25.490	25.256	50.746	1.033,67
2	Camba	6.908	7.266	14.174	97,50
3	Bantimurung	16.435	16.581	33.016	190,07
4	Maros Baru	14.714	14.198	28.912	537,79
5	Bontoa	15.655	15.609	31.264	334,30
6	Mallawa	6.510	6.570	13.080	55,44
7	Tanralili	16.118	15.903	32.021	357,97
8	Marusu	16.761	16.662	33.423	452,70
9	Simbang	13.026	12.899	25.925	246,20
10	Cenrana	7.271	7.426	14.697	81,21
11	Tompobulu	8.235	7.913	16.148	56,13
12	Lau	13.777	13.803	27.580	513,30
13	Moncongloe	10.108	9.936	20.044	427,65
14	Turikale	23.800	23.908	47.708	1.593,98
JUMLAH		194.808	193.930	388.738	3,368

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021

Untuk melihat perbandingan tingkat kepadatan penduduk pada tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Maros dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Tingkat Kepadatan Penduduk Tiap Kecamatan Di Kabupaten Maros Tahun 2021



Jumlah Kepala Keluarga Menurut Kecamatan Tahun 2021

No.	KECAMATAN	JUMLAH KEPALA KELUARGA	KETERANGAN
1	Mandai	14.564	
2	Camba	4.7819	
3	Bantimurung	9.825	
4	Maros Baru	8.322	
5	Bontoa	9.000	
6	Mallawa	4.232	
7	Tanralili	9.849	
8	Marusu	10.016	
9	Simbang	7.896	
10	Cenrana	4.662	
11	Tompobulu	4.746	
12	Lau	8.061	



No.	KECAMATAN	JUMLAH KEPALA KELUARGA	KETERANGAN
13	Moncongloe	5.920	
14	Turikale	13.642	
TOTAL		115.554	

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021

Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Maros Tahun 2017 – 2021

Kelompok Umur	2017	2018	2019	2020	2021
0 – 4	35.306	35.196	34.057	27.791	31.961
5 – 9	32.927	33.114	37.249	37.589	37.532
10 – 14	31.971	32.056	36.225	36.955	35.693
15 – 19	32.940	32.665	37.175	29.233	34.697
20 – 24	31.485	31.990	32.965	34.291	34.239
25 – 29	27.644	27.980	31.780	32.473	32.598
30 – 34	25.484	25.573	30.520	30.953	30.757
35 – 39	25.162	25.163	28.028	28.418	28.631
40 – 44	23.927	24.056	25.829	26.372	26.295
45 – 49	20.976	21.408	25.378	24.835	24.850
50 – 54	17.064	17.678	20.621	22.337	22.244
55 – 59	13.556	14.056	15.650	16.049	15.971
60 – 64	9.606	10.006	10.827	12.854	12.467
65 – 69	7.324	7.531	7.544	8.205	8.095
70 – 74	5.277	5.439	4.960	5.761	5.446
75+	5.734	5.911	5.875	6.319	7.262
Jumlah	346.383	349.822	384.682	388.330	388.738

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah penduduk tahun 2021 dengan kelompok umur, jumlah tertinggi pada kelompok umur 5-9 tahun dengan jumlah penduduk sekitar 37.532 orang atau 9,65 % dari total jumlah penduduk, posisi kedua pada kelompok umur 10-14 tahun dengan persentase penduduk sebesar 9,18 % atau 35.693 orang, kemudian diikuti oleh kelompok umur 15-19 tahun dengan jumlah penduduk 34.697 orang atau 8,92 % dari total jumlah penduduk.

Jumlah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) di Kabupaten Maros tahun 2021 sebanyak 283.552 orang. Dari seluruh penduduk usia kerja tersebut, jumlah penduduk usia 15-64 tahun mencapai 262.749 orang atau



67,59% dari total jumlah penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan tenaga kerja produktif di Kabupaten Maros cukup memadai.

d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Secara administratif Kabupaten Maros terdiri dari 14 kecamatan dan 103 Desa/Kelurahan dengan luas wilayah keseluruhan 1.619,12 km². Berdasarkan data yang ada, diketahui kecamatan terluas adalah kecamatan Tompobulu dengan luas 287,66 km² atau 17,77 % dari luas Kabupaten Maros. Adapun Kecamatan dengan luas wilayah paling kecil adalah kecamatan Turikale dengan luas 29,93 km² atau hanya 1,85 % dari luas wilayah Kabupaten Maros.

Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Maros

NO	KECAMATAN	JUMLAH		LUAS (Km ²)
		DESA	KELURAHAN	
1	Mandai	4	2	49,11
2	Moncongloe	5	0	46,87
3	Maros Baru	4	3	53,76
4	Lau	2	4	53,73
5	Turikale	0	7	29,93
6	Marusu	7	0	73,83
7	Bontoa	8	1	93,52
8	Bantimurung	6	2	173,70
9	Simbang	6	0	105,30
10	Tanralili	7	1	89,45
11	Tompobulu	8	0	287,66
12	Camba	6	2	145,36
13	Cenrana	7	0	180,97
14	Mallawa	10	1	235,92
Total		80	23	1.619.12

Sumber data: Kabupaten Maros Dalam Angka Tahun 2020

Adapun untuk mengetahui jumlah bangunan rumah (tempat tinggal) di Kabupaten Maros menurut kecamatan pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel



berikut :

**Jumlah Bangunan Rumah Layak dan Tidak Layak Huni
Menurut Kecamatan Tahun 2021**

NO	KECAMATAN	JUMLAH RUMAH (UNIT)		TOTAL RUMAH (UNIT)
		LAYAK HUNI	TIDAK LAYAK HUNI	
1	Turikale	11.748	1.888	13.636
2	Maros Baru	3.812	2.708	6.520
3	Mandai	4.950	1.934	6.884
4	Moncongloe	3.808	1.122	4.930
5	Camba	1.318	1.493	2.811
6	Cenrana	1.535	2.116	3.651
7	Bantimurung	2.518	2.451	4.969
8	Simbang	2.490	2.767	5.257
9	Marusu	4.866	1.788	6.654
10	Lau	3.236	2.520	5.756
11	Bontoa	2.604	3.191	5.795
12	Tanralili	3.466	2.366	5.832
13	Tompobulu	2.000	2.465	4.465
14	Mallawa	1.573	1.595	3.168
JUMLAH		49.924	30.404	71.328

Sumber data : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2021

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa jumlah bangunan terbanyak terdapat pada Kecamatan Turikale dengan jumlah 13.636 unit rumah tempat tinggal, dimana 11.748 unit rumah diantaranya layak huni dan 1.888 unit rumah tergolong tidak layak huni. Salah satu hal yang mempengaruhi banyaknya jumlah rumah tempat tinggal di kecamatan Turikale adalah karena letaknya berada diibukota Kabupaten sehingga dipandang cukup strategis dan menguntungkan bila bermukim di Turikale karena kantor-kantor Pemerintahan di Kabupaten Maros sebagian besar berada di Kecamatan ini. Selain itu, umumnya kegiatan perekonomian berpusat di wilayah ini.

Adapun kecamatan lain dengan jumlah rumah tempat tinggal yang cukup besar adalah kecamatan Mandai dengan 6.884 unit rumah. Salah satu hal yang



mempengaruhi banyaknya jumlah rumah tempat tinggal di Kecamatan Marusu adalah karena letaknya yang merupakan kecamatan terdekat dengan kota Makassar yang dilalui secara langsung oleh jalan provinsi sehingga banyak masyarakat yang bekerja di Makassar memilih bertempat tinggal di kecamatan ini.

Kabupaten Maros merupakan kabupaten yang sebagian besar wilayahnya merupakan dataran rendah sehingga dengan curah hujan dan tingkat penyinaran sinar matahari yang cukup menjadikan wilayah Kabupaten Maros sangat potensial untuk kegiatan pada 13 sektor-sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan.

Produksi padi keseluruhan di kabupaten Maros tahun 2021 sebesar **305.956** ton yang dipanen dari areal seluas **48,263.00** Ha atau rata-rata **63.39** Kwintal/Ha. Selain padi, potensi unggulan lain di Kabupaten Maros adalah jagung dengan luas panen sekitar 10.287,00 Ha dan jumlah produksi sebesar 61.133,54 ton, kacang kedelai dengan produksi sebesar 319,20 ton dari luas panen 177 Ha, kacang tanah dengan produksi 3.312,74 ton dari luas panen 726 Ha, ubi kayu dengan produksi sebesar 76.445,75 ton dari luas panen 854 Ha, dan ubi jalar dengan luas panen 94 Ha yang mampumenghasilkan produksi sebesar 28.110,42 ton,

Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten Maros merupakan kontribusi dari empat kecamatan yaitu Kecamatan Maros Baru, Marusu, Lau, dan Kecamatan Bontoa dengan produksi sebesar 11.728,9 ton dan perikanan budidaya dengan produksi sebesar 27.278,2 ton. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang ada di Kabupaten Maros berjumlah 1 TPI yaitu TPI Labuang berlokasi di Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale. Selain itu Pemerintah Kabupaten Maros juga memberikan Bantuan Hibah Barang kepada masyarakat berupa Bibit Unggul kepada kelompok Pembudidaya ikan yang tersebar di beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Maros yang terdiri dari 20 Kelompok Pembudidaya ikan dan masing-masing kelompok mendapatkan bantuan bibit ikan nila sebanyak 15.000 ekor.

Potensi sumberdaya alam (SDA) unggulan kabupaten Maros lainnya



adalah potensi wisata alam Kabupaten Maros merupakan salah satu kabupaten yang menjadi tempat tujuan wisata di Sulawesi Selatan. Lokasi wisata yang paling banyak dikunjungi oleh para wisatawan adalah air terjun Bantimurung, kolam renang Bantimurung, dan Taman Pra Sejarah Leang-Leang. Selain ketiga lokasi wisata tersebut, masih banyak lagi lokasi wisata lainnya, namun secara umum potensi-potensi wisata alam tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal. Adapun potensi wisata alam lain yang belum dimaksimalkan adalah taman wisata alam Pattunuang, cagar alam Karaenta, air terjun Bonto Somba, taman safari Pucak, sungai Pute, dan permandian air panas Reatoa.

Kawasan permandian alam Bantimurung. Terletak di lembah bukit kapur dengan jarak tempuh kurang lebih 12 km dari Ibukota Kabupaten Maros. Lokasi ini mudah dicapai karena kendaraan umum dari dan ke lokasi selalu tersedia. Dengan kondisi alam tropis yang subur menjadikan daerah ini sebagai pemukiman ideal dari berbagai jenis kupu-kupu dimana saat ini tercatat sekitar 150 jenis yang di daerah lain sudah amat sulit ditemui. Goa mimpi merupakan goa terletak di dalam kawasan permandian alam Bantimurung. Di dalam goa ini terdapat stalaktit yang mempunyai kumpulan kristal yang indah.

Taman wisata alam Pattunuang (Biseang Labboro'). Di kawasan ini selain terdapat stalaktit yang indah juga terdapat beberapa jenis flora dan fauna yang dilindungi. Serta menawarkan panorama alam pegunungan yang menawan. Untuk menuju lokasi ini hanya ditempuh jarak kurang lebih 18 km dari Ibukota Kabupaten Maros.

Cagar alam Karaenta. Merupakan salah satu cagar alam nasional dan kawasan hutan yang dilindungi karena disamping dapat mempertahankan kelestarian cadangan air di bawah tanah juga merupakan habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna sebagai sumber daya hayati serta aset lingkungan hidup nasional. Dalam kawasan ini terdapat beberapa goa, salah satu diantaranya adalah Goa Salikang Kallang. Selain itu, terdapat sungai yang indah membelah gunung sampai ke Danau Toakala. Di kawasan ini terdapat pula kera jenis Maccala Maura yang sudah langka.

Air terjun Bonto Somba. Terletak di desa Bonto Somba Kecamatan



Tanralili. Untuk menuju ke lokasi tersebut ditempuh dengan jarak kurang lebih 25 km arah dari ibukota Kabupaten Maros atau sekitar 55 km dari Kota Makassar. Air Terjun Bonto Somba telah dipersiapkan sebagai kawasan objek wisata yang diharapkan akan setara dengan objek wisata alam Bantimurung sehingga dapat memberi nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Maros, khususnya masyarakat desa Bonto Somba.

Taman safari Pucak. Terletak di Desa Pucak Kecamatan Tanralili. Perjalanan menuju lokasi ini ditempuh dengan jarak kurang lebih 20 km dari Ibukota Kabupaten Maros dan sekitar 50 km dari Kota Makassar. Dengan luas areal 150 Ha yang dipersiapkan sebagai lokasi kebun binatang terbesar di Kawasan Timur Indonesia.

Sungai Pute (Batu Napara). Terletak di Desa Salenrang Kecamatan Maros Utara dengan jarak sekitar 5 km dari Ibukota Kabupaten Maros. Dengan air yang jernih dan latar belakang jejeran pegunungan yang indah, ditambah pohon bakau dan nipa yang hijau sepanjang sungai menjadikan lokasi ini sangat potensial untuk menjadi tempat transit bagi wisatawan yang berkunjung ke daerah-daerah, utamanya wisatawan mancanegara.

Permandian air panas Reatoa. Terletak di Dusun Rea Toa Kecamatan Mallawa dengan jarak tempuh menuju lokasi sekitar 60 km dari Ibukota Kabupaten Maros. Kawasan objek wisata ini memiliki potensi besar sehingga perlu untuk segera dikembangkan.

Taman prasejarah Leang-Leang. Terletak pada deretan bukit kapur yang curam di Kelurahan Kallabirang Kecamatan Bantimurung dengan jarak tempuh sekitar 17 km dari Ibukota Kabupaten Maros dengan luas kawasan 5.498 m². Para arkeolog berpendapat bahwa beberapa goa yang terdapat disana telah dihuni sekitar 8000-3000 tahun sebelum masehi. Selain itu di Kabupaten Maros banyak juga terdapat situs, benda dan kawasan cagar budaya yang bisa dijadikan tujuan wisata.

**Daftar Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan**

No	NAMA OBYEK	KATEGORI	LOKASI
1	Jarie	Situs	Kecamatan Simbang
2	Tampuang	Situs	Kecamatan Simbang
3	Saripa	Situs	Kecamatan Simbang
4	Karrasa	Situs	Kecamatan Simbang
5	Kado	Situs	Kecamatan Simbang
6	Burung 1	Situs	Kecamatan Bantimurung
7	Burung 2	Situs	Kecamatan Bantimurung
8	Pangie	Situs	Kecamatan Bantimurung
9	Sampeang	Situs	Kecamatan Bantimurung
10	Ulu Leang	Situs	Kecamatan Bantimurung
11	Ambe Paco	Situs	Kecamatan Bantimurung
12	Elle Pusae	Situs	Kecamatan Bantimurung
13	Bettue	Situs	Kecamatan Bantimurung
14	Uluwae	Situs	Kecamatan Bantimurung
15	Pajae	Situs	Kecamatan Bantimurung
16	Pettae	Situs	Kecamatan Bantimurung
17	Pettakere	Situs	Kecamatan Bantimurung
18	Tinggi Ada	Situs	Kecamatan Bantimurung
19	Baratedong 1	Situs	Kecamatan Bantimurung
20	Baratedong 2	Situs	Kecamatan Bantimurung
21	Alla Birang	Situs	Kecamatan Bantimurung
22	Pallenge	Situs	Kecamatan Bantimurung
23	Bara Jarang	Situs	Kecamatan Bantimurung
24	Pabbuno Juku	Situs	Kecamatan Bantimurung
25	Lompoa	Situs	Kecamatan Bantimurung
26	Bembe	Situs	Kecamatan Bantimurung
27	Timpuseng	Situs	Kecamatan Bantimurung
28	Batu Karope	Situs	Kecamatan Bantimurung
29	Bulu Tungke'e	Situs	Kecamatan Bantimurung
30	Barugayya	Situs	Kecamatan Bantimurung
31	Pa'limukang	Situs	Kecamatan Bantimurung
32	Tanre	Situs	Kecamatan Bantimurung
33	Balang	Situs	Kecamatan Bantimurung
34	Jing	Situs	Kecamatan Bantimurung
35	Sengkae	Situs	Kecamatan Bantimurung
36	Bata-battaa	Situs	Kecamatan Bantimurung
37	Pacce-pacce	Situs	Kecamatan Bantimurung
38	Bulu Buttue	Situs	Kecamatan Bantimurung
39	Boddong	Situs	Kecamatan Bantimurung
40	Canggoreng	Situs	Kecamatan Bantimurung
41	Samongkeng 1	Situs	Kecamatan Bantimurung
42	Samongkeng 2	Situs	Kecamatan Bantimurung
43	Samongkeng 3	Situs	Kecamatan Bantimurung



44	Samongkeng 4	Situs	Kecamatan Bantimurung
45	Lambatorang	Situs	Kecamatan Bantimurung
46	Pucu	Situs	Kecamatan Bantimurung
47	Wanue	Situs	Kecamatan Bantimurung
48	Tenggae	Situs	Kecamatan Bantimurung
49	Bulu Kamase	Situs	Kecamatan Bantimurung
50	Panampu 1	Situs	Kecamatan Bantimurung
51	Panampu 2	Situs	Kecamatan Bantimurung
52	Bungaeja 1	Situs	Kecamatan Bantimurung
53	Bungaeja 2	Situs	Kecamatan Bantimurung
54	Maddauseng	Situs	Kecamatan Bantimurung
55	Botto	Situs	Kecamatan Bantimurung
56	Batu Tianang	Situs	Kecamatan Bontoa
57	Karama/Akkarasa	Situs	Kecamatan Bontoa
58	Pasaung		Kecamatan Bontoa
59	Sipong 1		Kecamatan Bontoa
60	Sipong 2		Kecamatan Bontoa
61	Sipong 3		Kecamatan Bontoa
62	Monroe		Kecamatan Bontoa
63	Cempae		Kecamatan Bontoa
64	Wajan Raksasa		Kecamatan Turikale
65	Beduk tertua		Kecamatan Turikale
66	Pedang V.O.C		Kecamatan Turikale
67	Kerangka Manusia Leang Jarie		Kecamatan Simbang
68	Bendungan Batu Bassi		Kecamatan Simbang
69	Gudang mesiu		Kecamatan Simbang
70	Prasasti Jepang		Kecamatan Simbang
71	Bunker Jepang		Kecamatan Mandai
72	Makam La Makkulau Arung		Kecamatan Bantimurung
73	Makam Arung Macege		Kecamatan Camba
74	Makam Karaeng Bontoa		Kecamatan Bontoa
75	Makam Kareang Lalang Tedong		Kecamatan Bontoa
76	Makam Nahkoda		Kecamatan Bontoa
77	Balla Lompoa		Kecamatan Turikale
78	Kantor Pengadilan Lama		Kecamatan Turikale
79	Kantor Kejaksaan Lama		Kecamatan Turikale
80	Rumah Sakit Lama		Kecamatan Turikale
81	Penjara Lama		Kecamatan Turikale
82	Rumah Kodok		Kecamatan Turikale
83	Kantor Pemerintah Belanda		Kecamatan Turikale

Sumber data :Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2021

Pada tahun 2011, Pemerintah Kabupaten Maros telah berhasil menarik investor untuk berinvestasi dalam bidang pariwisata di Kabupaten Maros. Hal ini



ditandai dengan terbangunnya sebuah tempat wisata baru yang dikelola oleh swasta yaitu Maros Waterpark. Tempat wisata ini sangat mudah untuk dicapai karena jaraknya yang tidak jauh, hanya berjarak sekitar 1 km dari Taman Wisata Alam Bantimurung.

Perhelatan Akbar Tahunan sebagai Ajang Promosi Potensi dan Investasi unggulan bertajuk Apkasi Expo 2021 (AOE2021) yang sedianya akan digelar akhir tahun 2021 dibatalkan dengan alasan Pandemi Covid-19.

Daftar Penyelenggaraan Expo

No	Nama Kegiatan	Jumlah	Ket.
1.	Pameran Apkasi Otonomi Expo 2021	-	Tidak dilaksanakan

Sumber data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2021

Wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Maros bukan hanya wisatawan lokal melainkan dari Luar Negeri pun banyak yang berkunjung menikmati panorama alam Kabupaten Maros.

DAFTAR KUNJUNGAN WISATAWAN TAHUN 2017-2021

TAHUN	TARGET KUNJUNGAN	REALISASI KUNJUNGAN	PERSENTASE
2017	442.874	442.874	100%
2018	407.580	407.580	100%
2019	391.700	518.635	132%
2020	402.000	238.456	59,32%
2021	282.033	65.507	23,22%

Sumber data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2021

**JUMLAH PROMOSI EVENT DAERAH YANG TERLAKSANA
DI DALAM NEGERI**

No.	Nama Kegiatan	Jumlah	Keterangan
1.	Kunjungan Kerja Konferensi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KPSI)	1 (Satu) Kali	
2.	Pelantikan Pengurus Forkom Dara Daeng (FKDDM) Kab. Maros	1 (Satu) Kali	
3.	Lomba Penulisan Sejarah Lokal Maros	1 (Satu) Kali	
4.	Raker Cabang I Dewan Pimpinan Cabang Masyarakat Sadar Wisata Kab. Maros	1 (Satu) Kali	
5.	Upacara Adat Kerajaan Marusu “Kattobokko”	1 (Satu) Kali	
6.	Pameran Temporer dan Lomba Cerita Rakyat	1 (Satu) Kali	
7.	Kolaborasi Pariwisata Kab. Maros	2 (Dua) Kali	
8.	Penandatanganan MOU dengan Polteknik Pariwisata Makassar	1 (Satu) Kali	
9.	Grand Final Pemilihan Dara Daeng Maros	1 (Satu) Kali	
10.	Pemilihan Dara Daeng Cilik Kab. Maros	1 (Satu) Kali	
11.	MUSDA Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia DPD Sulsel	1 (Satu) Kali	
12.	Pelatihan Pengembangan SDM Pengelolaan Destinasi Pariwisata	1 (Satu) Kali	
13.	Ajang Anugrah Desa Wisata oleh Kemenkraf	1 (Satu) Kali	
14.	Maros Pangkep Geopark Bike	1 (Satu) Kali	
15.	Maros Pangkep Geopark Run 2021	1 (Satu) Kali	
16.	Penyerahan Apresiasi hasil penelitian Arkeolog untuk Maros	1 (Satu) Kali	
17.	Trail Adventure Maros 76	1 (Satu) Kali	
18.	Gubernur Half Marathon	1 (Satu) Kali	
19.	Study Bandng Pengelolaan Desa Wisata	1 (Satu) Kali	
20.	MOU Taman Suaka Pubakala	1 (Satu) Kali	
21.	Lomba Musik Tradisional Kecapi	1 (Satu) Kali	
22.	Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI	1 (Satu) Kali	



23.	Sosialisasi Geopark Maros Pangkep	1 (Satu) Kali	
24.	Penghargaan Inovasi Pengembangan Desa Wisata	1 (Satu) Kali	
25.	Addvisory AssGeopark	1 (Satu) Kali	
26.	Sosialisasi Wisata halal	1 (Satu) Kali	
27.	Workshop Pelaku ekonomi kreatif	1 (Satu) Kali	
28.	Piagam penghargaan Bupati Maros kepada Runner Up II Duta pariwisata Indonesia	1 (Satu) Kali	
29.	Maudu Ada' dan Kemah Lembaga Adat dan Budaya Masyarakat Salenrang	1 (Satu) Kali	
30.	Launching Familiarization Trip Istana Karst Desa Bontolempangan	1 (Satu) Kali	
31.	Acara Mappalili Kerajaan Adat marusu	1 (Satu) Kali	
32.	MOU dengan Angkasa Pura I	1 (Satu) Kali	
33.	Rakornas Generasi Pesona Indonesia (Genpi)	1 (Satu) Kali	
34.	Talkshow Geopark Maros Pangkep	1 (Satu) Kali	
35.	Talkshow Promosi Pariwisata	1 (Satu) Kali	
36.	Study Banding Pengelolaan Wisata Sususr Gua	1 (Satu) Kali	
37.	Maros Beauty Excotic	1 (Satu) Kali	
38.	Launching Program Qris Kawasan pariwisata	1 (Satu) Kali	
39.	Kartika Fun Cross	1 (Satu) Kali	
40.	Geopark Pangkep Stakholder Collaboration Award 2021	1 (Satu) Kali	
41.	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Maros	1 (Satu) Kali	
42.	Launching Kalender Event 2022	1 (Satu) Kali	
43.	Persentase Go Local Hub	1 (Satu) Kali	
44.	MOU Jaminan Keselamatan Wisata Leang-Leang bersama Jasa Raharja	1 (Satu) Kali	
45.	Car Free Day	1 (Satu) Kali	
46.	Sosialisasi Wisata Halal	1 (Satu) Kali	



47.	Workshop pelaku Ekonomi Kreatif guna pengembangan kata kreatif Indonesia	1 (Satu) Kali	
48.	Toraja Beyond Tourism	1 (Satu) Kali	
49.	Pekan Raya SUL-SEL	1 (Satu) Kali	
50.	Road Show 14 Kecamatan Ekonomi Kreatif	1 (Satu) Kali	
51.	Pengembangan DEKRAMART	1 (Satu) Kali	

Sumber data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2021

JUMLAH LOKASI YANG MEMPEROLEH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBINAAN KEMITRAAN USAHA MASYARAKAT

No.	Uraian	Jumlah Yang Terlibat	Keterangan
1.	Kawasan Wisata Kuliner PTB	108	Pedagang
2.	Kawasan Wisata Alam Bantimurung	37	Pedagang
3.	Gedung Pusat Ole-ole Maros (Balla' Mabalanca)	26	UMKM
JUMLAH		171	

Sumber data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2021

Berkat kreatifitas dan ide cemerlang dari Pemerintah Kabupaten Maros, pada tahun 2012 Kabupaten Maros memiliki sebuah ikon baru yaitu Pusat Kuliner Maros. Pusat kuliner ini terletak tepat di pusat kabupaten Maros dan merupakan hasil dari penataan pedagang kaki lima yang dilakukan secara kekeluargaan dan hingga saat ini Pusat kuliner Maros terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan karena adanya inovasi-inovasi kreatif dari Kepala Daerah untuk menghadirkan suatu kawasan yang bisa mendorong pertumbuhan perekonomian bagi MasyarakatSosiat Kabupaten Maros.

Potensi kehutanan di Kabupaten Maros dapat dilihat dari Jenis hasil hutan yang terproduksi tiap tahunnya, seperti kayu jati, kayu bakar dan bambu mengalami yang pertumbuhan tiap tahunnya.Ketiga jenis hasil hutan ini memiliki keterkaitan langsung dengan orientasi usaha yang berkembang di Kabupaten Maros maupun daerah sekitarnya, terutama Kota Makassar. Kayu Jati



merupakan bahan baku bagi industri furniture, kayu bakar memenuhi kebutuhan kegiatan masak, baik oleh penduduk maupun usaha-usaha lainnya, dan untuk bambu dipergunakan untuk berbagai keperluan, terutama untuk kegiatan bangunan yang banyak dilaksanakan. Selain itu juga Kabupaten Maros memiliki potensi Tegakan Pinus yang terdapat di 4 kecamatan yakni, Kecamatan Tompobulu, Kecamatan Cenrana, Kecamatan Camba dan Kecamatan Mallawa.

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Dalam implementasi pelaksanaan otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah pusat menyerahkan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (desentralisasi).

Kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dan pilihan tersebut selanjutnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan menyusun program dan kegiatan terkait dengan masing-masing urusan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) pelaksana urusan.

Pemerintah Kabupaten Maros pada tahun 2021, telah menyusun program dan kegiatan serta telah mengalokasikan sumber daya berupa dana, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia ke masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pelaksana program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan desentralisasi. Keberhasilan pelaksanaan urusan desentralisasi tersebut dapat dinilai dari tingkat pencapaian program dan kegiatan yang diukur dari tingkat capaian urusan wajib dan urusan pilihan dari masing-masing urusan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Maros untuk tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Satuan Kerja Perangkat Daerah
Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2021**

SKPD KABUPATEN	NAMA	JUMLAH PERSONIL (PNS)
Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah Kabupaten Maros	191
Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD Kabupaten Maros	57
Inspektorat	Inspektorat Kabupaten Maros	78
Dinas Daerah	Dinas Pendidikan	2625
	Dinas Kesehatan	793
	Dinas Sosial	48
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	39
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	54
	Dinas Komunikasi dan Informatika	60
	Dinas Perhubungan	74
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	40
	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	59
	Dinas Lingkungan Hidup	83
	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	65
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	199
	Dinas Perikanan	63
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	55
	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	57
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	38
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	52	
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan	66	
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	54	
Rumah Sakit Daerah	RSU Salewangang	343
Kecamatan	Kecamatan Mallawa	37

KABUPATEN MAROS TAHUN 2021



SKPD KABUPATEN	NAMA	JUMLAH PERSONIL (PNS)
	Kecamatan Cenrana	29
	Kecamatan Camba	47
	Kecamatan Simbang	30
	Kecamatan Bantimurung	53
	Kecamatan Turikale	119
	Kecamatan Maros Baru	67
	Kecamatan Lau	84
	Kecamatan Bontoa	38
	Kecamatan Mandai	57
	Kecamatan Marusu	29
	Kecamatan Moncongloe	27
	Kecamatan Tanralili	48
	Kecamatan Tompobulu	29
Lembaga Teknis Lainnya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	34
	Badan Kesbang dan Politik	34
	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	54
	Badan Keuangan Daerah	84
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	34
	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	33
	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	100
TOTAL		6.363

Sumber data : Data BKPSDM Kab. Maros dan Data Kepegawaian OPD terkait, 2021

Adapun pencapaian-pencapaian Pemerintah Kabupaten Maros yang diperoleh dalam kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2021 berupa prestasi / penghargaan yang telah diterima adalah sebagai berikut :

1. Penghargaan IPL (Indeks Pembangunan Literasi) dari KEMENDIKBUD RI dan USAID tahun 2017;



2. Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dari BPK (untuk kelima kalinya) tahun 2017;
3. Penghargaan Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2017.
4. Penghargaan Kementerian PUPR tahun 2017;
5. Penghargaan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulsel tahun 2017;
6. Penghargaan Swasti Saba Wiwerda (Kabupaten sehat) dari Kementerian Kesehatan RI tahun 2017;
7. Penghargaan Adhitya Karya Mahatva Yodha Awards dari Ketua Pusat Karang Taruna tahun 2017;
8. Diberikan kepada RSUD Salewangan Kab. Maros, sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori baik dengan catatan dari Kementerian Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2018;
9. Diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Maros atas peran Aktif dan kepeduliannya terhadap Perlindungan Pegawai Pemerintah bukan Aparatur Sipil Negara dalam program jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 15 Oktober 2018;
10. Kabupten/Kota layak anak Kategori PRATAMA, dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia di Surabaya 23 Juli 2018;
11. National Recurement Award, kategori (UKBJ) sebagai pusat Keunggulan (Centre Of Excellence) pengadaan barang dan jasa dari LKPP Bandung 30 oktober 2018;
12. ADHITYA KARYA MAHATVA YODHA 2017 sebagai Pembina Umum terbaik Karang Taruna Kabupaten dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, Denpasar Januari 2018;
13. Apresiasi dan perhatian terhadap Pendidikan Tinggi, Pengembangan Sumber Daya Manusia serta Pelestarian Lingkungan di Kabupaten Maros dari Universitas Muslim Maros, 15 September 2018;



14. Tokoh Penggerak Program TPKAD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018, atas Kinerja pasilitasi Akses KUR terbanyak melalui Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) di Sulawesi Selatan , dari Kepala OJK Regional 6 Sulawesi, Maluku dan Papua di Makassar, 20 Oktober 2018;
15. Dukungan Pelaksanaan Program JKN-KIS Kab. Maros tahun 2018, dari Kepala BPJS Kesehatan Cabang Makassar di Makassar, Januari 2018;
16. Kepala Daerah Inovatif dari koran Sindo;
17. Peran aktif dan dukungan dalam menyukseskan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan;
18. Sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia pada Tahun 2017 dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta 5 Desember 2018;
19. Kabupaten yang memiliki komitmen dalam upaya mewujudkan kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
20. Opini Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Perwakilan Sulawesi Selatan atas Laporan Keuangan Pemkab. Maros Tahun 2018;
21. Piala Adipura nilai tertinggi Nasional dengan Kategori Kota Kecil, diserahkan Wakil Presiden RI, Yusuf Kalla di damping Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI, Siti Nurbaya Bakar, Jakarta 2019;
22. Juara Peserta Inspiratif dalam Pameran APKASI Otonomi EXPO 2018 di BSD (City Tangerang 6-8 Juli 2018), diserahkan oleh Wakil Ketua Penyelenggara APKASI Otonomi EXPO 2018, Waluyo;
23. Sebagai Kabupaten / Kota yang memiliki 100% Puskesmas Terakreditasi, Jakarta 28 November 2018;
24. Penghargaan Menteri Dalam Negeri RI kepada Pemerintah Kabupaten Maros atas keterlibatan dan partisipasi aktif Aparatur Pemadam



Kebakaran dalam membantu Penanggulangan Bencana dan Evakuasi korban pada bencana di Provinsi Sulawesi Selatan;

25. Juara kreasi APKASI OTONOMI EXPO;
26. Piagam penghargaan sebagai ucapan terima kasih atas dukungan pelaksanaan JKN – KIS atas tercapainya Cakupan Semesta Kabupaten Maros tahun 2019;
27. Penghargaan Kabupaten Layak Anak Kategori PRATAMA;
28. BKN Award, Kategori Penilaian Tingkat Kabupaten / Kota Tipe B;
29. APDESI Award;
30. TPAKD sebagai Percepatan Akses Pembiayaan KUR melalui Data SIKP, Sebagai Penggerak Percepatan Akses Keuangan;
31. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Lima kali berturut- turut untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2014 s/d 2018;
32. Penghargaan Swasti Saba Wistara (Pengembangan) Penghargaan tertinggi Kab/Kota Sehat dengan cakupan Wilayah sebanyak 14 Kecamatan 103 Desa/Kelurahan;
33. Piagam penghargaan sebagai Kategori Humas Kab/Kota dengan Publikasi Media Internal terbaik pada Event Humas Sul – Sel Expo 2019;
34. Pelayanan Publik Terbaik 2019;
35. Sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia;
36. Penghargaan Atas Prestasi dan Kinerja Pengolahan Sistem Informasi dan Program (SIKP) selama Periode 2019 se- Sulawesi Selatan;
37. ADIWIYATA MANDIRI 2019;
38. BANTIMURUNG BULUSARAUNG NATIONAL PARK;
39. Kabupaten yang melaksanakan Percepatan Pembangunan Ketahanan Keluarga dan sebagai Desa Percontohan Percepatan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
40. Pemenang Lomba Kelembagaan Kelompok Kerja Operasional Posyandu Berprestasi.



41. Penghargaan sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (HAM)
42. Piagam penghargaan atas pelaksanaan pembelajaran tatap muka berbasis digital dalam era pandemi covid-19
43. Piagam penghargaan sebagai kabupaten penerima anugerah parahita ekapraya tahun 2020 kategori utama.
44. Penghargaan atas partisipasi dalam kegiatan "literacy camp" pada tanggal 27-28 agustus 2021
45. Piagam penghargaan terbaik 1 dalam pengelolaan program kota tanpa kumuh (KOTAKU) Prov. Sulawesi Selatan tahun 2020 pada tahun 2021
46. Penghargaan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020 pada tahun 2021.
47. Piagam penghargaan sebagai kabupaten layak anak peringkat PRATAMA tahun 2021.
48. Piagam Penghargaan pemerintah kabupaten dengan implementasi Qris dalam Rangka mendukung ekosistem Tranksaksi digital.
49. Keterbukaan Informasi badan publik tahun 2021 kategori pemerintah kabupaten/kota sebagai badan publik CUKUP INFORMATIF dalam Implementasi UU no. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
50. Piagam Penghargaan atas dukungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pegawai non ASN pemerintah kabupaten Maros.

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Maros Tahun 2021

Pemerintah Kabupaten Maros telah melaksanakan program dan kegiatan di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib, urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah. Hal tersebut merupakan implementasi pelaksanaan otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.



Pada Tahun Anggaran 2021 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maros sebesar Rp. 1.449.473.299.517,00 dan realisasi sebesar Rp. 1.170.640.767.864,02 atau sebesar 80,76%. Adapun rincian target dan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2021 diuraikan sebagai berikut :

f.1. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

f.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang berasal dari: Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; serta Lain-lain PAD yang Sah. Target peningkatan PAD harus diikuti dengan analisis yang tepat terutama dampaknya terhadap kegiatan-kegiatan perekonomian pada masyarakat secara menyeluruh. Meskipun kontribusi PAD terhadap pendapatan keseluruhan dalam APBD masih tergolong sangat kecil. namun PAD masih merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dari waktu ke waktu masih sangat potensial untuk bisa mengalami peningkatan.

Pada perubahan APBD tahun anggaran 2021, PAD dianggarkan sebesar Rp. 1.449.473.299.517,00 terealisasi sebesar Rp. 1.170.640.767.864,02 atau mencapai 80,76 % dari target yang ditetapkan. Rincian anggaran dan realisasi PAD Kabupaten Maros tahun anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.449.473.299.517,00	1.170.640.767.864,02	80,76
1	Pajak Daerah	164.630.000.000,00	125.287.935.563,00	76,10
2	Retribusi	70.155.000.000,00	13.363.422.235,67	19,05



	Daerah			
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.033.936.654,00	11.969.088.837,80	108,48
4	Lain-lain PAD yang Sah	58.138.182.357,00	9.905.714.377,92	17,04

Sumber : BPKPD, 2021

Dari keempat komponen PAD hanya pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang capaiannya 100 persen sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Melihat masih rendahnya realisasi PAD Kabupaten Maros tahun anggaran 2021, maka perlu adanya optimalisasi pemenuhan target pendapatan yang dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, diantaranya dengan menggali obyek potensial yang baru.

a. Pajak Daerah

Jenis Pajak Daerah yang direncanakan menjadi bagian PAD Kabupaten Maros pada tahun anggaran 2021 meliputi: Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Mineral bukan Logam; Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Penerimaan dari Pajak Daerah Kabupaten Maros tahun anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp. 164.630.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 125.287.935.563,00 atau 76,10 %. Kurangnya realisasi pajak daerah pada tahun 2021 dikarenakan masih adanya pandemi COVID-19 yang dimulai pada bulan maret tahun 2020 hingga saat ini. Hal ini mengakibatkan hampir seluruh kegiatan masyarakat terhenti, termasuk usaha hotel, restoran. Namun demikian beberapa sumber pajak daerah terealisasi diatas 100 persen (melampaui target). Rincian anggaran dan realisasi hasil pajak daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2

**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah
Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2021**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
	Pendapatan Pajak Daerah	164.630.000.000,00	125.287.935.563,00	76,10
1	Pajak Hotel	2.000.000.000	2.434.168.302	121,71
2	Pajak Restoran	10.000.000.000	9.681.762.682	96,82
3	Pajak Hiburan	500.000.000	749.696.315	149,94
4	Pajak Reklame	1.100.000.000	977.876.839	88,90
5	Pajak Penerangan Jalan	32.000.000.000	28.920.777.130	90,38
6	Pajak Parkir	15.000.000.000	7.112.813.400	47,42
7	Pajak Air Tanah	500.000.000	682.558.540	136,51
8	Pajak Sarang Burung Walet	30.000.000	8.200.000	27,33
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	33.000.000.000	8.691.376.103	26,34
10	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	29.500.000.000	24.786.413.821	84,02
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	41.000.000.000	41.242.292.431,00	100,59

Sumber: BPKPD, 2021

Sebagian besar jenis pajak daerah yang direncanakan dapat direalisasikan diatas target, kecuali pajak parkir (47,42%), Pajak Sarang Burung Walet sebesar 27,33 % ; dan Pajak Mineral bukan Logam sebesar 26,34 %. Perolehan pajak air tanah memiliki persentase realisasi tertinggi yaitu 136,51 %, kemudian diikuti oleh penerimaan pajak hotel dengan persentase realisasi sebesar 121,71 %. Penerimaan pajak dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menempati urutan ketiga dengan persentase realisasi penerimaan sebesar 100,59 %.

b. Retribusi Daerah



Jenis retribusi daerah yang menjadi bagian PAD Kabupaten Maros meliputi: Retribusi Pelayanan Kesehatan; Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; Retribusi Pelayanan Pasar; Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; Retribusi Tempat Pelelangan; Retribusi Tempat Khusus Parkir; Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa; Retribusi Rumah Potong Hewan; Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga; Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; dan Retribusi Izin Trayek.

Pendapatan retribusi daerah pada tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 70.155.000.000,00 dan terealisasi sebesar 19,05 % atau penerimaannya sebesar Rp. 13.363.422.235,67. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi daerah pada tahun anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah
Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Persen (%)
	Pendapatan Retribusi Daerah	70.155.000.000,00	13.363.422.235,67	19,05
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	48.050.000.000	79.325.000	0,17
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	600.000.000	500.076.000	83,35
3	Retribusi Pelayanan Pasar	3.100.000.000	2.548.960.171	82,22
4	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	500.000.000	403.380.000	80,68
5	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	-	0
6	Retribusi Tempat Pelelangan	200.000.000	129.641.000	64,82
7	Retribusi Tempat Khusus Parkir	700.000.000	390.972.000	55,85
8	Retribusi Tempat Penginapan/	400.000.000	17.200.000	4,30



No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Persen (%)
	Pesanggrahan/ Villa			
9	Retribusi Rumah Potong Hewan	255.000.000	258.045.000	101,19
10	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	8.350.000.000	4.309.902.500	51,62
11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	-	-	-
12	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	8.000.000.000	4.725.920.564,67	59,07
13	Retribusi Izin Trayek	-	-	-

Sumber: BPKPD, 2021

Retribusi rumah potong hewan yang hanya ditargetkan sebesar Rp. 255.000.000 mampu melampaui target hingga mencapai Rp. 258.045.000 atau sebesar 101,19 %. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang direncanakan sebesar Rp. 8.000.000.000, dan terealisasi sebesar Rp. 4.725.920.564,67 atau 59,07 %. Demikian halnya dengan retribusi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan realisasi sebesar Rp 403.380.000 atau sebesar 80,68%. Sedangkan retribusi dengan realisasi terendah adalah retribusi Retribusi pelayanan Kesehatan sebesar Rp. 79.325.000 atau sebesar 0,17 % dari target yang direncanakan sebesar Rp. 48.050.000.000.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan laba yang diperoleh dari penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD) yang penerimaannya menjadi bagian dari PAD. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mencapai 108 persen, dengan nilai penerimaan sebesar Rp. 11.969.088.837,80 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 11.033.936.654,00.



Tabel 2.4

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.033.936.654,00	11.969.088.837,80	108
1	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	11.033.936.654,00	11.969.088.837,80	108

Sumber: BPKPD, 2021

d. Lain-Lain PAD Yang Sah

Lain-Lain PAD Yang Sah terdiri dari: Penerimaan Jasa Giro; Pendapatan Bunga; Tuntutan Ganti Kerugian Daerah; Pendapatan dari Pengembalian; Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan; Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah; Pendapatan BLUD; Lain-lain PAD yang Sah Lainnya; dan Dana Kapitasi JKN pada FKTP.

Pendapatan dari Lain-lain PAD Yang Sah pada tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 58.138.182.357,00 dan terealisasi sebesar Rp. 9.905.714.377,92 atau sekitar 17,04 persen. Adapun rincian anggaran dan realisasi dari Lain-lain PAD Yang Sah Kabupaten Maros tahun anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5

Anggaran dan Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah

**Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2021**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
	Lain-lain PAD Yang Sah	58.138.182.357,00	9.905.714.377,92	17,04
1	Penerimaan Jasa Giro	5.000.000.000	2.637.414.922,44	52,75
2	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	23.504.678.397,00	236.974.993,00	1,01
3	Pendapatan dari Pengembalian	300.000.000	1.015.875.373,11	338,63
4	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan	-	-	-
5	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	-	-	-
6	Pendapatan BLUD	27.783.503.960	0	0
7	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	47.992.707.506	9.126.629.758	19,02
8	Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0	4.252.248.000	100

Sumber : BPKPD, 2021

Rendahnya capaian realisasi tersebut dikarenakan sumber pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan tidak terealisasi. Hanya Pendapatan dari Pengembalian yang terealisasi sebesar sebesar 338,63 %, kemudian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah hanya terealisasi sebesar 1,01 %; Pendapatan BLUD terealisasi sebesar 0%. Sedangkan pendapatan tertinggi bersumber dari dana kapitas JKN pada FKTP yang tidak ditargetkan namun mendapatkan realisasi sebesar Rp. 4.252.248.000.

f.1.2 Pengelolaan Dana Perimbangan

Dana Perimbangan yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana Perimbangan/Pendapatan Transfer ini terdiri dari: Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak; Dana Alokasi Umum (DAU); dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan bertujuan untuk



mengurangi ketimpangan sumber pendapatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antar daerah.

Dana perimbangan meliputi dana bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik. Rincian pendapatan dana perimbangan dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut.

Tabel. 2.6
Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan
Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
	Dana Perimbangan	899.068.505.000	898.036.293.199	99,89
1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	56.804.453.000	57.827.493.738	101,80
2	Dana Alokasi Umum (DAU)	660.026.786.000	660.026.786.000	100
3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	219.777.978.000	206.386.331.640	93,91

Sumber : BPKPD, 2021

1. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

a. Bagi Hasil Pajak

Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak Kabupaten Maros pada tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp. 56.804.453.000 dan terealisasi sebesar Rp. 57.827.493.738 atau sekitar 101,80 %. Penerimaan bagi hasil pajak diperoleh dari penerimaan Bagi hasil pajak bumi dan pembangunan sektor pertambangan yaitu sebesar Rp. 11.965.229.264 atau 263,28 % dari target yang direncanakan sebesar Rp.4.544.642.000. Sedangkan Bagi Hasil dari pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Paal 29 Wajib Pajak terealisasi sebesar Rp. 508.261.294 atau sebesar 5,35%. Bagi Hasil cukai tembakau terealisasi sebesar Rp 185.903.679 atau sebesar 110,66 %. Rincian anggaran dan realisasi Bagi Hasil Pajak dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel. 2.7
Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Pajak
Maros Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
	Dana Bagi Hasil Pajak	56.804.453.000	57.827.493.738	101,80
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	4.544.642.000	11.965.229.264	263,28
2	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	9.494.421.000	508.261.294	5,35
3	Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau	168.000.000	185.903.679	110,66

Sumber: BPKPD, 2021

b. Bagi Hasil Bukan Pajak

Bagi hasil bukan pajak terdiri atas lima komponen yaitu; Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan, Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan, Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi, Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi.

Penerimaan dari Bagi bukan Hasil Pajak Kabupaten Maros pada tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp **5.056.678.000** dan terealisasi sebesar Rp **7.452.485.966** atau sebesar 147,38 %. Persentase penerimaan terbesar diperoleh dari Bagi Hasil dari Provinsi Sumber Daya Hutan, dengan realisasi Rp 46.386.242 atau sebesar 252,32%. Kemudian diikuti oleh Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi sebesar Rp 1.195.798.368 atau 154,59% dari target yang ditetapkan. Rincian pendapatan dari bagi hasil bukan pajak adalah sebagai berikut :



Tabel. 2.8
Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak
Maros Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	5.056.678.000	7.452.485.966	147,38
1	Bagi Hasil dari Provinsi Sumber Daya Hutan	18.354.000	46.386.242	252,32
2	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	1.128.319.000	1.357.619.150	120,32
3	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	3.136.497.000	200	0
4	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	773.508.000	1.195.798.368	154,59

Sumber: BPKPD, 2021

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penerimaan Pemerintah Kabupaten Maros yang bersumber dari DAU pada tahun anggaran 2020 direncanakan sebesar Rp. 660.026.786.000 dan terealisasi sebesar Rp. 660.026.786.000 atau 100 %. Rincian anggaran dan realisasi DAU Kabupaten Maros dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel. 2.9
Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU)
Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
	Dana Alokasi	660.026.786.000	660.026.786.000	100



	Umum			
1	Dana Alokasi Umum	660.026.786.000	660.026.786.000	100

Sumber: BPKPD, 2021

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

a. DAK Fisik

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Kebijakan transfer ke daerah terutama melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) ditujukan untuk pembangunan fisik berbagai sarana dan prasarana layanan publik di daerah.

Untuk Tahun 2021 DAK Fisik Kabupaten Maros terdiri dari DAK fisik terdiri dari DAK Bidang Jalan, DAK Bidang Irigasi, DAK Bidang Air Minum, DAK Bidang Sanitasi, DAK Bidang Kesehatan (Kesehatan, Rumah Sakit dan Keluarga Berencana), DAK Bidang Pendidikan (PAUD, SD, SMP dan Perpustakaan), DAK Bidang Perhubungan, DAK Bidang Perumahan, DAK Bidang Pertanian, DAK Bidang Perikanan, DAK Bidang Industri Kecil dan menengah, DAK Bidang Lingkungan Hidup. Namun dikarenakan adanya *refocusing* anggaran dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19, maka pada tahun 2021, DAK Fisik bidang perhubungan dan Bidang Pendidikan sub bidang perpustakaan dihapus. Rincian anggaran dan realisasi DAK Fisik Kabupaten Maros tahun anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel. 2.10
Anggaran dan Realisasi DAK Fisik
Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
	Dana Alokasi Khusus Fisik	89.330.701.000	84.386.111.012	94,46



No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
1	Dana Alokasi Khusus Fisik	89.330.701.000	84.386.111.012	94,46

Sumber : BPKPD, 2021

b. DAK Non Fisik

Untuk Tahun 2021 DAK Non Fisik Kabupaten Maros terdiri dari DAK Bantuan operasional PAUD, DAK tunjangan porfesi guru, DAK tambahan penghasilan guru, DAK Bantuan Operasional Kesehatan, DAK Bantuan Operasional KB, DAK tunjangan khusus guru, DAK dana pelayanan Administrasi kependudukan, DAK Non fisik bidang pariwisata, DAK Non fisik bantuan operasional Pendidikan kesetaraan. Rincian anggaran dan realisasi DAK Non Fisik Kabupaten Maros tahun anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel. 2.11
Anggaran dan Realisasi DAK Non Fisik
Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	130.447.277.000	122.000.220.628	93,52
1	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	130.447.277.000	122.000.220.628	93,52

Sumber : BPKPD, 2021

f.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penerimaan Pemerintah Kabupaten Maros yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas: Pendapatan Hibah; Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya; Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus; dan Bantuan Keuangan.

Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. **47.992.707.506** dengan



realisasi sebesar Rp **9.126.629.758** atau sebesar **19,2** %. Adapun rincian anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.12
Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	47.992.707.506	9.126.629.758	19,2
1	Pendapatan Hibah	0	1.443.000.000	0
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	0	0	0
2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	131.779.311.000	44,575,588,000.00	33.83
	Dana Insentif Daerah	0	0	0
	Dana Desa	88.510.353.000	0	0
3	Bantuan Keuangan	17.300.000.000	9.525.418.000	55,06

Sumber: BPKPD, 2021

Penerimaan dari bagi hasil pajak dari propinsi terdiri dari bagi hasil pajak kendaraan bermotor, bagi hasil dari bea balik nama kendaraan bermotor, bagi hasil dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor, bagi hasil dari pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan tanah, bagi hasil dari pajak rokok, Rincian penerimaan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.13 dibawah ini.

Tabel. 2.13
Anggaran dan Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi
Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	56.804.453.000	57.827.493.738	101,80



No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
1	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	10.975.000.000	12.219.369.235	111,34
2	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	12.148.000.000	9,396.129.196	77,35
3	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	17.871.953.000	17.297.094.680	96,78
4	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Tanah	95.000.000	131.029.517	137,93
5	Bagi Hasil Pajak Rokok	15.714.500.000	18.783.871.110	119,53

Sumber: BPKPD, 2021

f.1.4 Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja daerah adalah kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih daerah dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 dijelaskan bahwa belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi akuitas dana merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Pengelolaan belanja daerah dirumuskan sebagai langkah-langkah dalam upaya untuk mengefisienkan dan mengefektifkan penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan. Pengelolaan belanja mempunyai tiga tujuan pokok yang ingin dicapai yaitu menjamin dijalankannya disiplin fiskal melalui pengendalian belanja, menyesuaikan alokasi anggaran dengan arah kebijakan anggaran dan prioritas anggaran, serta menjamin efisiensi dan efektifitas alokasi anggaran. Pengelolaan belanja



daerah akan menyesuaikan arah kebijakan anggaran terutama yang berhubungan dengan kebijakan ekonomi yang ditempuh pemerintah daerah seperti *pro poor*, *pro job* dan *pro growth*. Pengelolaan belanja daerah harus mengacu kepada prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, disiplin anggaran, berkeadilan, efisien dan efektif.

1. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Belanja daerah disusun berdasarkan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros tahun 2019 berpedoman kepada azas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja daerah selain digunakan untuk mendanai urusan wajib dan pilihan, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2019 sesuai kewenangan masing-masing Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi.

Untuk itu arah kebijakan belanja daerah Kabupaten Maros tahun anggaran 2021 adalah:

1. Upaya penghematan, efisiensi dan efektifitas anggaran belanja secara proporsional akan dilakukan melalui memprioritaskan alokasi belanja daerah pada program dan kegiatan yang memiliki dampak kuat terhadap pencapaian prioritas pembangunan daerah dan berdampak luas terhadap kepentingan masyarakat.
2. Belanja daerah dititikberatkan kepada prioritas pembangunan daerah.



3. Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
4. Belanja langsung akan selalu disesuaikan dengan ketersediaan anggaran setiap tahun dan akan diupayakan secara merata pada semua sektor.

2. Target dan Realisasi Belanja

Secara deskriptif belanja daerah dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut: **1) Belanja Tidak Langsung** merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, **2) Belanja Langsung** merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Maros pada tahun anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp. 954.219.238.262,23 dan realisasi sebesar Rp.806.271.843.050,50 atau sebesar 84,50%. Rincian anggaran dan realisasi belanja daerah Kabupaten Maros dapat dilihat pada tabel berikut ini.

3. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung Kabupaten Maros tahun anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp. 954.219.238.262,23 dan terealisasi sebesar 84,50 % atau senilai Rp. 806.271.843.050,50. Rincian anggaran dan realisasi belanja tidak langsung Kabupaten Maros tahun anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.14
Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung
Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	954.219.238.262,23	806.271.843.050,50	84.50
1	Belanja Pegawai	615.745.122.866,00	583.571.733.458,00	94,77



No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
2	Belanja Hibah	14.712.065.472,00	13.753.582.672,00	93,49
3	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota. Pemerintahan Desa dan Partai Politik	156.673.155.700,00	67.831.741.034,00	43,30
4	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000	1.089.964.400	43,60

Sumber: BPKPD, 2021

a. Belanja Pegawai

Pada tahun 2021, belanja pegawai Kabupaten Maros dianggarkan sebesar Rp. 615.745.122.866,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 583.571.733.458,00 atau 94,77 %. Komposisi terbesar pada belanja ini digunakan untuk pembayaran gaji dan tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros. Adapun rincian komposisi belanja pegawai dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.15
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai
Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
	Belanja Pegawai (BTL)	615.745.122.866,00	583.571.733.458,00	94,77
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	415.306.659.191,00	413.904.085.164,00	99,66
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	43.574.911.979,00	43.439.771.750,00	99,69
3	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	871.200.000,00	801.600.000,00	92,01



No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
4	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	967.229.894,00	923.631.216,00	95,49
5	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	303.000.000,00	0	0

Sumber: BPKPD, 2021

b. Belanja Hibah

Pada tahun 2021 belanja hibah Kabupaten Maros dianggarkan sebesar Rp. 14.712.065.472,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 13.753.582.672,00 atau 93,49 %. Komposisi belanja yang terealisasi terdapat pada belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebesar 93,09%, Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat sebesar 80,91 %, dan Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD sebesar 98,49

Tabel 2.16
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah
Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
	Belanja Hibah	14.712.065.472,00	13.753.582.672,00	93,49
1	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	13.862.921.957,00	12.904.439.157,00	93,09
2	Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat	3.993.321.957,00	3.230.839.157,00	80,91
3	Belanja Hibah Kepada Perusahaan Daerah/BUMD	9.869.600.000,00	9.673.600.000,00	98,49

Sumber: BPKPD, 2021

c. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota. Pemerintahan Desa dan Partai Politik



Pada tahun 2021, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota, pemerintahan desa dan partai politik dianggarkan sebesar Rp. 156.673.155.700 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 67.831.741.034 atau sebesar 43,30%. Realisasi belanja tersebut, terdiri dari realisasi belanja bantuan keuangan kepada desa sebesar Rp. 67.831.741.034, atau sebesar 43,30%, dan realisasi belanja bantuan kepada partai politik sebesar 100 % atau sebesar Rp. 849.143.515. Rincian anggaran dan realisasi Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.17
Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai
Politik Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pers en (%)
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota. Pemerintahan Desa dan Partai Politik	156.673.155.700	67.831.741.034	43,30
1	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	156.673.155.700	67.831.741.034	43,30
2	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	849.143.515	849.143.515	100

Sumber: BPKPD, 2021

d. Belanja Tidak Terduga

Pada tahun 2021, belanja tidak terduga Kabupaten Maros dianggarkan sebesar Rp. 2.500.000.000 dan hanya terealisasi sebesar 43,60 % atau sebesar Rp. 1.089.964.400.

4. Belanja Langsung



Belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Belanja langsung Kabupaten Maros tahun anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp. 954.219.23.262,23, dan terealisasi sebesar Rp. 806.271.843.050,50 atau 84,50 % dari total anggaran yang direncanakan. Rincian realisasi anggaran belanja langsung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.18
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung
Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
	BELANJA LANGSUNG	954.219.23.262,23	806.271.843.050,50	84,50
1	Belanja Pegawai	615.745.122.866,00	583.571.733.458,00	94,77
2	Belanja Barang dan Jasa	323.762.049.924,23	208.946.526.920,50	64,54
3	Belanja Modal	374.366.344.432,67	299.189.771.099,24	79,92

Sumber: BPKPD, 2021

a. Belanja Pegawai

Pada tahun 2021, belanja pegawai pada belanja langsung Kabupaten Maros dianggarkan sebesar Rp. 615.745.122.866,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 583.571.733.458,00 atau 94,77 %. Belanja honorarium PNS yang dianggarkan sebesar Rp. 7.023.009.754,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.580.997.750,00 atau 93,71 %. Rincian anggaran dan realisasi belanja pegawai Kabupaten Maros tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.19
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai
Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
	Belanja Pegawai	615.745.122.866,00	583.571.733.458,00	94,77



No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
1	Honorarium PNS	7.023.009.754,00	6.580.997.750,00	93,71
2	Uang lembur	0	0	0
3	Belanja Pegawai BLUD	5.518.510.000	0	0

Sumber: BPKPD, 2021

b. Belanja Barang dan Jasa

Pada tahun 2021 belanja barang dan jasa Kabupaten Maros dianggarkan sebesar Rp. 323.762.049.924,23 dan terealisasi sebesar Rp. 208.946.526.920,50 atau 64,54 %. Komposisi belanja barang dan jasa dengan persentase realisasi tertinggi pada Belanja Premi Asuransi sebesar 94,27 %. Sedangkan realisasi terendah pada Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar 0 %. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa Kabupaten Maros dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.20
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
	Belanja Barang dan Jasa	323.762.049.924,23	208.946.526.920,50	64,54
1	Belanja Bahan Pakai Habis	76.413.875.907,22	63.410.576.465,50	82,98
2	Belanja Bahan/Material	-	-	-
3	Belanja Jasa Kantor	86.694.991.791,00	78.956.846.784,00	91,07
4	Belanja Premi Asuransi	27.138.957.000,00	25.584.677.600,00	94,27
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	-	-	-
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	-	-	-
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.622.764.000,00	1.159.939.999,00	71,48
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	305.458.000,00	221.338.000,00	72,46



No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
9	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	-	-	-
10	Belanja Makanan dan Minuman	-	-	-
11	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	-	-	-
12	Belanja Pakaian Kerja	-	-	-
13	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	-	-	-
14	Belanja Perjalanan Dinas	43.766.470.968,01	27.073.414.697,00	61,86
15	Belanja Pemeliharaan	5.492.257.186,00	4.275.717.328,00	77,85
16	Belanja Jasa Konsultansi	4.700.494.608,00	3.766.475.691,00	80,13
17	Belanja kursus. pelatihan. sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	1.219.571.000,00	818.801.121,00	67,14
18	Belanja barang dan jasa BLUD	52.716.495.923,00	0	0

Sumber: BPKPD, 2021

c. Belanja Modal

Pada tahun 2021 belanja modal Kabupaten Maros dianggarkan sebesar Rp. 374.366.344.432,67 dan dapat terealisasi sebesar Rp. 299.189.771.099,24 atau 79,92 %. Belanja modal pengadaan tanah untuk bangunan gedung terealisasi 100 % dari total belanja yang dianggarkan. Rincian anggaran dan realisasi belanja modal Kabupaten Maros tahun anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 2.21
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Kabupaten Maros
Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Perse n (%)
	BELANJA MODAL	374.366.344.432,67	299.189.771.099,24	79,92

Sumber : BPKPD, 2021

f.1.5 Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat dengan jumlah pendapatan yang terbatas. Pembiayaan daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

1. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah didasari oleh pandangan bahwa setiap kewajiban yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah secara konsisten dapat dilaksanakan sesuai tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban, serta menjadi kredibilitas pemerintah daerah.

Kebijakan umum pembiayaan Pemerintah Kabupaten Maros adalah meningkatkan manajemen pembiayaan daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, dan efektifitas sumber-sumber pembiayaan. Kebijakan



pembiayaan daerah meliputi kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya, Pencairan dana cadangan, Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, Penerimaan pinjaman, dan Penerimaan kembali pemberian pinjaman. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman.

2. Target dan Realisasi Pembiayaan

Jumlah pembiayaan daerah Kabupaten Maros tahun anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp. 40.285.438.877,90 atau mencapai 100 % dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 42.285.438.877,90. Rincian target dan realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Maros tahun anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.22
Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
	PEMBIAYAAN DAERAH	42.285.438.877,90	40.285.438.877,90	100
1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	40.285.438.877,90	40.285.438.877,90	100
	Penggunaan Silpa	40.285.438.877,90	40.285.438.877,90	100
2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.000.000.000	-	-
	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	2.000.000.000	-	-

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2021
KABUPATEN MAROS TAHUN 2021



Untuk penerimaan pembiayaan daerah capaian realisasi sebesar Rp. 40.285.438.877,90 atau 100 % dari target yang ditetapkan. Penerimaan pembiayaan ini bersumber dari penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan tidak ada realisasi.

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

Pembangunan Daerah merupakan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan masyarakat di daerah yang dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan potensi dan kemampuan daerah, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya pembangunan daerah harus mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, kukuh kekuatan moral dan etikanya.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), membuktikan bahwa sistem pemerintahan di Indonesia telah beralih dari sentralisasi menuju kepada desentralisasi, dan berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Untuk itu dibutuhkan perencanaan pembangunan jangka panjang yang komprehensif, adaptif serta sinergis, dan penyusunannya dilakukan dengan menerapkan pendekatan ; (1) Pertumbuhan yang tinggi, (2) Pemerataan, (3) Partisipatif, (4) Pembangunan dari bawah ke atas (*bottom up*), (5) Pembangunan dari atas ke bawah (*top-down*), dan (6) Berwawasan lingkungan/berkelanjutan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros disusun sebagai perwujudan dari amanat kedua Undang-Undang tersebut. Kebijakan pembangunan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Maros ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros 2016-2021 (Lembaran Daerah No. 4 Tahun 2016).

Dalam menyusun RPJMD ini, acuan utama yang digunakan adalah rumusan Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Rencana Program Indikatif Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang telah disampaikan melalui Sidang Paripurna DPRD dan semasa pelaksanaan kampanye pemilihan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati secara langsung. Disamping itu, penyusunan RPJMD Daerah ini juga mengacu pada RPJP Kabupaten Maros, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan/Renstra Provinsi Sulawesi Selatan, dan RPJP Nasional, dan berbagai kebijakan dan prioritas program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat termasuk sasaran pembangunan *Millenium Development Goals* (MDGs).

Tujuan utama penyusunan RPJMD Kabupaten Maros adalah:

1. Menyajikan program dan kegiatan turunan Visi dan Misi pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, yang akan dilaksanakan sebagai program dan kegiatan prioritas utama;
2. Menyajikan gambaran tentang arah kebijakan umum yang wajib diikuti oleh semua pejabat daerah dan DPRD dalam menyusun RKPD, KUA, PPAS, RKA-SKPD serta R-APBD dan DPA pada setiap tahun anggaran.

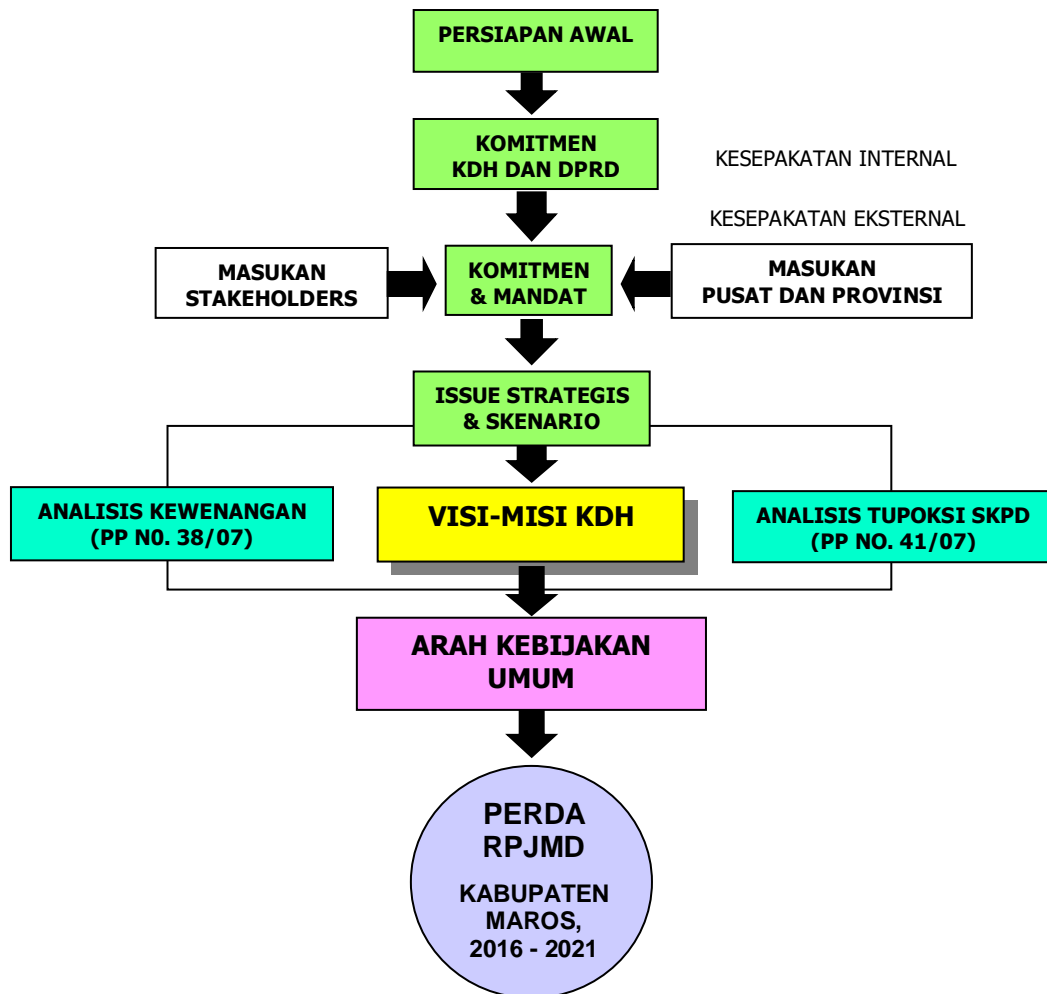
Sedangkan sasaran penyusunan RPJMD Kabupaten Maros 2016-2021 adalah :

1. Kesiapan Kebijakan dan Program Pembangunan dalam skala periode yang lebih jelas dan merupakan indikator perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
2. Ketersediaan rumusan program pembangunan yang merupakan indikasi program yang tertuang dalam APBD.
3. Merupakan persetujuan dan komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten Maros dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maros serta masyarakat terhadap pembangunan daerah



Tahapan proses penyusunan, secara diagramatis dapat dilihat pada gambar I.1.

Gambar I.1
Pola Pikir dan Proses Penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Maros Tahun 2016-2021



Sumber : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2010.

Selain sebagai petunjuk dan penentu arah kebijakan, dokumen RPJMD juga berguna sebagai dasar penilaian kinerja bupati dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya dan menjadi tolok ukur keberhasilan bupati dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang nantinya diserahkan kepada



Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sulawesi Selatan dan laporan keterangan pertanggungjawaban bupati yang nantinya diserahkan kepada DPRD Kabupaten Maros.

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan di Kabupaten Maros digambarkan melalui kajian data dan informasi berdasarkan gambaran umum kondisi pembangunan daerah Kabupaten Maros. Gambaran umum kinerja Kabupaten Maros tidak semua menggambarkan penurunan capaian, namun hal ini dapat diidentifikasi sebagai akar permasalahan Kabupaten Maros dengan dasar bahwa Kabupaten Maros sudah tidak lagi mentolelir kondisi-kondisi minor seperti angka kemiskinan, pemukiman kumuh dan kondisi minor lainnya.

Berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah, serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan pembangunan daerah sampai dengan tahun berjalan permasalahan pokok pembangunan di Kabupaten Maros secara umum dapat terpilah pada kualitas sumberdaya manusia yang masih perlu ditingkatkan, Inovasi dan daya saing nilai tambah produksi pada sektor perekonomian masih perlu di tingkatkan.

b. Visi dan Misi

Pembangunan Daerah merupakan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan masyarakat di daerah yang dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan potensi dan kemampuan daerah, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya pembangunan daerah harus mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, kukuh kekuatan moral dan etikanya.

Namun proses pembangunan yang dilakukan selama ini, tidak hanya menghasilkan kemajuan dan keberhasilan, tetapi juga menyisakan dampak berupa permasalahan dalam berbagai aspek kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Ragam permasalahan tersebut menuntut perhatian untuk



menjamin keberlangsungan pembangunan ke arah yang lebih baik, demokratis dan berkeadilan. Dibutuhkan kemampuan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta kemampuan mengoptimalkan kekuatan dan mengeliminir kelemahan yang dimiliki. Perubahan lingkungan eksternal, baik lingkungan global, regional, nasional maupun lokal pada berbagai bidang tetap harus menjadi referensi dalam perencanaan pembangunan daerah jangka panjang dan menengah.

Dibutuhkan pula sebuah Visi menyangkut kemana daerah dan instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi merupakan rumusan umum dan gambaran mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Berdasarkan permasalahan, peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Maros, dengan memperhatikan RPJP Kabupaten Maros 2005-2025, RPJM Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023, dan RPJM Nasional, serta dinamika lingkungan strategis maka ditetapkan Visi Pembangunan Kabupaten Maros Tahun 2016-2021, yaitu:

"MAROS LEBIH SEJAHTERA 2021"

Yang dimaksud **sejahtera** menurut pengertian Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat yaitu suatu kondisi masyarakat yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar tersebut berupa kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan yang bersih, aman dan nyaman. Juga terpenuhinya hak asasi dan partisipasi serta terwujudnya masyarakat beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kondisi masyarakat Kabupaten Maros pada tahun 2021 yang **lebih baik** dari kondisi sekarang pada seluruh sektor kehidupan masyarakat yang ditandai dengan :

1. Terpenuhinya Hak Dasar Masyarakat Seperti: Kecukupan Pangan, Papan, Dan Sandang Yang Bermutu, Kecukupan Kebutuhan dan Ketersediaan Akan



Layanan Pendidikan, Kesehatan, Lapangan Pekerjaan, Lingkungan Yang Bersih, Aman, Damai, dan Nyaman Serta Akses Untuk Berpartisipasi.

2. Tersedianya Infrastruktur Dasar Pendukung Pelayanan Publik Dan Pembangunan Daerah yang Lebih Berkualitas dan Merata.
3. Terjaminnya Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Kerangka *Good Governance And Clean Government*.

Agar Visi tersebut dapat diwujudkan secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada, maka sangatlah perlu dilakukan sinergi yang dinamis antara Masyarakat, Pemerintah, dan Swasta/Dunia Usaha serta seluruh stakeholders secara terpadu.

Guna Menyatukan langkah, gerak, dan tindakan yang nyata bagi seluruh stakeholders pembangunan Daerah dan seluruh komponen Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Maros baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mewujudkan Visi tersebut, maka dirumuskanlah Misi dengan tetap memperhitungkan kondisi, permasalahan, serta tantangan. Adapun Misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH;
2. MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK;
3. MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT;
4. MENINGKATKAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KAWASAN;
5. MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM;
6. MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI INFORMATIKA

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen RPJMD 2016-2021

Strategi dan arah kebijakan daerah dimaksudkan sebagai landasan operasional pembangunan Kabupaten Maros agar dapat mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, strategi dan arah kebijakan mencakup seluruh aspek dan bidang pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Maros dalam kurun waktu 2016 - 2021.



Dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, pemerintah Kabupaten Maros memiliki strategi untuk mencapai sasaran dari **misi pertama**, yaitu :

1. Pengembangan Sektor Unggulan Dan Potensi Ekonomi Lokal.
2. Peningkatan Dan Pemerataan Peluang Dalam Pengembangan Ekonomi Daerah Di Seluruh Wilayah.
3. Peningkatan Pendapatan Masyarakat Dan Mengurangi Kesenjangan Pendapatan Antar Kelompok Masyarakat.
4. Peningkatan koordinasi Dengan Berbagai Pihak Termasuk Elemen Masyarakat Dan Jenjang Pemerintahan.
5. Pemantauan Secara Berkala Terhadap Perkembangan Harga Dan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat.
6. Pelaksanaan Operasi Pasar.
7. Penyesuaian Terhadap Jadwal Tanam Komoditas Penyumbang Inflasi.
8. Pengukuran Kemiskinan Yang Meliputi Kriteria, Standarisasi, Dan Sistem Pengelolaan Data Terpadu.
9. Pengembangan Sistem Rujukan Terpadu.
10. Perluasan Akses Permodalan Dan Penguatan Layanan Keuangan Mikro Bagi Masyarakat Kurang Mampu.
11. Peningkatan Kapasitas Dan Keterampilan Masyarakat Kurang Mampu Melalui Peningkatan Kualitas Pendampingan.
12. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Dan Sarana Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat Kurang Mampu.
13. Peningkatan Produktifitas Usaha Tani.
14. Peningkatan Akses Kepada Teknologi (Melalui Bimbingan Dan Penyuluhan).
15. Peningkatan Pemberian Dukungan Kepada Petani Berupa Subsidi Dan Insentif.
16. Peningkatan Upaya Fasilitasi Perbaikan Sistem Bagi Hasil Usaha Penangkapan Ikan.
17. Peningkatan Fasilitasi Penyediaan SPDN Pada Sentra - Sentra Produksi



- Perikanan.
18. Pengembangan Energi Hybrid Untuk Penggerak Motor Kapal Penangkap Ikan.
 19. Peningkatan Upaya Fasilitasi Permodalan Bagi Nelayan Dan Pembudidaya Perikanan.
 20. Peningkatan Dan Pengembangan Jaringan Serta Informasi Pasar.
 21. Peningkatan Pemberian Bantuan Input Produksi Perikanan.
 22. Peningkatan Akses Pasar Bagi Petani Dan Nelayan.
 23. Peningkatan Akses Terhadap Layanan Usaha Tani Dan Infrastruktur Sarana Produksi.
 24. Peningkatan Tumbuhnya Industri Berbasis Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Dan peternakan Dengan Pelibatan SDM Lokal.
 25. Peningkatan Upaya Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Alam, Sumber Daya Manusia, dan Teknologi Tepat Guna.
 26. Peningkatan Kerjasama Antara Industri, Pemerintah, Dan Lembaga Pendidikan.
 27. Peningkatan Pelaksanaan Pelatihan Untuk Memasuki Pasar Tenaga Kerja.
 28. Peningkatan Dan Pengembangan Fasilitas Untuk Riset, Teknologi, Peningkatan Keterampilan, Dan Perilaku Pekerja.
 29. Perluasan Peluang Pasar Bagi Produk Kreatifitas.
 30. Peningkatan Upaya Fasilitasi Bagi Proses Kreasi/Kreatifitas.
 31. Peningkatan Upaya Fasilitasi Pada Akses Permodalan dan SDM Usaha Kreatif.
 32. Penumbuhan Usaha Kreatif Pada Kalangan Pemuda.
 33. Pelaksanaan Sosialisasi Dan Bantuan Teknis Untuk Peningkatan Kepatuhan.
 34. Membayar Pajak Dan Retribusi Daerah.
 35. Pengembangan Metode Pemungutan Pajak Dan Retribusi Daerah yang Efektif Serta Efisien.
 36. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Data Dan Administrasi Pajak/Retribusi Daerah.
 37. Pengembangan Dan Penataan Retribusi Daerah.



38. Peningkatan Potensi Penerimaan Daerah Lainnya yang Sah.
39. Peningkatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah.
40. Penciptaan Kondusifitas Iklim Investasi.
41. Pemberian kemudahan administrasi untuk Investasi.
42. Peningkatan Investasi Yang Inklusif Utamanya Investasi Domestik.

Arah kebijakan untuk melaksanakan Strategi sebagai langkah pencapaian Tujuan dan Sasaran pada **misi pertama**, maka Arah Kebijakannya, adalah :

1. Peningkatan Pertumbuhan Sektor – Sektor Pendukung Pertumbuhan PDRB Daerah Secara Merata Di Seluruh Wilayah.
2. Memberdayakan dan Meningkatkan Industri Kecil Dan Kerajinan Masyarakat yang memberikan Nilai Tambah.
3. Perluasan Terhadap Ketersediaan Ruang Bagi lapangan Kerja Sektor Informal.
4. Penciptakan Iklim Investasi Bagi Industri Padat Tenaga Kerja.
5. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah.
6. Menjaga Stabilitas Laju Inflasi Daerah.
7. Penguatan Aspek Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan.
8. Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (Akses, Aset, Dan Keterampilan) Masyarakat Miskin dan Rentan.
9. Meningkatkan Ketersediaan Cakupan Dan jangkauan Sarana Prasarana Pelayanan Dasar (Pendidikan, Kesehatan, Sanitasi, Perumahan, Listrik, dll) Bagi Masyarakat Miskin dan Rentan.
10. Meningkatkan Sebesar - Besarnya Pendapatan Dan Menekan Pengeluaran Rumah Tangga Petani.
11. Meningkatkan Kemampuan Nelayan Dan Pembudidaya Untuk Mencukupi Kebutuhan Hidup (Pengeluaran) Dari penerimaan Usaha Perikanan (Tangkap Dan Budidaya) yang Dijalankan.
12. Memberdayakan Pengangguran Usia Produktif dan Kewirausahaan.
13. Meningkatkan keahlian Dan keterampilan Tenaga Kerja Lokal Dalam Menghadapi Keterbukaan Pasar (MEA).



14. Meningkatkan fasilitasi Pemasaran Terhadap Produk Ekonomi Kreatif.
15. Meningkatkan Produksi Ekonomi Kreatif Yang Bernilai Ekonomi Tinggi.
16. Mendorong Upaya Peningkatan Usaha Ekonomi Kreatif.
17. Mengoptimalkan Realisasi Seluruh Potensi Penerimaan Pendapatan Daerah Untuk membiayai Pembangunan Daerah.
18. Menciptakan Iklim Investasi Dan Iklim Ketenagakerjaan Yang Positif, Transparan, dan Menguntungkan.

Strategi untuk mencapai sasaran pada **misi kedua** sebagai berikut:

1. Penguatan Pengawasan Internal, Sinergi Pemeriksaan Dan pengawasan Intern, Serta Penguatan Sistem Pengaduan Masyarakat.
2. Penguatan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Dan Kinerja.
3. Penyusunan Laporan Keuangan Yang Sesuai Dengan SAP.
4. Pengembangan Dan Penerapan Sistem Integritas.
5. Peningkatan kapasitas pengawasan melalui peningkatan independensi , jumlah, kompetensi, dan integritas auditor.
6. Penyusunan rencana pengawasan intern terpadu dan terfokus pada pengawalan prioritas pembangunan Daerah.
7. Peningkatkan transparansi dalam pengawasan dan pengelolaan tindaklanjut hasil pengawasan.
8. Pembinaan Dan Monev Penyelenggaraan Penerapan SPIP.
9. Pembentukan Kebijakan Daerah Mengenai Sistem Pengawasan Intern Pemerintah.
10. Pelibatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan.
11. Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).
12. Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Yang Berbasis TI.
13. Penyempurnaan SAKIP sebagai pilar manajemen Kinerja.
14. Penerapan Sistem Pengadaan Barang Dan Jasa Yang Transparan, Adil, Dan Profesional.
15. Penguatan Sinergi Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan, Pelaksanaan, Dan Monev Terhadap Kinerja Pembangunan Daerah.



16. Penyusunan LAKIP Yang Berkualitas Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku.
17. Pengelolaan laporan Kekayaan Aparatur.
18. Penyusunan payung hukum Daerah bagi Pelaksanaan agenda reformasi birokrasi.
19. Penguatan Kelembagaan Dan Manajemen Pengelolaan Reformasi Birokrasi.
20. Perluasan dan fasilitasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada instansi/SKPD Daerah.
21. Peningkatan partisipasi publik dalam gerakan Reformasi Birokrasi.
22. Penataan Tugas, Fungsi, Dan Kewenangan Antar Tingkat Pemerintahan.
23. Penguatan Sinergitas Antar Lembaga Dan Antar Pemerintahan.
24. Penerapan Manajemen Pengarsipan Berbasis TIK Pada Setiap SKPD.
25. Peningkatan Fasilitasi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah.
26. Penguatan Kompetensi Pimpinan Dan Anggota DPRD.
27. Pelaksanaan Evaluasi Terhadap Produk Hukum Daerah.
28. Harmonisasi Produk Hukum Daerah Berdasarkan Prinsip HAM Dan Kesetaraan Gender.
29. Penyelesaian Produk Hukum Daerah.
30. Pembentukan Unit Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Setiap SKPD.
31. Peningkatan Kerja Sama Dengan Media Massa.
32. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Pada Setiap Perumusan Kebijakan.
33. Pengembangan Website Resmi Pemda Yang Berinteraksi Langsung Dengan Publik.
34. Publikasi Informasi Pelaksanaan Kegiatan Oleh Masing - Masing SKPD.
35. Penerapan Tata Kelola ASN Yang Transparan, Kompetitif, Dan Berbasis Kinerja.
36. Peningkatan Kualitas Perencanaan Kebutuhan Dan Pendistribusian Aparatur Sesuai Kebutuhan Pencapaian RPJMD.
37. Pengembangan Dan Penerapan Kebijakan Sistem Promosi Dan Mutasi Secara Terbuka Dan Berbasis Kompetensi.



38. Penguatan Dan Penerapan Kebijakan Budaya Kerja, Budaya Pelayanan, Dan Budaya Anti Korupsi.
39. Peningkatan Dan pengembangan Kualitas Diklat Aparatur Yang Berbasis Kompetensi Termasuk Pelaksanaan Training Plan.
40. Pengembangan Tingkat Pendidikan Aparatur Sipil Negara.
41. Percepatan Dan Pemantapan Penerapan E-Government Secara Terintegrasi.
42. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Harapan Dan Kebutuhan Masyarakat.
43. Peningkatan Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Kinerja Pelayanan Publik.
44. Peningkatan Profesionalisme Dan Integritas Aparatur Pelayanan Publik.
45. Penyederhanaan prosedur pelayanan.

Arah kebijakan untuk melaksanakan Strategi sebagai langkah pencapaian Tujuan dan Sasaran pada **misi kedua**, maka Arah Kebijakannya, adalah :

1. Meningkatkan Kinerja Dari Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Yang Mampu Menghasilkan *Outcome* Bagi Masyarakat Secara Bertanggung Jawab Melalui Pemanfaatan Sumberdaya Yang Ada.
2. Meningkatkan Efisiensi, Efektifitas, Dan Percepatan Proses Pelayanan Dan Pengambilan Keputusan Dalam Birokrasi Yang Disertai Dengan Budaya/Perilaku Feodal Dan Ego Sektoral Pada Aparatur/Unit Kerja.
3. Meningkatkan Kapasitas Sistem Perundangan Daerah Yang Lebih Efektif Dan Menyentuh Kebutuhan Masyarakat.
4. Meningkatnya Penerapan Keterbukaan Informasi Publik.
5. Mendorong Terciptanya Budaya Kerja Yang Positif Dan Kondusif Hingga Terciptanya Birokrasi Yang Bersih, Akuntabel, Efektif, Efisien, Dan Mampu Memberikan Pelayanan Yang Berkualitas.
6. Meningkatkan Penerapan Sistem, Proses, Dan Prosedur Kerja Yang Jelas, Efisien, Efektif, Cepat, Terukur, Sederhana, Transparan, Dan Partisipatif.
7. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Yang Lebih Cepat, Murah, Berkekuatan Hukum, Nyaman, Aman, Jelas, Dan Terjangkau Serta Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pelayanan.



Strategi untuk mencapai **misi ketiga** sebagai berikut:

1. Penurunan Tingkat Kesenjangan Pendidikan Antar Wilayah Dan Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun.
2. Peningkatan Akses, Mutu, Dan SDM Pelayanan Kesehatan Masyarakat.
3. Peningkatan Partisipasi Dan Prestasi Masyarakat Dalam Keolahragaan.
4. Peningkatan Upaya Penyediaan Lapangan Kerja Baru Untuk Peningkatan Pendapatan Penduduk.
5. Peningkatan Fasilitasi Bagi Usaha Kecil Terhadap Akses Permodalan.
6. Pengembangan Pendidikan karakter dan Budi Pekerti Masyarakat yang Bersumber Dari nilai-nilai Agama Dan Kearifan lokal.
7. Peningkatan Pemahaman Tentang Nilai-Nilai Kesejarahan dan Wawasan Kebangsaan.
8. Penguatan Terhadap Implementasi Nilai dan Tradisi Guna Memperkaya dan Memperkuat Khasanah Budaya Lokal.
9. Pengembangan Upaya Pemberdayaan Masyarakat Adat dan Komunitas Budaya.
10. Pemantapan Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa.
11. Peningkatan Kepatuhan Dan Penegakan Hukum Secara Konsisten Dan Berintegritas.
12. Peningkatan Kesadaran Dan Pemahaman Masyarakat Terkait Keberagaman.
13. Apresiasi Terhadap Kreatifitas Dan Keragaman Karya Budaya Serta Karya Seni.
14. Peningkatan Kepercayaan Antar Warga Dengan Penyediaan Ruang - Ruang Dialog.
15. Penguatan Fasilitasi Dalam Rangka Peningkatan Peran Dan Fungsi Partai Politik.
16. Penurunan Konflik Sosial Politik.
17. Peningkatan Peran Ormas Dalam Mendorong Proses Demokratisasi Secara Berkelanjutan.
18. Penguatan Koordinasi Dan Sinergitas Lembaga Pemerintah Terkait Pemantapan Dan Pelaksanaan Demokrasi.



19. Peningkatan Upaya Kerjasama Antara Masyarakat politik, Masyarakat sipil, Masyarakat ekonomi, dan media dalam Proses demokratisasi.
20. Peningkatan Pendidikan Politik Bagi Kelompok Perempuan, Politisi Perempuan, Penyandang Disabilitas, dan Kelompok Rentan Lainnya.
21. Pembangunan keterbukaan Informasi Dan Komunikasi Publik.
22. Penataan Proses Penyusunan kebijakan Daerah Yang Lebih Berperspektif gender.
23. Pelaksanaan Review, Koordinasi, dan Harmonisasi Kebijakan Daerah Agar Berperspektif Gender.
24. Peningkatan Kapasitas SDM Guna Pengkoordinasian dan Fasilitasi Penerapan PUG, Termasuk Data Pilah.
25. Pengembangan Mekanisme koordinasi antar Sektor, Antar Wilayah, Masyarakat, dan Dunia Usaha Guna Penerapan PUG.
26. Pengurangan Resiko Dan Dampak Negatif Kerawanan Pangan.
27. Penguatan Kapasitas Lembaga PUG Daerah Termasuk Lembaga Studi Wanita/Gender, dan Organisasi Masyarakat.

Arah kebijakan untuk melaksanakan Strategi sebagai langkah pencapaian Tujuan dan Sasaran pada **misi ketiga**, maka Arah Kebijakannya, adalah :

1. Meningkatkan Keterjangkauan Pendidikan Bagi Masyarakat Tidak Mampu Secara Merata Dan Berkeadilan.
2. Meningkatkan Akses Dan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar Dan Kesehatan Rujukan Masyarakat Secara Merata Dan Menjangkau Seluruh Elemen Masyarakat Termasuk Masyarakat Miskin Dan Rentan.
3. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Berolahraga Dan Prestasi Olahraga Daerah.
4. Meningkatkan Daya Beli Masyarakat.
5. Memantapkan Wawasan Kebangsaan Guna Penguatan Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Pada Wilayah Kabupaten Maros.
6. Meningkatkan Pengetahuan, Pemahaman, Penghayatan, Dan Pengamalan Nilai – Nilai Keagamaan Oleh Masyarakat Dan Aparatur Sebagai Landasan Dan Rujukan Dalam Pelaksanaan Kegiatan/Aktifitas Pembangunan.



7. Memperkuat Apresiasi masyarakat Terhadap Keragaman Dan Kreativitas Karya Seni Dan Budaya Lokal.
8. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Pengarusutamaan Gender.
9. Memperkuat Pemenuhan Jaminan Terhadap Kebebasan Sipil Dan Hak – Hak Politik Serta Keterwakilan Perempuan.
10. Meringankan terpenuhinya kebutuhan pangan Masyarakat.

Strategi untuk mencapai **misi keempat** sebagai berikut :

1. Peningkatan Mutu Pendidikan Masyarakat Perdesaan.
2. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat Perdesaan.
3. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Perekonomian Perdesaan.
4. Penguatan Upaya Ketersediaan Infrastruktur Energi Perdesaan.
5. Peningkatan Infrastruktur Air Minum Dan Sanitasi Masyarakat.
6. Peningkatan Infrastruktur Komunikasi Dan Informasi Masyarakat Perdesaan.
7. Peningkatan Kualitas Sarana Dan Aksesibilitas Transportasi Masyarakat Perdesaan.
8. Peningkatan Kapasitas SDM Dan Kelembagaan Pemerintahan Desa.
9. Melakukan Pembangunan Dan Pengembangan Wilayah/Kawasan Industri Maros.
10. Pengembangan Dan Penataan Kawasan Kuliner.
11. Pengembangan Infrastruktur Pendukung Kegiatan Perekonomian Pada Kawasan Kuliner.
12. Peningkatan Upaya Fasilitasi Permodalan Dan Penguatan Kapasitas SDM Pedagang Di Kawasan Kuliner.
13. Peningkatan Upaya Penciptaan Suasana Kondusif Dan Nyaman pada Kawasan Kuliner.
14. Pengembangan Kawasan Wisata Daerah Melalui Kemitraan Dengan Lembaga Lain/Dunia Usaha/Swasta/Masyarakat.
15. Peningkatan Upaya Pemberdayaan Dan Pembinaan Masyarakat Pada Kawasan Wisata Dan Sekitarnya.



16. Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Prasarana Pendukung Pengembangan Kawasan Wisata Daerah.
17. Peningkatan Kemampuan Dan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Kawasan Wisata Daerah.
18. Penyusunan Kebijakan Daerah Terkait dengan Pengelolaan Kawasan Perkotaan.
19. Penyusunan Kebijakan Daerah yang terkait Standar Pelayanan Perkotaan (SPP).
20. Pengembangan Ketersediaan Basis Data/Informasi dan Peta Kawasan Perkotaan yang Terpadu dan Mudah Diakses.
21. Peningkatan Kualitas Layanan Air Minum Permukiman Perkotaan.
22. Peningkatan Kualitas Layanan Sanitasi Permukiman Perkotaan.
23. Penataan Bangunan Gedung Dan Lingkungan Perkotaan.
24. Penanganan Pemukiman Kumuh Perkotaan.
25. Peningkatan Luasan Ruang Terbuka Hijau Publik.
26. Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kawasan Pesisir.
27. Peningkatan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Pesisir.
28. Peningkatan Kualitas Ekologi Wilayah Pesisir.
29. Harmonisasi Kebijakan Daerah yang Terkait Dengan Bidang Penataan Ruang Termasuk dalam rangka mendukung Kedaulatan Pangan.
30. Peningkatan Upaya Internalisasi Kebijakan Sektoral Daerah Dalam NSPK Bidang Penataan Ruang.
31. Penguatan Pengintegrasian Rencana Tata Ruang Dengan Rencana Pembangunan Daerah.
32. Optimalisasi Kinerja Lembaga Penyelenggara Penataan Ruang (Kapabilitas Kelembagaan, SDM, dan Koordinasi Kelembagaan).
33. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha Pada Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah.
34. Pengembangan Sistem Informasi Penataan Ruang (Termasuk Sistem Informasi Untuk Sosialisasi, Perizinan, Pemantauan dan Evaluasi).



35. Peningkatan efektivitas Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Rangka Pemerataan Pembangunan Antar wilayah terutama Desa.

Arah kebijakan untuk melaksanakan Strategi sebagai langkah pencapaian Tujuan dan Sasaran pada **misi keempat**, maka Arah Kebijakannya, adalah :

1. Memperkuat Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Desa Sesuai Kondisi Geografis Dan Berkesetaraan Gender.
2. Mendorong Penguatan Dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Dan Pemerintahan Desa.
3. Mengembangkan Kawasan Industri Maros Yang Terintegrasi Dengan Kawasan PKN Industri Mamminasata.
4. Mengembangkan Kawasan Perdagangan Di Pusat – Pusat PKLp dan PPK.
5. Mengembangkan Promosi Dan Jaringan Industri Pariwisata Secara Global.
6. Mengembangkan Dan Meningkatkan Akses yang Menghubungkan Objek – Objek Wisata Daerah.
7. Mengembangkan Dan Mendorong Kawasan Perkotaan Menjadi Lebih Produktif, Kompetitif, Dan Kondusif Untuk Hidup Serta Berkehidupan Secara Berkelanjutan Dan Dapat Mempengaruhi Pengembangan Wilayah Sekitarnya Secara Positif.
8. Meningkatkan Taraf Hidup Dan Ketersediaan sarana Prasarana Pelayanan Dasar Masyarakat Di Wilayah Pesisir Dan Pantai.
9. Mengembangkan Sistem Pusat – Pusat Kegiatan Daerah Yang Mendukung Terintegrasinya Sistem – Sistem Pusat Kegiatan Di KSN Perkotaan Mamminasata.

Strategi untuk mencapai **misi kelima** sebagai berikut :

1. Peningkatan Produksi Bahan Pangan Utama.
2. Peningkatan Produksi Bahan Pangan Lainnya.
3. Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan, Tanaman Buah – Buahan, Tanaman Sayuran, Dan Tanaman Biofarmaka.
4. Peningkatan Produksi Sumber Protein.
5. Peningkatan Pelaksanaan Sosialisasi Dan Diseminasi Pengurangan Resiko Bencana Kepada Masyarakat.



6. Peningkatan Dan Penguatan Kesiapsiagaan Dan Penanganan Kedaruratan Bencana.
7. Penguatan Dan Harmonisasi Kebijakan Daerah Terkait Penanggulangan Bencana.
8. Peningkatan Dan Penguatan Upaya Koordinasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Setiap Tingkatan Pemerintahan.
9. Peningkatan Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Hutan.
10. Penyediaan Dan Pengembangan Sistem Peringatan Dini.
11. Penguatan Kapasitas Manajemen Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
12. Peningkatan Ketersediaan Dan Pendistribusian Logistik Penanganan Darurat Bencana.
13. Penyelenggaraan Pelatihan Bagi Aparatur Dan Kelompok Masyarakat Dalam Hal Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana.
14. Pengembangan Dan Penguatan Upaya Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Komunitas.
15. Pengembangan Desa Tangguh Bencana.
16. Peningkatan Kontribusi Masyarakat Dan Swasta Dalam Penurunan Emisi GRK.
17. Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah - Gas Rumah Kaca.
18. Efisiensi Dan Konservasi Energi, Serta Pengelolaan Sampah Domestik.
19. Peningkatan Upaya Perlindungan Mata Air.
20. Pelibatan Masyarakat Secara Aktif Dalam Pemulihan Daerah Aliran sungai.
21. Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan.
22. Peningkatan Dan Penguatan Upaya Pengelolaan Sampah Secara Terpadu.
23. Penyediaan Data Dan Informasi Lingkungan Hidup.
24. Peningkatan Upaya Pengelolaan Dan Pengawasan Limbah serta Bahan B3.
25. Peningkatan Upaya Pemulihan Kawasan Yang Berada Dalam Kondisi Kritis Dan Terlantar Secara Terkoordinasi.



26. Peningkatan Upaya Pembinaan Dan Pengembangan Kapasitas SDM Lingkungan Hidup.
27. Penguatan Nilai Kriteria Program Adipura Secara Komprehensif.
28. Penguatan Pelaksanaan Kepastian Hukum Lingkungan.

Arah kebijakan untuk melaksanakan Strategi sebagai langkah pencapaian Tujuan dan Sasaran pada **misi kelima** , maka Arah Kebijakannya, adalah :

1. Meningkatkan Nilai Tambah Secara Ekonomis Produksi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Dan Kehutanan namun Tetap Menjaga Kelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
2. Mengurangi Resiko bencana Dan Meningkatkan Ketangguhan Pemerintah Dan Masyarakat Dalam menghadapi Bencana.
3. Menguatkan Upaya Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berupa: Pencegahan Timbulnya Pencemaran Dan Pemulihan Akibat kerusakan Lingkungan Hidup.
4. Meningkatkan Pengelolaan Sumber daya Alam Dan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Perekonomian Daerah, Daya Saing Daerah, Serta Mitigasi Bencana Alam Secara Berkelanjutan.

Strategi untuk mencapai **misi keenam** sebagai berikut :

1. Penyediaan fasilitas dan kelengkapan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan transportasi daerah.
2. Pengembangan sistem transportasi daerah yang ramah lingkungan.
3. Pengembangan dan pengendalian jaringan lalu lintas angkutan jalan yang terintegrasi dengan konsep pengembangan wilayah kabupaten.
4. Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan jalan pada wilayah perkotaan/perdesaan guna aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi publik.



5. Peningkatan dan pengembangan layanan jaringan irigasi dalam rangka ketahanan pangan.
6. Peningkatan dan pengembangan pengintegrasian drainase skala makro dan skala mikro pada wilayah perkotaan.
7. Peningkatan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana ibadah.
8. Peningkatan dan pengembangan ketersediaan layanan sanitasi yang layak dan terintegrasi.
9. Peningkatan dan pengembangan ketersediaan layanan air minum yang layak dan terintegrasi.
10. Peningkatan dan penguatan upaya pengelolaan sampah secara terpadu.
11. Peningkatan upaya penyediaan sarana, prasarana, dan utilitas perumahan/permukiman masyarakat.
12. Peningkatan efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka pemerataan pembangunan antar wilayah terutama desa.
13. Pengembangan kawasan kota yang berdaya saing, berbudaya lokal, dan berbasis teknologi melalui pemanfaatan tik.
14. Peningkatan upaya pengendalian pemanfaatan ruang pada wilayah sungai.
15. Penataan lahan yang mencakup sepanjang garis sempadan sungai.
16. Peningkatan keberlanjutan dan ketersediaan air guna pemenuhan kebutuhan masyarakat.
17. Koordinasi antar sektor, antar lembaga, dan antara pemerintah - swasta dalam pengembangan infrastruktur energi baru terbarukan.
18. Perluasan jangkauan siaran lembaga radio daerah melalui pengembangan dan pemanfaatan media dan teknologi terbaru.
19. Peningkatan upaya fasilitasi penyediaan akses tik dan infrastrukturnya sebagai fasilitas publik.

Arah kebijakan untuk melaksanakan Strategi sebagai langkah pencapaian Tujuan dan Sasaran pada **misi keenam**, maka Arah Kebijakannya, adalah :

1. Meningkatkan tingkat keselamatan dan keamanan penyelenggaraan pelayanan transportasi daerah.
2. Menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi.



3. Meningkatkan sistem jaringan dan pelayanan transportasi yang menghubungkan pergerakan barang/jasa dan orang dari wilayah perdesaan ke pusat – pusat kegiatan ekonomi/pelayanan.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem jaringan transportasi, yang menghubungkan seluruh wilayah permukiman dan perdesaan ke pusat kegiatan lokal, pusat pelayanan, dan pusat aktifitas ekonomi.
5. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan air untuk irigasi dan kinerja pengelolaan irigasi.
6. Memperkuat penerapan manajemen pengendali banjir dan perlindungan kerusakan pada wilayah pantai serta mengurangi dampak negatif akibat daya rusak air.
7. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan air baku untuk rumah tangga, industri, perkantoran, rumah sakit, puskesmas, kawasan perekonomian, dan perkotaan.
8. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar air minum dan sanitasi dalam rangka pencapaian *universal acces*.
9. Meningkatkan akses dan jangkauan masyarakat termasuk masyarakat miskin dan rentan terhadap hunian yang layak dan yang di dukung oleh ketersediaan sarana, prasarana, dan utilitas yang berkualitas.
10. Mengembangkan prasarana wilayah secara terpadu dan berhirarki.
11. Meningkatkan layanan jangkauan dan akses masyarakat terhadap informasi publik termasuk konten yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat diterima tepat waktu.

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen RKPD Tahun 2020

Dalam rangka penetapan arah kebijakan pembangunan daerah yang berlandaskan pada prioritas daerah, Pemerintah Kabupaten Maros telah mengidentifikasi beberapa permasalahan yang menjadi tantangan dalam rangka pelaksanaan misi yang telah digariskan.

Berdasarkan permasalahan dan tantangan yang telah diidentifikasi,



Pemerintah Kabupaten Maros menyusun sasaran, prioritas dan pokok-pokok arah kebijakan yang akan dilaksanakan. Adapun prioritas pembangunan Kabupaten Maros Tahun 2016-2021 yang termaktub dalam misi Pemerintah Kabupaten Maros adalah sebagai berikut :

Misi Pertama

” Meningkatkan perekonomian daerah”

Berkaitan dengan misi meningkatkan perekonomian daerah, maka disusun sasaran pokok dengan prioritas dan arah kebijakan pembangunan sebagai berikut :

Sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah.
2. Meningkatnya pendapatan masyarakat secara merata.
3. Terkendalinya inflasi daerah.
4. Menurunnya tingkat kemiskinan.
5. Meningkatnya kesejahteraan petani.
6. Meningkatnya produktifitas daerah.
7. Meningkatnya ekonomi kreatif daerah.
8. Meningkatnya pendapatan daerah.
9. Meningkatnya iklim investasi.

Kebijakan dan strategi untuk mencapai sasaran dari misi pertama adalah ”Meningkatkan perekonomian daerah”. Untuk mencapai sasaran tersebut, disusun program prioritas pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Produktifitas Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Hasil Hutan, Pertambangan & Energi, Pembangunan Pasar Induk Pertanian, Pasar Grosir, Pasar Tradisional.
2. Peningkatan Investasi.
3. Pengendalian Inflasi.
4. Pembinaan UMKM dan Koperasi.
5. Pembinaan Industri Kecil dan Rumah Tangga.



6. Bantuan Pembiayaan dan Permodalan.
7. Pengembangan Destinasi Wisata

Misi Kedua

"Meningkatkan kualitas pelayanan publik"

Sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel.
2. Terwujudnya tata kelola birokrasi yang efisien dan efektif.
3. Meningkatnya kualitas manajemen pelayanan publik.

Kebijakan dan strategi untuk mencapai sasaran pada misi ke dua adalah "Meningkatkan kualitas pelayanan publik". Untuk mencapai sasaran tersebut, disusun program prioritas pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Peningkatan Peran dan Fungsi Layanan Perijinan yang mudah, terjangkau, cepat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Peningkatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa yang lebih Akuntabel, Transparan, dan Terpercaya.
3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan, Pendidikan, Ketentraman, Ketertiban, dan Keamanan Masyarakat.

Misi Ketiga

"Meningkatkan kualitas hidup masyarakat"

Sasaran yang ingin dicapai pada misi ketiga adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pembangunan manusia (individu dan masyarakat).

Kebijakan dan strategi untuk mencapai sasaran pada misi ke tiga adalah "Meningkatkan kualitas hidup masyarakat". Untuk mencapai sasaran tersebut, disusun program prioritas pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas dimensi kesejahteraan hidup masyarakat.
2. Kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut melalui pembinaan keagamaan yang berkualitas.
3. Kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh akses pada sektor Pendidikan, Kesehatan dan Lapangan Pekerjaan.



4. Menumbuhkembangkan inovasi dan kreatifitas masyarakat.
5. Meningkatkan hubungan Sosial Budaya, Politik, Pengarusutamaan Gender, Keluarga Berencana, Kependudukan Seni dan Olahraga.
6. Peningkatan SDM yang lebih terampil, menguasai IPTEK, dan memiliki daya saing dengan daerah lain.
7. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas, serta ketersediaan beasiswa pendidikan bagi siswa berprestasi.
8. Peningkatan gizi dan Derajat Kesehatan Masyarakat.

Misi Keempat

"Meningkatkan pembangunan wilayah dan kawasan"

Sasaran yang ingin dicapai pada misi keempat adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kemandirian desa.
2. Berkembangnya wilayah/kawasan pusat pertumbuhan industri daerah.
3. Meningkatnya penataan dan pengembangan kawasan kuliner.
4. Meningkatnya daya tarik dan daya saing kawasan wisata daerah.
5. Terwujudnya kawasan perkotaan yang aman, nyaman, hijau, dan berdaya saing kota.
6. Terwujudnya pengelolaan kawasan pesisir guna meningkatkan status kesejahteraan masyarakat.
7. Meningkatnya penataan ruang daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah.

Kebijakan dan strategi untuk mencapai sasaran pada misi ke empat adalah "Meningkatkan pembangunan wilayah dan kawasan". Untuk mencapai sasaran tersebut, disusun program prioritas pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Pembangunan Kawasan Industri Maros.
2. Pembangunan kawasan Kuliner.
3. Pembangunan kawasan wisata.
4. Penataan kawasan kumuh perkotaan.
5. Penataan Permukiman.



6. Penataan dan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau/Hutan.
7. Pembangunan Kawasan Wilayah Terpadu.
8. Pembangunan Kawasan Pesisir dan Pantai.
9. Peningkatan pelayanan dasar masyarakat pada seluruh wilayah dan kawasan pembangunan Lingkungan Perdesaan/Kelurahan dan SDM Masyarakat Perdesaan dan Kelurahan.
10. Peningkatan kapasitas dan kesejahteraan perangkat Desa/Kelurahan.
11. Pembangunan Bidang Keagamaan.

Misi Kelima

"Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam"

Sasaran yang ingin dicapai pada misi kelima adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya produksi bahan pangan utama.
2. Meningkatnya produksi bahan pangan lainnya.
3. Meningkatnya produksi tanaman perkebunan dan tanaman hortikultura.
4. Meningkatnya produksi sumber protein.
5. Meningkatnya kesiapsiagaan dan efektifitas penanggulangan bencana secara mandiri dan proaktif.
6. Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Kebijakan dan strategi untuk mencapai sasaran pada misi ke lima adalah "Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam". Untuk mencapai sasaran tersebut, disusun program prioritas pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Optimalisasi Pembangunan Perekonomian yang berkelanjutan.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
3. Memperkuat daya saing daerah.
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Mitigasi bencana alam.



Misi Keenam

"MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI INFORMATIKA"

Sasaran yang ingin dicapai pada misi keenam adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya sistem transportasi yang aman, nyaman, berwawasan lingkungan serta menunjang perekonomian daerah.
2. Tersedianya sarana prasarana umum yang berkualitas.
3. Tersedianya fasilitas internet secara merata

Kebijakan dari strategi untuk mencapai sasaran pada misi ke enam adalah "Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dan Teknologi Informatika". Untuk mencapai sasaran tersebut, disusun program prioritas pembangunan daerah sebagai berikut.

1. Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan.
2. Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air.
3. Pembangunan Infrastruktur Transportasi.
4. Pembangunan Infrastruktur Perumahan & Permukiman.
5. Pembangunan Infrastruktur Pelabuhan dan Dermaga.
6. Pembangunan Infrastruktur Informasi dan Teknologi.
7. Pembangunan Infrastruktur Pemerintahan.
8. Pembangunan Infrastruktur Energi.
9. Pembangunan Infrastruktur Pendukung Kepariwisata.
10. Pembangunan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.
11. Pembangunan Infrastruktur Pendukung lainnya.

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

a. Latar Belakang

Konsep Otonomi Daerah memberikan perwujudan kepada Pemerintah Daerah untuk mengefisienkan pelayanan pemerintahan pada konteks geografis dan demografis dalam luasan yang besar seperti Negara Indonesia. Dengan memberikan sebagian kewenangan yang ada di Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah atau yang disebut desentralisasi, harapannya adalah bahwa pelayanan pemerintah kepada warganya semakin didekatkan dan selanjutnya peningkatan



kualitas dan akses pelayanan dapat ditingkatkan secara terus menerus seiring dengan intensifnya interaksi antara warga dengan pemerintahnya.

Hubungan antara warga selaku konstituen dengan Kepala Daerah yang telah dipilih oleh warganya dalam era demokrasi otonomi dan desentralisasi ini menjadi hubungan yang lebih baik dalam pelayanan maupun kebijakan lainnya. Terkait dengan pelayanan, pada hakekatnya ada pelayanan kepada masyarakat yang tidak boleh di beda-bedakan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Tetapi, dilain sisi fungsi pelayanan pemerintah pusat hanya dapat diselenggarakan di daerah.

Dari dua pertimbangan di atas, selanjutnya diperintahkan kepada seluruh daerah untuk mewujudkan fungsi pelayanan yang menjadi tanggung jawab pemerintah, baik pemerintah pusat dan daerah. Sesuai dengan kapasitas keuangan negara dan prioritas pembangunan yang ada, maka wujud pelayanan yang diwajibkan di atas merupakan pelayanan yang minimal yang dapat diberikan oleh pemerintah melalui pemerintahan di daerah baik pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Sehingga pelayanan yang diberikan bukanlah pelayanan yang diorientasikan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat, tetapi merupakan pelayanan dasar. Sementara bila ada daerah yang lebih mampu memberikan pelayanan yang dapat lebih memuaskan masyarakat, berdasarkan pada kreatifitas dan inovasi dari pemerintah daerah tersebut sehingga dikatakan sebagai pelayanan minimal.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Sesuai dengan amanat Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (3) Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

SPM diterapkan pada Urusan Wajib Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota. Untuk urusan Pemerintahan lainnya, daerah dapat mengembangkan dan menerapkan standar indikator kinerja. Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses



masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang secara normatif dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima dan excellent, maka Pemerintah Kabupaten Maros menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju Good Governance.

b. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
2. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/Permen/M/2008 tentang SPM bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang SPM Bidang Sosial Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/Menkes/Tahun 2008 tentang SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;



5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2010 tentang SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam penyusunannya didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Diterapkan pada urusan wajib. Oleh karena itu SPM merupakan bagian integral dari Pembangunan yang berkesinambungan, menyeluruh, terpadu sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
2. Diberlakukan untuk seluruh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. SPM harus mampu memberikan pelayanan kepada publik tanpa kecuali (tidak hanya masyarakat miskin), dalam bentuk, jenis, tingkat dan mutu pelayanan yang esensial dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
3. Menjamin akses masyarakat mendapat pelayanan dasar tanpa mengorbankan mutu dan mempunyai dampak luas pada masyarakat.
4. Merupakan indikator kinerja bukan standar teknis, dikelola dengan manajerial profesional sehingga tercapai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya.
5. Bersifat dinamis

c. Kebijakan Umum

Strategi pembangunan daerah yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintahan sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan/petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran.



Kebijakan dan program pembangunan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros untuk mencapai sasaran adalah meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik. Sistem yang demikian diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi diberbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

SPM yang telah ditetapkan pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Kabupaten Maros untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten Maros menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan Menteri. Rencana pencapaian SPM dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Daerah. Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Organisasi perangkat Daerah (Renja OPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

d. Arah Kebijakan

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran.

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kumpulan beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh instansi



pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Adapun salah satu kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Maros untuk mendukung pencapaian SPM dalam rangka peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pemerintah daerah yaitu, Program Penyempurnaan Sistem Manajemen Pelayanan Publik dan Program Peningkatan Kapasitas Administrasi Pelayanan Publik.



BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Dalam implementasi pelaksanaan otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah pusat menyerahkan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (desentralisasi).

Kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dan pilihan tersebut selanjutnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan menyusun program dan kegiatan terkait dengan masing-masing urusan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) pelaksana urusan.

Pemerintah Kabupaten Maros pada tahun 2021, telah menyusun program dan kegiatan serta telah mengalokasikan sumber daya berupa dana, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia ke masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pelaksana program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan desentralisasi. Keberhasilan pelaksanaan urusan desentralisasi tersebut dapat dinilai dari tingkat pencapaian program dan kegiatan yang diukur dari tingkat capaian urusan wajib dan urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dari masing-masing urusan.

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian Kinerja Makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian Kinerja Makro dihasilkan dari berbagai program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Maros, Pemerintah Pusat, Pihak Swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian Kinerja Makro Pemerintah Kabupaten Maros untuk Tahun Anggaran 2021 yang terdiri dari : Indeks Pembangunan Manusia, Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan per Kapita dan Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio).



a. Indeks Pembangunan Manusia

Untuk mengukur tingkat perkembangan pembangunan manusia suatu daerah digunakan indikator komposit yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tersusun dari tiga indikator tunggal. Indikator tersebut adalah indeks Kesehatan (Angka Harapan Hidup), indeks pendidikan (Angka Melek Huruf, Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata lama sekolah), dan indeks standar hidup layak (Daya beli).

Berdasarkan tiga komponen tersebut, maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Maros pada tahun 2020 sebesar 69,86 dan tahun 2021 sebesar 70,41 dengan perubahan sebesar 0.55%. Peningkatan IPM menunjukkan efektivitas program utama yang menjadi bagian dari pelaksanaan dalam misi pembangunan daerah Kabupaten Maros, yang diantaranya adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Maros dapat dilihat pada Tabel di bawah.

**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Maros
Tahun 2020 – 2021**

KOMPONEN IPM	TAHUN		Perubahan %
	2020	2021	
Indeks Kesehatan	75.42	75,40	
Angka Harapan Hidup	69.02	69,04	
Indeks Pendidikan	61.99	63,25	
Rata-rata Lama Sekolah	7.73	8,01	
Harapan Lama Sekolah	13.04	13,16	
IPM	69.86	70,41	0,55%

Sumber : BPS dan Bappeda Kab. Maros, 2021

b. Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan besar dalam pelaksanaan pembangunan di daerah dan harus segera dilakukan penanggulangan. Dengan berbagai program/kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan maka persentase penduduk miskin di Kabupaten Maros pada tahun 2020 sebesar 9,74 persen dan tahun 2021 sebesar 9,57 persen dengan perubahan sebesar -0,17%.

Pencapaian Angka Kemiskinan Kabupaten Maros dapat dilihat pada



Tabel di bawah.

**Angka Kemiskinan Kabupaten Maros
Tahun 2020 – 2021**

URAIAN	TAHUN		Perubahan %
	2020	2021	
Angka Kemiskinan %	9.74	9,57	- 0,17

Sumber : BPS dan Bappeda Kab. Maros, 2021

Kinerja penanggulangan kemiskinan ini tidak lepas dari upaya Pemerintah Kabupaten Maros dalam mendorong perekonomian daerah. Program yang digalakkan di Kabupaten Maros untuk mengatasi kemiskinan diantaranya bedah rumah, pengembangan ekonomi produktif, dan penyediaan sarana air bersih.

c. Angka Pengangguran

Masalah pokok ketenagakerjaan yang terjadi adalah produktifitas tenaga kerja yang masih rendah dan pertumbuhan angkatan kerja tidak sebanding dengan pertumbuhan kesempatan kerja sehingga berdampak terjadinya pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menggambarkan perbandingan jumlah penduduk usia kerja yang menganggur dengan banyaknya angkatan kerja.

Angka Pengangguran di Kabupaten Maros pada tahun 2020 sebesar 6.28% dan pada tahun 2021 sebesar 6.30% dengan perubahan sebesar 0,2%.

Pencapaian Pengangguran di Kabupaten Maros dapat dilihat pada Tabel di bawah.

**Angka Pengangguran Kabupaten Maros
Tahun 2020 – 2021**

URAIAN	TAHUN		Perubahan %
	2020	2021	
Angka Pengangguran %	6,28	6,30	0,2%

Sumber : BPS dan Bappeda Kab. Maros, 2021

d. Pertumbuhan Ekonomi

Produk domestik regional bruto (PDRB) adalah besarnya produk domestik bruto (PDB) suatu daerah. Produk domestik regional bruto menyajikan data series PDB baik atas dasar harga berlaku maupun atas



dasar harga konstan 2000, yang disajikan dalam nilai rupiah maupun persentase, berdasarkan data beberapa tahun terakhir baik data yang dihimpun secara langsung (data primer) maupun data yang dikutip dari administrasi Instansi/Dinas/Lembaga Pemerintah maupun swasta (data sekunder). Struktur perekonomian di suatu daerah dicerminkan oleh kontribusi/peranan nilai tambah masing-masing sektor terhadap total PDRB, pergerakan sektor-sektor yang memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap pembentukan PDRB akan sangat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros terus mengalami perkembangan yang cukup signifikan dimana telah melampaui dari target pada RPJMD Kabupaten Maros. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 mengalami perlambatan sebesar -10,87 persen dan pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 1,36 persen dengan perubahan sebesar -9.51%.

Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Maros dapat dilihat pada Tabel di bawah.

**Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Maros
Tahun 2020 – 2021**

URAIAN	TAHUN		Perubahan %
	2020	2021	
Pertumbuhan Ekonomi %	-10.87	1,36	9,51

Sumber : BPS dan Bappeda Kab. Maros, 2021

e. Pendapatan Per Kapita

PDRB perkapita adalah untuk mengetahui peningkatan kemakmuran/kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data yang ada terkait dengan PDRB perkapita Kabupaten Maros terus mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2020 PDRB perkapita sebesar Rp. 18.621,038,- dan terakhir pada tahun 2021 sebesar Rp. 19.005.000,- yang artinya bahwa kondisi kemakmuran masyarakat mengalami tren peningkatan yang positif.

Pencapaian PDRB Per Kapita di Kabupaten Maros dapat dilihat pada Tabel di bawah.

**PDRB Perkapita Tahun 2020-2021
Kabupaten Maros**

Uraian	2020	2021	Perubahan %
Nilai PDRB (Juta Rp.)	18.621,038	19,005,000	
Jumlah Penduduk (jiwa)	356.195	396,924	
PDRB perkapita (Juta Rp/ Jiwa)	52,28	47,88	

Sumber : BPS dan Bappeda Kab. Maros, 2021

f. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Indeks Gini/koefisien Gini adalah untuk mengukur tingkat pemerataan distribusi pendapatan. Berdasarkan data bahwa tingkat pemerataan pendapatan di Kabupaten Maros berada pada ketimpangan rendah berdasarkan koefisien Gini pada 2020 sebesar 0,386 dan tahun 2021 sebesar 0,65 dengan perubahan sebesar 0,94%.

Pencapaian Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) di Kabupaten Maros dapat dilihat pada Tabel di bawah.

**Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) Kabupaten Maros
Tahun 2020 – 2021**

URAIAN	TAHUN		Perubahan %
	2020	2021	
Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) %	0,386	0,365	0,94%

Sumber : BPS dan Bappeda Kab. Maros, 2021

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan implementasi pelaksanaan otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah pusat menyerahkan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (desentralisasi).

Kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dan pilihan tersebut selanjutnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan



menyusun program dan kegiatan terkait dengan masing-masing urusan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) pelaksana urusan.

Pemerintah Kabupaten Maros pada tahun 2021, telah menyusun program dan kegiatan serta telah mengalokasikan sumber daya berupa dana, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia ke masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pelaksana program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan desentralisasi. Keberhasilan pelaksanaan urusan desentralisasi tersebut dapat dinilai dari tingkat pencapaian program dan kegiatan yang diukur dari tingkat capaian urusan wajib dan urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dari masing-masing urusan.



2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	PENDIDIKAN	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	189 PAUD	DINAS PENDIDIKAN	
		Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0 Orang	DINAS PENDIDIKAN	
		Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	0 Orang	DINAS PENDIDIKAN	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	0 Orang	DINAS PENDIDIKAN	
		Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	947 Orang	DINAS PENDIDIKAN	
		Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (DIV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	302 Orang	DINAS PENDIDIKAN	
		Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD nonformal dari lembaga pemerintah	166 Orang	DINAS PENDIDIKAN	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	SD = 236 SMP=70	DINAS PENDIDIKAN	
		Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	40.894 Orang	DINAS PENDIDIKAN	
		Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	15.401 Orang	DINAS PENDIDIKAN	
		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	0 Orang	DINAS PENDIDIKAN	
		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	0 Orang	DINAS PENDIDIKAN	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	2319 Orang	DINAS PENDIDIKAN	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	851 Orang	DINAS PENDIDIKAN	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	2371 Orang	DINAS PENDIDIKAN	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	810 Orang	DINAS PENDIDIKAN	
		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	1716 Orang	DINAS PENDIDIKAN	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	208 Orang	DINAS PENDIDIKAN	
		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	323 Orang	DINAS PENDIDIKAN	
		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	221 Orang	DINAS PENDIDIKAN	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	2.371 Orang	DINAS PENDIDIKAN	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	425 Orang	DINAS PENDIDIKAN	
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	204 Orang	DINAS PENDIDIKAN	
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	212 Orang	DINAS PENDIDIKAN	
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	197 Orang	DINAS PENDIDIKAN	
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah	23 Orang	DINAS PENDIDIKAN	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat		N	
		Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	8	DINAS PENDIDIKAN	
		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0 Orang	DINAS PENDIDIKAN	
		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	0 Orang	DINAS PENDIDIKAN	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	174 Orang	DINAS PENDIDIKAN	
		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	152 Orang	DINAS PENDIDIKAN	
		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	126 Orang	DINAS PENDIDIKAN	
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	204 Orang	DINAS PENDIDIKAN	
		Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	8 Orang	DINAS PENDIDIKAN	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
2	KESEHATAN	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	2 RS	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	2 RS	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	379	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	379	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	379	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	420	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	513	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	490	DINAS KESEHATAN	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	490	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	449	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	490	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	190	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	283	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	472	DINAS KESEHATAN	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
3	PEKERJAAN UMUM	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Terdapat Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten
		Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Terdapat Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten
		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Terdapat Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten
		Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/ kota (m)	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Terdapat Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten
		Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Terdapat Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten
		Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik Pemerintah kabupaten/kota yang diminta adalah : i. Bangunan perkuatan tebing (m) ii. Tanggul sungai (m) iii. Kanal banjir (m) iv. Pintu air/bendung pengendali banjir (Unit) v. Pompa banjir (Unit dan Kapasitas) vi. Polder/Kolam Retensi (Unit) vii. Breakwater (m) viii. Seawall dan Bangunan pengaman pantai lainnya (m)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Terdapat Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten
		Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Terdapat Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten
		Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Terdapat Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten
		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai	-	DINAS PEKERJAAN UMUM	Tidak Terdapat Wilayah



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
		yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)			DAN PENATAAN RUANG	Sungai Kewenangan Kabupaten
		Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/ kota (m)		-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Terdapat Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten
		Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/ kota (m)		-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Terdapat Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten
		Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota		-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Terdapat Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten
		Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota		-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Terdapat Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten
		Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik Pemerintah kabupaten/kota yang diminta adalah :		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Terdapat Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten
			i. Bangunan perkuatan tebing (m)			
			ii. Tanggul sungai (m)			
			iii. Kanal banjir (m)			
			iv. Pintu air/bendung pengendali banjir (Unit)			
			v. Pompa banjir (Unit dan Kapasitas)			
			vi. Polder/Kolam Retensi (Unit)			
			vii. Breakwater (m)			
			viii. Seawall dan Bangunan pengaman pantai lainnya (m)			
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik (m) X100%	82,36%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
			Panjang jaringan irigasi primer (m) 95.193 X100%			
			115.581			
		Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik (m) X100%	77,09%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
			Panjang jaringan irigasi sekunder (m) 43.596 X100%			



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
			56.551			
		Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik (m)}}{\text{Panjang jaringan irigasi tersier (m)}} \times 100\%$	0%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Irigasi Tersier merupakan kewenangan Provinsi
			0	X100%		
			0	X100%		
		Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota	Ada		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota	Ada		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaraan SPAM	Tidak Ada		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	Tidak Ada		PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain	1		PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	74.648		PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	256		PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan	74.908		PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
		memenuhi pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T				
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	16		PEKERJAA N UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	0		PEKERJAA N UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	74.904		PEKERJAA N UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	$\frac{\sum \text{Rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tanki septik}}{\sum \text{Rumah di wilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun} < 25 \text{ jiwa/ha}}$	X100 %	8,1%	DINAS PEKERJAA N UMUM DAN PENATAAN RUANG
			6.898	X100 %		
			85.131			
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	$\frac{\sum \text{Rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT}}{\sum \text{Rumah di wilayah pengembangan SPALDS dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun} > 25 \text{ jiwa/ha}}$	X100 %	0%	DINAS PEKERJAA N UMUM DAN PENATAAN RUANG
			0	X100 %		
			0			
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	$\frac{\sum \text{Rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD}}{\sum \text{Rumah di wilayah pengembangan SPALDT}}$	X100 %	0,30%	DINAS PEKERJAA N UMUM DAN PENATAAN RUANG
			256	X100 %		
			85.131			
		Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	$\frac{\sum \text{Rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat}}{\sum \text{Rumah di wilayah pengembangan SPALDT}}$	X100 %	87,69%	DINAS PEKERJAA N UMUM



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
			$\frac{\sum \text{Jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S}}{85.131} \times 100\%$		DAN PENATAAN RUANG	
		Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	$\frac{\sum \text{Jumlah sarana pengangkutan yang tersedia}}{\sum \text{Jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan kab/kota}} \times 100\%$	100%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	$\frac{\sum \text{Jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia}}{\sum \text{Jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang dibutuhkan kab/kota}} \times 100\%$	0%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	$\frac{\sum \text{Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD}}{\sum \text{Jumlah rumah yang dilayani dengan SPALD-T pada kab/kota}} \times 100\%$	87,74%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	$\frac{\sum \text{Jumlah rumah yang tangki septiknya sudah disedot (m)}}{\sum \text{Jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPADLD-S}} \times 100\%$	0,02%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	$\frac{\sum \text{Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi yang berlaku}}{\sum \text{Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana)}} \times 100\%$	100%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		Jumlah IMB yang diberikan oleh	6.042		PEKERJAAN UMUM	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting		DAN PENATAAN RUANG	
		Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	Ada	PEKERJAA N UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	Ada	PEKERJAA N UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	Tidak Ada	PEKERJAA N UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	Tidak Ada	PEKERJAA N UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	3.675 Bangunan	PEKERJAA N UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	29 Bangunan	PEKERJAA N UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota	1.032,13 Km	PEKERJAA N UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		Panjang jalan yang dibangun	5.333 Km	PEKERJAA N UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		Panjang jembatan yang dibangun	172 Km	PEKERJAA N UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	38.137 Km	PEKERJAA N UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	0 Km	PEKERJAA N UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	0 Km	PEKERJAA N UMUM DAN	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
				PENATAAN RUANG	
		Panjang jalan yang dipelihara	52,624 Km	PEKERJAA N UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		Panjang jembatan yang dipelihara	0 Km	PEKERJAA N UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	Tidak Ada	PEKERJAA N UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	Tidak Ada	PEKERJAA N UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	330	PEKERJAA N UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	1	PEKERJAA N UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	1	PEKERJAA N UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	Tidak Ada	PEKERJAA N UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	Tidak Ada	PEKERJAA N UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang	1	PEKERJAA N UMUM DAN PENATAAN RUANG	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala			
		Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	1	PEKERJAA N UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya	1	PEKERJAA N UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	330	PEKERJAA N UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	330	PEKERJAA N UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	Tidak Ada	PEKERJAA N UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Tidak Ada	PEKERJAA N UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau	Tidak Ada	PEKERJAA N UMUM DAN PENATAAN RUANG	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya			
		Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak Ada	PEKERJAA N UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak Ada	PEKERJAA N UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	Tidak Ada	PEKERJAA N UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	Tidak Ada	PEKERJAA N UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	Tidak Ada	PEKERJAA N UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	Tidak Ada	PEKERJAA N UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Tidak Ada	PEKERJAA N UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak Ada	PEKERJAA N UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		Jumlah kecelakaan konstruksi pada	Tidak Ada	PEKERJAA N UMUM	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya		DAN PENATAAN RUANG	
		Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak Ada	PEKERJAA N UMUM DAN PENATAAN RUANG	



N O	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
4	PERUMAHAN RAKYAT	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	88	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
		Jumlah rumah yang terkena bencana alam	5.824	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	88	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
		Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	5	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	Belum ada relokasi sesuai rencana aksi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
		Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	39	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	5	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
				AN	
		Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	28.590	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Tidak Ada Program Pemerintah yang berdampak Relokasi Untuk Masyarakat di Tahun 2021
		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	5	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	83	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak Ada	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Tidak Ada Program Pemerintah yang berdampak Relokasi Untuk Masyarakat di Tahun 2021
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	5	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	83	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
		Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	28.590	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	105,56 Ha	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
		Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	88 Unit	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
		Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	3,59 Ha	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
		Jumlah rumah di kab/kota	91.432 Rumah	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
		Jumlah unit PK RTLH	88 Unit	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
		Jumlah rumah tidak layak huni	30.404 Rumah	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
		Jumlah rumah yang tidak dihuni	0 Rumah	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
		Rasio rumah dan KK	Jumlah KKi X100%	DINAS	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
			Jumlah total unit rumah	1,26%	PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
			$\frac{115.554}{91.432} \times 100\%$			
		Jumlah rumah pembangunan baru	0 Rumah		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
		Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	76		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
		Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	861		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	28.927		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	Tidak Ada		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
		Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	21		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	Tidak Ada	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
		Jumlah pengembang yang tersertifikasi	Tidak Ada	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
		Jumlah pengembang yang terregistrasi	Tidak Ada	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
		Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	Tidak Ada	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	143		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
		Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	1.598		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
		Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	5		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
		Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	5 PPNS		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
		Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	1		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
		Tersedianya sarana prasarana minimal	151		POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
		Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	$\frac{\text{Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun}}{\text{Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan}} \times 100\%$	100%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	$\frac{1}{1} \times 100\%$	26,79%		
	$\frac{\text{Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana}}{\text{Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana}} \times 100\%$		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
			$\frac{93.331}{348.387}$	X100%		
		Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	$\frac{\text{Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun}}{\text{Jumlah satu dokumen RPB yang lengkap dan sudah disahkan}}$	X100%	100%	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
			$\frac{1}{1}$	X100%		
		Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	$\frac{\text{Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun}}{\text{Jumlah satu dokumen renkon yang lengkap dan sudah disahkan}}$	X100%	0%	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
			$\frac{0}{0}$	X100%		Tidak Ada Pembuatan dokumen Renkon
		Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	$\frac{\text{Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan}}{\text{Jumlah aparatur dengan warga negara di kawasan rawan bencana}}$	X100%	9,71%	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
			$\frac{100}{1.030}$	X100%		
		Persentase warga negara yang ikut pelatihan	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang ikut pelatihan}}{\text{Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana}}$	X100%	0.03%	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
			$\frac{100}{348.387}$	X100%		
		Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang mendapat layanan pusdalops}}{\text{Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana}}$	X100%	100%	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
			$\frac{348.387}{348.387}$	X100%		
		Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang mendapat layanan peralatan perlindungan}}{\text{Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana}}$	X100%	100%	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
			$\frac{348.387}{348.387}$	X100%		
		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam	$\frac{\text{Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap}}{\text{Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap}}$	X100%	0%	BADAN PENANGGU LANGAN
						Tidak Ada



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
		untuk setiap status KLB	$\frac{\text{penetapan KLB}}{\text{Jumlah seluruh penetapan status KLB}}$		BENCANA DAERAH	Penetapan Status Darurat Bencana
			$\frac{0}{0} \times 100\%$			
		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	$\frac{\text{Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana}}{\text{Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana}} \times 100\%$	0%	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	Tidak Ada Penetapan Status Darurat Bencana
			$\frac{0}{0} \times 100\%$			
		Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	$\frac{\text{Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana}}{\text{Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana}} \times 100\%$	100%	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
			$\frac{48}{48} \times 100\%$			
		Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	$\frac{\text{Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi}}{\text{Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana}} \times 100\%$	100%	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
			$\frac{129}{129} \times 100\%$			
		Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	<p>219 Operasi Penyelamatan</p> <p>4 Jenis Pelayanan</p>		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
		Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Ada 6 Sektor		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	68	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
		Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/desa	Tidak Ada	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Petugas Pemadam Kebakaran yang ditempatkan pada Kelurahan/ Desa di Kab. Maros Tahun 2021 belum tersedia ataupun dibentuk
		Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	235	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
		Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	Ada 18 Orang	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
		Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	Ada 195 Orang	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
		Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	Tidak Ada	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
6	SOSIAL	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	3	DINAS SOSIAL	
		Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	297	DINAS SOSIAL	
		Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	4 Tim	DINAS SOSIAL	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	10.850	DINAS SOSIAL	
		Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	1	DINAS SOSIAL	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	29	DINAS SOSIAL	
		Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	1	DINAS SOSIAL	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	29	DINAS SOSIAL	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	63	DINAS SOSIAL	
		Jumlah alat bantu yang tersedia di	0	DINAS SOSIAL	tidak terdapat



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		rumah singgah/ shelter			bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter
		Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	0	DINAS SOSIAL	Tidak paket perbekalan Kesehatan yang tersedia
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	0	DINAS SOSIAL	
		Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	0	DINAS SOSIAL	
		Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	4	DINAS SOSIAL	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	29	DINAS SOSIAL	
		Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	20	DINAS SOSIAL	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang	0	DINAS SOSIAL	Tidak Terlaksana pada Tahun



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan			2021
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	0	DINAS SOSIAL	Tidak Terlaksana pada Tahun 2021
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	61	DINAS SOSIAL	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	61	DINAS SOSIAL	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	38	DINAS SOSIAL	
		Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	346	DINAS SOSIAL	
		Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	346	DINAS SOSIAL	
		Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	1	DINAS SOSIAL	UPT Rumah Penampungan Trauma Center
		Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	0	DINAS SOSIAL	paket permakanan khusus bagi kelompok rentan
		Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	0	DINAS SOSIAL	korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial
		Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	93	DINAS SOSIAL	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
7	TENAGA KERJA	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota	1		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIG RASI	
		Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	Realisasi Indikator - Target Indikator X100%	0%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIG RASI	
			Realisasi			
			100 X100%			
			100			
		Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	Tidak Ada		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIG RASI	
		Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	Jumlah penerapan Program PBK kualifikasi KKNI atau Okupasi pada tahun n X100%	0%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIG RASI	
			Keseluruhan Program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun n			
			21 X100%			
			21			
		Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	Jumlah Instruktur yang bersertifikat pada tahun n X100%	100%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIG RASI	
			Jumlah Instruktur Seluruhnya Pada Tahun n			
			141 X100%			
			141			
		Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	Jumlah Instruktur pada tahun n X100%	6,66%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIG RASI	
			Jumlah peserta pelatihan pada tahun n			
			141 X100%			
			2.117			
		Persentase LPK yang terakreditasi	Jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun n X100%	21,05%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIG RASI	
			Jumlah seluruh LPK pada tahun n			
			4 X100%			
			19			
		Persentase LPK yang memiliki perizinan	Jumlah LPK yang memiliki perizinan pada tahun n X100%	100%	DINAS TENAGA KERJA DAN	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
			Jumlah LPK yang terdata pada tahun n $\frac{19}{19} \times 100\%$		TRANSMIG RASI	
		Jumlah penganggur yang dilatih	30 Orang		-	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIG RASI
		Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat pelatihan pada tahun n $\frac{\text{Jumlah orang yang dilatih pada tahun n}}{\text{Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat pelatihan pada tahun n}} \times 100\%$		100%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIG RASI
			$\frac{30}{30} \times 100\%$			
		Persentase penyerapan lulusan	Jumlah lulusan yang bekerja pada tahun n $\frac{\text{Jumlah lulusan pada tahun n}}{\text{Jumlah lulusan yang bekerja pada tahun n}} \times 100\%$		10,34%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIG RASI
			$\frac{142}{1.373} \times 100\%$			
		Lulusan bersertifikat kompetensi	Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi pada tahun n $\frac{\text{Jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun n}}{\text{Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi pada tahun n}} \times 100\%$		100%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIG RASI
			$\frac{30}{30} \times 100\%$			
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	$\frac{\Sigma \text{ CPMI dilatih}}{\Sigma \text{ CPMI terdaftar}} \times 100\%$		100%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIG RASI
			$\frac{33}{33} \times 100\%$			
		Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	Tidak Ada		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIG RASI	
		Persentase Perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun n $\frac{\text{Jumlah Perusahaan n pada tahun n}}{\text{Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun n}} \times 100\%$		100%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIG RASI
			$\frac{255}{255} \times 100\%$			



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
		Data Tingkat Produktivitas Total	Pertumbuhan ekonomi dikurangi (pertumbuhan modal+pertumbuhan tenaga kerja)	0%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIG RASI	
		Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	Jumlah perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) pada tahun n	$\frac{\text{Jumlah Perusahaan yang memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih}}{255} \times 100\%$	2,35%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIG RASI
			6	$\frac{6}{255} \times 100\%$		
		Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	Jumlah perusahaan yang memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) pada tahun n	$\frac{\text{Jumlah Perusahaan yang memiliki serikat Pekerja/ Serikat Buruh}}{255} \times 100\%$	1,96%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIG RASI
			5	$\frac{5}{255} \times 100\%$		
		Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	1		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIG RASI	
		Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun n	$\frac{\text{Jumlah Perusahaan n pada tahun n}}{255} \times 100\%$	0%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIG RASI
			0	$\frac{0}{255} \times 100\%$		
		Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun n	$\frac{\text{Jumlah Perusahaan n pada tahun n}}{255} \times 100\%$	42,35%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIG RASI
			108	$\frac{108}{255} \times 100\%$		
		Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun	$\frac{\text{Jumlah Perusahaan n pada tahun n}}{255} \times 100\%$	5,49%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIG RASI



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
			$\frac{n}{\text{Jumlah Perusahaan } n \text{ pada tahun } n} \times 100\%$ $\frac{14}{255} \times 100\%$		RASI	
		Jumlah mogok kerja	0		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIG RASI	
		Jumlah penutupan perusahaan	0		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIG RASI	
		Jumlah perselisihan kepentingan	0		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIG RASI	
		Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	0		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIG RASI	
		Jumlah perselisihan PHK	1		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIG RASI	
		Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	172		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIG RASI	
		Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	5 Kali		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIG RASI	
		Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	1 Kali		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIG RASI	
		Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun } n}{\text{Jumlah Perusahaan } n \text{ pada tahun } n} \times 100\%$		1,96%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIG RASI
			$\frac{5}{255} \times 100\%$			
		Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah	941		DINAS TENAGA KERJA DAN	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
		kabupaten/kota			TRANSMIG RASI	
		Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	1.373		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIG RASI	
		Jumlah Bursa Kerja Khusus(BKK) wilayah kab/kota	1		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIG RASI	
		Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	10.945		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIG RASI	
		Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	1		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIG RASI	
		Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antarkerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	19		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIG RASI	
		Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota	5		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIG RASI	
		Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	0		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIG RASI	
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	$\frac{\sum \text{CPMI/CTKI yang mendapatkan sosialisasi}}{\sum \text{CPMI/CTKI}} \times 100\%$	X100%	0%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIG RASI
			$\frac{0}{0} \times 100\%$	X100%		
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	33		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIG RASI	
		Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	$\frac{\sum \text{fasilitasi PMI yang dipulangkan}}{\sum \text{PMI yang pulang}} \times 100\%$	X100%	0%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIG RASI
			$\frac{0}{0} \times 100\%$	X100%		
		Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	$\frac{\sum \text{PMI/TKI yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja}}{\sum \text{PMI/TKI}} \times 100\%$	X100%	0%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIG RASI
			$\frac{0}{0} \times 100\%$	X100%		



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
		Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	$\frac{\sum \text{PMI atau TKI purna dan keluarganya yang diberdayakan}}{\sum \text{PMI/TKI purna dan keluarganya}}$ X100%	0%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIG RASI	
0	X100%	0				
19	X100%	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	$\frac{\sum \text{LTSA yang terbentuk}}{\text{Jumlah daerah kantong PMI/TKI}}$ X100%	0%		
0						



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN	
1	2	3	4		5	6	
8	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	45 OPD		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
		Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	Tidak Ada		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
		Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	0		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
		Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	1		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Forum Anak	
		Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	Jumlah korban kekerasan anak yang dilayani	X100 %	0,025%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
			Jumlah korban kekerasan anak di tingkat kab./kota	X100 %			
			31	121.910			
		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	1		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	1		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
		Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	0		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang	0		DINAS PEMBERDAYAAN				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
		sudah dilatih			PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	0		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	0		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	2		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	0		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	$\frac{\text{Jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan}}{\text{Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan}} \times 100\%$		0,008%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
			$\frac{16}{193.930} \times 100\%$			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
9	PANGAN	Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada/tidak infrastruktur pergudangan	Ada	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ada/tidak regulasi harga minimum daerah	Tidak Ada	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	Tidak ada Regulasi yang harga minimum daerah terkait tersalurkannya Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
		Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Ada/tidak regulasi harga minimum daerah	Tidak Ada	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	Tidak ada Regulasi yang harga minimum daerah terkait tersalurkannya Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
		Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ada/tidak kegiatan pemberdayaan masyarakat	Ada	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada/tidak peta ketahanan dan kerentanan pangan	Tidak Ada	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		Tertanganinya kerawanan pangan	Ada/tidak penanganan daerah rentan rawan pangan	Ada	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ada/tidak penanganan daerah rentan rawan pangan	Tidak Ada	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	Tidak terdapat kegiatan pengawasan keamanan pangan segar
		Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Ada/tidak penanganan daerah rentan rawan pangan	Tidak Ada	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
10	PERTANAHAN	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	$\frac{\text{Jumlah izin lokasi yang diterbitkan} + \text{jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui proses (ditolak seluruhnya)}}{\text{Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregristrasi}} \times 100\%$	0%	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
		$\frac{0}{0} \times 100\%$				
		SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	$\frac{\text{Jumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilih tanah kelebihan maksimum/absentee}}{\text{Jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah obyek landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum absentee dan daftar subyek}} \times 100\%$	0%		
		$\frac{0}{0} \times 100\%$				
		SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	$\frac{\text{Jumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilih tanah kelebihan maksimum/absentee}}{\text{Jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah obyek landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum absentee dan daftar subyek}} \times 100\%$	0%		
		$\frac{0}{0} \times 100\%$				
		Dokumen Izin membuka tanah	$\frac{\text{Jumlah dokumen izin membuka tanah yang diproses penerbitannya}}{\text{Jumlah dokumen izin membuka tanah yang dimohon dalam 1 tahun}} \times 100\%$	0%		
		$\frac{0}{0} \times 100\%$				
		Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik}}{\text{Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik yang direncanakan dalam 1 tahun}} \times 100\%$	0%		
		$\frac{0}{0} \times 100\%$				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
11	LINGKUNGAN HIDUP	Hasil perhitungan kabupaten/kota terhadap : a. Indeks kualitas air (IKA) b. Indeks Kualitas Udara (IKU) c. Indeks tutupan hutan (ITH)	$\text{IKLH Kab/Kota} = (\text{IKA } 30\%) + (\text{IKD } 30\%) + (\text{ITH } 40\%)$ IKA = 56,37 IKU = 84,96 ITH = 53,55	67,33 %	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	1. Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbulan sampah 2. Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah 3. Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing2 lingkungan	63,146	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota}}{\text{Jumlah usulan permohonan yang teregistrasi}} \times 100\%$ $\frac{63}{63} \times 100\%$	100%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah PPLHD yang ada}}{\text{Jumlah kegiatan dan atau usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota}} \times 100\%$ $\frac{0}{0} \times 100\%$	0%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Tidak Ada Data disebabkan belum tersedianya penganggaran Diklat PPLHD
		Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah MHA yang diakui}}{\text{Jumlah usulan MHA}} \times 100\%$ $\frac{0}{0} \times 100\%$	0%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	$\frac{\text{Jumlah MHA yang mendapatkan pelatihan}}{\text{Jumlah MHA yang ada}} \times 100\%$ $\frac{0}{0} \times 100\%$	0%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat/rencana $\frac{\quad}{\quad} \times 100\%$ Target lembaga kemasyarakatan yang akan diberikan diklat $\frac{0}{0} \times 100\%$	0%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten / kota yang ditangani	Pengaduan masyarakat yang ditangani $\frac{3}{4} \times 100\%$ Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregristrasi $\frac{3}{4} \times 100\%$	75%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN		
1	2	3	4		5	6		
12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Penerbitan akta perkawinan	Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan	X100%	32%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
			Peristiwa perkawinan yang dilaporkan					
			63.582	X100%				198.686
		Penerbitan akta perceraian	Jumlah akta perceraian yang diterbitkan	X100%	24,99 %	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
			Peristiwa perceraian yang dilaporkan					
			4.434	X100%				17.742
		Penerbitan akta kematian	Jumlah akta kematian yang diterbitkan	X100%	100%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
			Peristiwa kematian yang dilaporkan					
			578	X100%				578
		Penyajian data kependudukan	Jumlah penyajian data kependudukan skala kabupaten/kota dalam satu tahun	X100%	100%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
			2 tahun					
			2	X100%				2



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	0 Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tidak Ada
		Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	0 Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Semua Desa di tahun berjalan sama dengan tahun sebelumnya
		Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	534	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PKK dan Posyandu
		Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	56 Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	118 Kelompok Binaan PKK di 56 Desa
		Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	0 Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Semua Desa
		Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	0 Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Semua Desa di tahun berjalan sama dengan tahun sebelumnya
		Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	534 Lembaga	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PKK dan Posyandu
		Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	56 Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	118 Kelompok Binaan PKK di 56 Desa



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang diperdakan	Tidak Ada		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Terdapat Dokumen GDPK hanya belum diperdakan
		Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	Median Usia Kawin Pertama Wanita Usia 25-49 tahun didefinisikan sebagai usia dimana 50% dari semua perempuan dalam kelompok umur sudah melakukan perkawinan. Trend usia kawin pertama penting untuk menentukan pola fertilitas di Indonesia.	27 Tahun	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	$ASFR_i = \frac{b_i}{p_i^f \times k}$ ASFR adalah angka kelahiran di kelompok usia 15-19 tahun $b_i = 385$ $p_i^f \times k = 15.450$	24,92 %	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE)}}{\text{Jumlah sasaran masyarakat program KKBPK (advokasi dan KIE)}} \times 100\%$ $\frac{252.362}{346.394} \times 100\%$	72,85 %	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	9 Stakeholders		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	$\frac{\text{Jumlah faskes yang siap melayani KB MKJP}}{\text{Jumlah faskes}} \times 100\%$ $\frac{25}{25} \times 100\%$	100%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	$\frac{\text{Jumlah Peserta KB Aktif}}{\text{Jumlah PUS}} \times 100\%$ $\frac{10.758}{45.049} \times 100\%$	23,88 %	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	Jumlah kelompok kerja KKBPK yang efektif	24 Pokja	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
		Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	$\frac{\text{Jumlah peserta KB pasca persalinan menurut metode kontrasepsi cara modern}}{\text{Jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan}} \times 100\%$	$\frac{1.865}{6.533} \times 100\%$	28,48 %	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	Daftar Desa/Kelurahan yang memiliki persentase kesertaan KB paling rendah dalam satu Kabupaten/Kota. Data/informasi yang diambil adalah 50% dari total seluruh Desa/Kelurahan dengan persentase kesertaan KB paling rendah		1 Orang	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	$\frac{\text{Jumlah peserta KB pada Keluarga Penerima PBI}}{\text{Jumlah Keluarga PBI}} \times 100\%$	$\frac{15.878}{14.892} \times 100\%$	93,79 %	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
15	PERHUBUNGAN	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	$\frac{\text{Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C yang tersedia}}{\text{Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan}} \times 100\%$	100%	DINAS PERHUBUNGAN	
			$\frac{1}{1} \times 100\%$			
			Terlaksananya pelayanan uji berkala	$\frac{\text{Jumlah kendaraan yang diuji per tahun}}{\text{Jumlah kendaraan wajib uji}} \times 100\%$		
		$\frac{0}{3.469} \times 100\%$				
		Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi		$\frac{\text{Jumlah penetapan tarif lintas penyeberangan}}{\text{Jumlah lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	50%	
			$\frac{2}{4} \times 100\%$			
			Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	$\frac{\text{Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Kabupaten/Kota}}{\text{Target kebutuhan perlengkapan jalan Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	63.75%	
		$\frac{211}{331} \times 100\%$				
		Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota		$\frac{\text{Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Kabupaten atau Kota}}{\text{Target kebutuhan perlengkapan Jalan Kabupaten atau Kota}} \times 100\%$	63.75%	
			$\frac{211}{331} \times 100\%$			



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN	
1	2	3	4		5	6	
16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	X100%	100%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		Jumlah Perangkat Daerah					
		45	X100%	45			
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	X100%	100%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		Jumlah Perangkat Daerah					
		45	X100%	45			
		Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Ya, 35			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	Jumlah kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan instansi Penyelenggara Negara domain dan sub domain sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo No.5 Tahun 2015	X100%	100%		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Jumlah kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah					
		12	X100%	12			
		Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	X100%	97,78 %	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		Jumlah perangkat daerah		X100%	44		



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
			45			
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	X100%	100%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			Jumlah perangkat daerah	45		
				45		
		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	X100%	100%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			Jumlah layanan	45		
				45		
		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	X100%	4,44%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			Jumlah layanan	2		
				45		
		Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	X100%	100%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			Jumlah sistem elektronik	45		
				45		
		Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	X100%	100%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			Jumlah layanan publik dan layanan administrasi	45		
				45		
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan	X100%	100%	DINAS KOMUNIKASI DAN



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
		layanan pusat data pemerintah	pusat data pemerintah		INFORMATIKA	
			Jumlah perangkat daerah			
			45	X100%		
			45			
		Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat	X100%	44,44 %	
			Jumlah perangkat daerah			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			20	X100%		
			45			
		Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis datanya	X100%	100%	
			Jumlah perangkat daerah			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			45	X100%		
			45			
		Persentase data yang dapat dibagi pakai	Jumlah data yang dapat dibagi pakai	X100%	100%	
			Jumlah data yang dimiliki pemerintah daerah			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			45	X100%		
			45			
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	X100%	100%	
			Jumlah perangkat daerah			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			45	X100%		
			45			
		Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan dinas kominfo	X100%	38,71 %	
			Jumlah ASN Pengelola TIK			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			12	X100%		
			31			
		Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	1. Dokumen Master Plan Poin dalam master plan paling sedikit memuat:		1	
			<input type="checkbox"/> Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			<input type="checkbox"/> Penganggaran			
			<input type="checkbox"/> Strategi			



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
			<input type="checkbox"/> Peta Jalan <input type="checkbox"/> Arah Kebijakan <input type="checkbox"/> Cetak biru teknis/Peta rencana strategi 2. Perda/Perkada tentang pengelolaan TIK di daerah paling sedikit memuat tentang GCIO (Government Chief of Information Officer): - Penugasan pejabat - Kewenangan - Tugas dan tanggung jawab		
		Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	$\frac{\Sigma \text{ komunitas masyarakat atau mitra strategis Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang telah menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah}}{6} \times 100\%$ $\frac{\Sigma \text{ komunitas masyarakat atau Mitra Komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota}}{6} \times 100\%$	100%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	$\frac{\Sigma \text{ konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)}}{6} \times 100\%$ $\frac{\Sigma \text{ konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kabupaten/Kota}}{6} \times 100\%$	100%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	$\frac{\Sigma \text{ Diseminasi dan layanan Informasi Publik yang dilaksanakan sesuai dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM) dan SOP}}{6} \times 100\%$ $\frac{\Sigma \text{ Diseminasi dan layanan Informasi Publik}}{6} \times 100\%$	100%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
17	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan	X100%	0%	
		Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai izin usaha simpan pinjam				
		0	X100%			
		311				
		Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam tahun yang dilaporkan	X100%	100%	
		Jumlah permohonan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan	X100%			
		1	X100%			
		1				
		Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi	X100%	18,7%	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN
		koperasi yang ada	X100%			
		66	X100%			
		353				
Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya	X100%	19,08 %	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN		
Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada	X100%					
62	X100%					
353						
Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	X100%	14,16 %	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN		
Jumlah koperasi yang ada	X100%					
50	X100%					
353						
Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah	Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian	X100%	28,33 %	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN		
Jumlah koperasi yang ada	X100%					
100	X100%					



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
		keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	353			
		Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$	X100%	0%	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN
			$\frac{0}{353} \times 100\%$	X100%		
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	6,8%			DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN
		Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang telah diterbitkan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$	X100%	62,04%	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN
			$\frac{219}{353} \times 100\%$	X100%		
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$	X100%	6,8%	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN
			$\frac{24}{353} \times 100\%$	X100%		
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$	X100%	0%	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN
			$\frac{0}{353} \times 100\%$	X100%		
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pendampingan kelembagaan dan usaha}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$	X100%	0%	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN
			$\frac{0}{353} \times 100\%$	X100%		
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas kemitraan}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$	X100%	1,98%	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN
			$\frac{7}{353} \times 100\%$	X100%		



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
		dalam daerah kabupaten/kota	353			
		Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	$\frac{\text{Jumlah pertumbuhan wirausaha baru}}{\text{Jumlah wirausaha yang ada}} \times 100\%$	0,47%	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN	
			$\frac{129}{27.188} \times 100\%$			
		Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem data online (ODS)}}{\text{Jumlah usaha mikro yang ada}} \times 100\%$	2,00%	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN	
			$\frac{544}{27.188} \times 100\%$			
		Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang bermitra}}{\text{Jumlah usaha mikro yang ada}} \times 100\%$	8%	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN	
			$\frac{2.713}{33.920} \times 100\%$			
		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi}}{\text{Jumlah usaha mikro yang belum memiliki standar dan sertifikasi produk}} \times 100\%$	177,77 %	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN	
			$\frac{17.400}{9.788} \times 100\%$			
		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran}}{\text{Jumlah usaha mikro yang belum mendapatkan dukungan pemasaran}} \times 100\%$	6,38%	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN	
			$\frac{2.035}{31.885} \times 100\%$			
		Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan}}{\text{Jumlah usaha mikro yang ada}} \times 100\%$	4%	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN	
			$\frac{1.356}{33.920} \times 100\%$			
		Persentase usaha	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro}}{\text{Jumlah usaha mikro}} \times 100\%$		DINAS	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
		mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan	yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha Jumlah usaha mikro yang ada 4.748 X100% 33.920	14%	KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
18	PENANAMAN MODAL	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Jumlah fasilitas/intensif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang bisa diberikan kepada investor	Tidak Ada Fasilitas/Intensif	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU ATAP	Naskah Akademik Perda Telah disusun Tahun 2021 dan Perdanya sudah dibuat 2021 Namun sampai dengan saat ini belum selesai
		Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/intensif penanaman modal	Tersedianya dokumen SOP pelaksanaan Pemberian fasilitas/Intensif penanaman modal	Tidak Ada, 0 SOP	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU ATAP	Belum Tersedia Karena Belum Selesai Perda yang mengatur
		Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/intensif penanaman modal	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan Pemberian fasilitas/Intensif penanaman modal per tahun	Tidak Ada	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU ATAP	Belum Tersedia Laporan Karena Belum Selesai Perda yang mengatur
		Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Jumlah kegiatan seminar bisnis/business forum, one on one meeting	Tidak Ada	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU ATAP	Tidak dilaksanakan karena adanya refofusing Anggaran dan Pandemi Covid 19
		Kegiatan pameran penanaman modal	Jumlah kegiatan pameran penanaman modal	1 kegiatan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU ATAP	7 th Pekan Raya Sulsel 2021
		Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Jumlah kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Tidak Ada Kegiatan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU ATAP	Tidak dilaksanakan Karena adanya refofusing Anggaran dan Pandemi Covid 19
		Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah konsultasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal	15 Konsultasi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU ATAP	
		Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah penerbitan perizinan dan non perizinan	8.906 Izin	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU ATAP	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
		Laporan realisasi penanaman modal	Jumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di tingkat Kabupaten/Kota	4.858.348.570.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU ATAP	
		Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	Jumlah aparatur dan penanam modal yang memahami ketentuan pelaksanaan kegiatan penanaman modal	Tidak Ada	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU ATAP	
		Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan dan pelaksanaan penanaman modal	134 Perusahaan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU ATAP	
		Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten/kota	Jumlah permintaan data dan informasi yang terpenuhi/ Jumlah permintaan data dan informasi yang diterima	24 Permintaan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU ATAP	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	15 orang	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
		Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	Tidak Ada	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Tidak Ada Pelatihan Kewirausahaan yang dilaksanakan tahun 2021 karena adanya wabah Covid 19
		Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	Tidak Ada	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Tidak tersedia Anggaran
		Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	26 orang	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
		Jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan	96 Orang	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Pelatih Pencak Silat
		Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	3 Cabang Olah raga	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1. Futsal 2. Bulu Tangkis 3. Tenis Meja



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
20	STATISTIK	Tersedianya buku profil daerah	Ada, 1		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	Tidak Ada		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	Tidak Ada		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	Tidak Ada		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Tidak Ada		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	$\frac{\text{Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral}}{\text{Jumlah kegiatan statistik sektoral}} \times 100\%$ $\frac{0}{0} \times 100\%$	0%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	$\frac{\text{Jumlah metadata indikator statistik sektoral}}{\text{Jumlah indikator statistik sektoral}} \times 100\%$ $\frac{0}{0} \times 100\%$	0%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
21	PERSANDIAAN	<p>Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan</p>	<p>Jumlah kegiatan strategis teramankan</p>	<p>X100%</p>	0%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
<p>Jumlah kegiatan strategis yang ada</p>						
<p>0</p>	<p>X100%</p>					
<p>11</p>						
		<p>Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah</p>	<p>Jumlah Sistem Elektronik (SE) yang menerapkan SMKI dan diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi persandian</p>	<p>X100%</p>	100%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
<p>Jumlah Sistem Elektronik (SE) yang ada</p>						
<p>35</p>	<p>X100%</p>					
<p>35</p>						
		<p>Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah</p>	<p>Jumlah Sistem Elektronik (SE) atau aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah</p>	<p>X100%</p>	100%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
<p>Jumlah Sistem Elektronik (SE) yang ada</p>						
<p>35</p>	<p>X100%</p>					
<p>35</p>						
		<p>Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan</p>	<p>Jumlah titik teramankan</p>	<p>X100%</p>	100%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
<p>Jumlah titik pada Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS)</p>						
<p>45</p>	<p>X100%</p>					
<p>45</p>						



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
22	KEBUDAYAAN	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	Jumlah objek PK yang (diinventaris + diamankan + dipelihara + diselamatkan + dipublikasikan	189 Obyek PK	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman	Jumlah objek PK (disebarluaskan + dikaji + dikayakan keberagamannya)	189 Obyek PK	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	Jumlah objek dimanfaatkan	180 Obyek PK	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
		Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	Jumlah sdm ditingkatkan kompetensi+ Jumlah sdm disertifikasi + Jumlah lembaga distandarisasi + Jumlah lembaga ditingkatkan kapasitas tata kelola + Jumlah pranata ditingkatkan kapasitas tata kelola	24	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
		Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Jumlah CB ditetapkan – Jumlah CB dihapuskan Jumlah CB ditetapkan = 150 Jumlah CB dihapuskan = 40	180	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
		Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	Jumlah CB (diselamatkan + diamankan + dizonasi + dipelihara + dipugar Jumlah CB diselamatkan = Jumlah CB diamankan = Jumlah CB dizonasi = Jumlah CB dipelihara = Jumlah CB dipugar =	180 Cagar Budaya	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
		Layanan perijinan membawa cagar budaya kabupaten ke luar kabupaten dengan dukungan data	Jumlah CB diberikan izin ke luar Kabupaten/Kota	3 Cagar Budaya	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
		Pengembangan cagar budaya kabupaten (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	Jumlah CB (diteliti + direvitalisasi + diadaptasi)	26 Cagar Budaya	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
			Jumlah CB diteliti = 0 Jumlah CB direvitalisasi = 0 Jumlah CB diadaptasi = 0			
		Pemanfaatan cagar budaya kabupaten (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	Jumlah CB dimanfaatkan	180 Cagar Budaya	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
		Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Jumlah koleksi museum (dikelola + diamankan + dikembangkan + dimanfaatkan)	162 Museum	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
			Jumlah koleksi museum dikelola = 5 Jumlah koleksi museum diamankan = 4 Jumlah koleksi museum dikembangkan = 4 Jumlah koleksi museum dimanfaatkan = 4			
		Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	Jumlah pengunjung museum	1.188 Orang	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
		Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum	Jumlah partisipasi dalam pengelolaan museum	1.350		
		Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	162		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
		Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	Jumlah tim pendaftaran CB yang dibentuk	14 Tim	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
		Pembentukan tim ahli cagar budaya kabupaten	Jumlah pembentukan tim ahli CB	5 Tim Ahli	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
		Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	Jumlah ahli CB yang disertifikasi	5 Orang Ahli	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
		Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	Jumlah SDM CB + jumlah SDM Museum SDM CB = 5 Orang SDM Museum = 4 Orang	14 Orang	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
		Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sdm yang ditingkatkan kompetensinya (CB + Museum) SDM CB = 5 Orang SDM Museum = 4 Orang	5 Orang	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
		Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sarana dan prasarana (CB + Museum) Sarana dan prasarana CB = 5 Sarana dan Prasarana Museum = 4	Tidak Ada	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
		Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Jumlah kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	12 Kegiatan	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN	
1	2	3	4		5	6	
23	PERPUSTAKAAN	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Koleksi perpustakaan yang tersedia di berbagai perpustakaan di wilayahnya (dalam eksemplar) X100%	69,43 %	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
		Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)					
		269.915 X100%	388.738				
		Persentase pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	Jumlah kunjungan perpustakaan yang memanfaatkan perpustakaan secara online maupun onsite X100%	29,81 %	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
		Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)	115.879 X100%	388.738			
		115.879 X100%	388.738				
		Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Ketersediaan tenaga perpustakaan di berbagai perpustakaan di wilayahnya X100%	0,03%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
		Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)	100 X100%	388.738			
		100 X100%	388.738				
		Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Jumlah perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan X100%	9,31%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
Jumlah perpustakaan dari berbagai jenis yang terdapat di wilayahnya	35 X100%	376					
35 X100%	376						
Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	53,79		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	Tidak Ada		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	Tidak Ada		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	2		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
24	KEARSIPAN	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	X100%	18,87 %	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Jumlah seluruh arsip aktif	X100%			
		628	X100%			
		3.328				
		Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	X100%	67,10 %	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Jumlah seluruh arsip in-aktif	X100%			
		2.233	X100%			
		3.328				
		Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan daftar arsip	X100%	14,03 %	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Jumlah seluruh arsip statis	X100%			
		467	X100%			
		3.328				
Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	X100%	0%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
Jumlah seluruh arsip dinamis dan arsip statis pemerintahan kabupaten	X100%					
0	X100%					
0						
Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	NSPK pemusnahan arsip merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 25/2012 tentang Pedoman Pemusnahan Arsip		1	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	NSPK perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 23/2015 tentang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana		Tidak Ada	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di Kabupaten/Kota	NSPK penyelamatan arsip penggabungan/pembubaran perangkat daerah merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 46/2015 tentang Penyelamatan Arsip Penggabungan atau Pembubaran Lembaga Negara dan Perangkat Daerah		Tidak Ada	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK	NSPK autentikasi arsip merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 20/2011 tentang Pedoman Autentikasi Arsip Elektronik		Tidak Ada	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
Pencarian arsip statis yang pengelolaannya	NSPK pencarian arsip statis merujuk pada Peraturan Kepala		Tidak Ada	DINAS PERPUSTAKA		



N O	URUSAN PEMERINTAH AN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANG AN
1	2	3	4		5	6
		menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	ANRI 18/2012 tentang Pedoman Pembuatan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)		AN DAN KEARSIPAN	
		Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/ Kota yang sesuai NSPK	NSPK perizinan penggunaan arsip tertutup merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 28/2011 tentang Pedoman Akses dan Layanan Arsip Statis	Tidak Ada	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN	
1	2	3	4		5	6	
25	PERIKANAN	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	10 Rumah Tangga		DINAS PERIKANAN		
		Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	Jumlah TPI yang operasional	X100%	100%	DINAS PERIKANAN	
			Jumlah seluruh TPI yang ada di wilayah Kabupaten/Kota	X100%			
		1	1				
		Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	Tidak Ada		DINAS PERIKANAN	Semua izin usaha di Kabupaten Maros diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu	
		Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/ penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/ dan penguatan kelembagaan)	240 Orang		-	DINAS PERIKANAN	
Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	600.000 Ekor		DINAS PERIKANAN				



N O	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN	
1	2	3	4		5	6	
26	PARIWISATA	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	4 Entitas		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
		Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	77		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
		Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/ kota	61 Tanda Daftar Usaha		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
		Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	15 Orang		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
		Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri (Bisa sebagai peserta atau penyelenggara)	61 Kali	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
		Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/ kota	Tidak Ada		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
		Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	18		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
		Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	Jumlah tenaga kerja pariwisata tersertifikasi	X100%	20,41 %	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
			Jumlah tenaga kerja pariwisata				
			$\frac{40}{196} \times 100\%$				
		Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	Jumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan	X100%	7,69%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
			Jumlah sasaran pembekalan sektor kepariwisataan				
$\frac{280}{3.640} \times 100\%$							
Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	10 Lokasi		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA				



N O	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN	
1	2	3	4		5	6	
27	PERTANIAN	Jumlah Sarana dan prasarana pertanian yang diberikan	40		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		
		Prasarana pertanian yang digunakan	20		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		
		Penerbitan izin usaha pertanian	Jumlah fasilitasi izin usaha pertanian	6	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		
		Persentase prasarana yang digunakan	Jumlah prasarana yang aktif digunakan	X100%	100%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Jumlah prasarana yang dibangun				
			20	X100%			
			20				
		Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota	Jumlah usulan yang difasilitasi	X100%	100%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			usulan usaha pertanian				
			6	X100%			
			6				
		Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	Jumlah area yang dapat ditanggulangi	X100%	100%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
Luas area terkena bencana							
10	X100%						
	10						



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
28	PERDAGANGAN	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan	$\frac{\text{Jumlah izin pusat perbelanjaan yang diterbitkan} \leq 5 \text{ hari kerja}}{\text{Jumlah permohonan izin pusat perbelanjaan yang dokumennya sudah lengkap dan benar}} \times 100\%$ $\frac{2}{4} \times 100\%$	50%	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN	
		b. Toko swalayan	$\frac{\text{Jumlah izin toko swalayan yang diterbitkan} \leq 5 \text{ hari kerja}}{\text{Jumlah permohonan izin toko swalayan yang dokumennya sudah lengkap dan benar}} \times 100\%$ $\frac{2}{4} \times 100\%$	50%		
		Persentase penerbitan TDG	$\frac{\text{Jumlah penerbitan TDG} \leq 5 \text{ hari kerja}}{\text{Jumlah permohonan penerbitan TDG}} \times 100\%$ $\frac{1}{20} \times 100\%$	5%	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN	
		Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	$\frac{\text{Jumlah penerbitan TDG}}{\text{Jumlah gudang yang ada di Kab/Kota}} \times 100\%$ $\frac{20}{0} \times 100\%$	0%	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN	
		Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk : a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	$\frac{\text{Jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit} \leq 2 \text{ hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar}}{\text{Jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri}} \times 100\%$ $\frac{0}{0} \times 100\%$	0%	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri	$\frac{\text{Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit } \leq 2 \text{ hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar}}{\text{Jumlah STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri}} \times 100\%$	0%	
		c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	$\frac{\text{Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba luar negeri yang terbit } \leq 2 \text{ hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar}}{\text{Jumlah STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri}} \times 100\%$	0%	
		Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	$\frac{\text{Jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota}}{\text{Jumlah permohonan SIUP bahan berbahaya bagi pengecer}} \times 100\%$	0%	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN
		Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah KA yang terbit } \leq 1 \text{ hari kerja (1x24 jam)}}{\text{Jumlah permohonan penerbitan SKA yang dokumennya telah diterima dengan lengkap dan benar}} \times 100\%$	0%	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN
		Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	$K = (a + b) \times 100\%$ <p>K = Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya a = Pembangunan sarana distribusi perdagangan telah dilakukan sesuai target waktunya (nilai 0.5)</p>	0%	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
			b = sarana distribusi perdagangan telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya (nilai 0.5) a = 0 b = 0			
		Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok	2,09 %	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN	
		Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	$x = \frac{a}{b \times c} \times 100\%$ X = Persentase jumlah pupuk yang disalurkan a = Jumlah pupuk yang disalurkan b=Target komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Tingkat Provinsi sebesar (90% dari RDKK) c= RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)		99,5 %	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN
			a = 24.978,11			
			b = 11.891,7			
				c = 13.213		
		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	Jumlah total UTTP yang ditera dan ditera ulang pada tahun berjalan X100 % Jumlah potensial UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kab./kota X100 % $\frac{943}{1.543}$	61%	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN	
		Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	Jumlah sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku X100 % Total sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan X100 % $\frac{0}{0}$	0%	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN	
1	2	3	4		5	6	
29	PERINDUSTRIAN	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah realisasi izin yang diterbitkan}}{\text{Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk}} \times 100\%$	$\frac{0}{0} \times 100\%$	0%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	
		Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	Capaian target tahapan penyelesaian RPIK Tahapan : a) Tersusunnya naskah akademik (30%) b) Tersusunnya Draft Raperda RPIK (20%) c) Draft Raperda RPIK yang disetujui DPRD dan mendapat Rekomendasi dinas yang membidangi perindustrian di Provinsi (25%) d) Persetujuan Draft Raperda RPIK oleh Gubernur Provinsi (15%) e) Penetapan Perda RPIK (10%) Keterangan : penilaian bersifat akumulatif terhadap tahapan penyelesaian RPIK		100%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	
		Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (UI) kecil dan UI menengah yang diterbitkan	$\frac{\text{Jumlah realisasi izin yang diterbitkan}}{\text{Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk}} \times 100\%$	$\frac{23}{23} \times 100\%$	100%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	
		Persentase jumlah izin perluasan industri (IPIU) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	$\frac{\text{Jumlah realisasi izin yang diterbitkan}}{\text{Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk}} \times 100\%$	$\frac{0}{0} \times 100\%$	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	Tidak Ada Izin Perluasan Industri yang diterbitkan 2021
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/ Kota	0			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	
		Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/	$\frac{\text{Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kab./Kota yang masuk dalam SIINas}}{\text{Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kab./Kota yang masuk dalam SIINas}} \times 100\%$		100%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/ Kota	Total populasi perusahaan industri $\frac{2}{23} \times 100\%$		



N O	URUSAN PEMERINTAH AN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANG AN
1	2	3	4	5	6
30	TRANSMIGRA SI	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	1	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	6	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		Jumlah satuan pemukiman yang dibina	150	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	



2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN		
1	2	3	4		5	6		
1	PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD	X100%	72,47 %	DINAS PENDIDIKAN		
			Jumlah anak usia 5-6 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan					
			10.744	X100%				14,826
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar	X100%	106,54 %	DINAS PENDIDIKAN		
			Jumlah anak usia 7-12 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan					
			47.140	X100%				44.248
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama	X100%	108,66 %	DINAS PENDIDIKAN		
			Jumlah anak usia 13-15 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan					
			23.110	X100%				21.269
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan	X100%	81,356 %	DINAS PENDIDIKAN		
			Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada Kabupaten yang bersangkutan					
			192	X100%				236



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
2	KESEHATAN	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	$\frac{\text{Jumlah Daya tampung Rumah Sakit Rujukan}}{\text{Jumlah Penduduk di Kabupaten / Kota}} \times 100\%$ $\frac{283}{391.774 \text{ (BPS)}} \times 100\%$	0.072 %	DINAS KESEHATAN	
		Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	$\frac{\text{Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi}}{\text{Jumlah RS di Kabupaten / Kota}} \times 100\%$ $\frac{2}{2} \times 100\%$	100%	DINAS KESEHATAN	
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	$\frac{\text{Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan}}{\text{Jumlah Ibu Hamil di Kabupaten / Kota}} \times 100\%$ $\frac{6.715}{7.846} \times 100\%$	85.585 %	DINAS KESEHATAN	
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	$\frac{\text{Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Persalinan}}{\text{Jumlah Ibu Bersalin di Kabupaten / Kota}} \times 100\%$ $\frac{6.795}{7,490} \times 100\%$	90,721 %	DINAS KESEHATAN	
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	$\frac{\text{Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah Bayi Baru Lahir di Kabupaten / Kota}} \times 100\%$ $\frac{6,774}{7,490} \times 100\%$	90,44 %	DINAS KESEHATAN	
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah Balita di Kabupaten / Kota}} \times 100\%$ $\frac{20.612}{35.763} \times 100\%$	57,63 %	DINAS KESEHATAN	
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar}} \times 100\%$	88,02 %	DINAS KESEHATAN	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar di Kabupaten / Kota $\frac{38.750}{44.023} \times 100\%$			
		Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar $\frac{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun di Kabupaten / Kota}}{234.023} \times 100\%$		42,36 %	DINAS KESEHATAN
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar $\frac{27.782}{33.270} \times 100\%$		80,51 %	DINAS KESEHATAN
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar $\frac{17.022}{73.718} \times 100\%$		23,09 %	DINAS KESEHATAN
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar $\frac{3.251}{4.843} \times 100\%$		67,13 %	DINAS KESEHATAN
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar $\frac{812}{822} \times 100\%$		98,78 %	DINAS KESEHATAN



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	X100%	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah penderita TBC di Kabupaten / Kota	33,66 %		
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	X100%	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Balita di Kabupaten / Kota	78,46 %		
			1.716	X100%		
			5.098			
			7.178	X100%		
			9.149			



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN	
1	2	3	4		5	6	
3	PEKERJAAN UMUM	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha)	X100%	100%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Terdapat Wilayah Kewenangan Kabupaten
			Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha)	X100%			
			1	1			
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (m)	X100%	100%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Terdapat Wilayah Kewenangan Kabupaten
			Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten/kota (m)	X100%			
			1	1			
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/ kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kab kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha)	X100%	79,28 %	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
			Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten kotaluas daerah irigasi kewenangan kabupaten kota	X100%			
			4,821	6,081			
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota	X100%	67,861 %	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
			Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut	X100%			
			57.771	57.771			



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
			85.131			
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	$\frac{\text{Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD}}{\text{Jumlah rumah di Kabupaten Kota}} \times 100\%$	87,987 %	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
			$\frac{74.904}{85.131} \times 100\%$			
		Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	$\frac{\text{Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya}}{\text{Jumlah IMB yang berlaku}} \times 100\%$	100%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
			$\frac{6.042}{6.042} \times 100\%$			
		Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	$\frac{\text{Panjang jalan kewenangan provinsi yang mantap}}{\text{Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten/kota}} \times 100\%$	86,415 %	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
			$\frac{891,918}{1,032.13} \times 100\%$			
		Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis}}{\text{Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	64.961 %	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
			$\frac{330}{508} \times 100\%$			
		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	$\frac{\text{Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi}}{\text{Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya}} \times 100\%$	0%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
			$\frac{0}{254} \times 100\%$			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
4	PERUMAHAN RAKYAT	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n	X100%	5,682 %	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
			Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n	X100%		
			5	X100%		
			88			
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni	X100%	0%	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
			Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	X100%		
			5	X100%		
			0			
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)	X100%	3,401 %	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
			Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha	X100%		
			3,59	X100%		
			105,56			
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni	X100%	33,253 %	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
			Jumlah total unit rumah kabupaten/kota	X100%		
			30.404	X100%		
			91.432			
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	X100%	31,638 %	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
			Jumlah unit rumah kab/kota	X100%		
			28.927	X100%		
			91.432			



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100\%$	100%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	$\frac{\text{Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi}} \times 100\%$	7,576 %	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	93.331 Orang		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Orang		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 Orang		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	$\frac{\text{Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah + jumlah layanan pemadaman di kab kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas}}{\text{Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan}} \times 100\%$	75,806 %	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

N O	URUSAN PEMERINTAH AN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANG AN
1	2	3	4		5	6
			Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah			
			Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota 47	X100%		
			62			
		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran			
			697		11,24 Menit	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
			62			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
6	SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	X100%	100%	DINAS SOSIAL
			Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	X100%		
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran	X100%	100%	DINAS SOSIAL
			Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten kota	X100%		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
7	TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	$\frac{\text{Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD}}{\text{Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten}} \times 100\%$	100%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
			$\frac{1}{1} \times 100\%$			
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi}}{\text{Jumlah tenaga kerja keseluruhan}} \times 100\%$	0,27%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
			$\frac{30}{10.945} \times 100\%$			
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	$\frac{\text{PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)}}{\text{Jumlah tenaga kerja}} \times 100\%$	173640 931932 %	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
			$\frac{19.005.000.000}{10.945} \times 100\%$			
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	$\frac{\text{Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak}}{\text{Jumlah Perusahaan}} \times 100\%$	55%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
			$\frac{140}{255} \times 100\%$			
		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan}}{\text{Jumlah pencaker yang terdaftar}} \times 100\%$	10,342 %	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
			$\frac{142}{1,373} \times 100\%$			



N O	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
8	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	$\frac{\text{Jumlah ARG pada belanja langsung APBD}}{\text{Jumlah seluruh anggaran belanja langsung di APBD}} \times 100\%$	70,39 %	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN	
			$\frac{1.057927.187.479}{1.502.958.766.112} \times 100\%$			
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi}}{\text{Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun)}} \times 100\%$	0.025 %	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN	
			$\frac{31}{123.890} \times 100\%$			
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	$\frac{\text{Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan}}{\text{Jumlah penduduk perempuan}} \times 100\%$	8,250 %	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN	
			$\frac{16}{193.930} \times 100\%$			

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

N O	URUSAN PEMERINTAH AN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANG AN
1	2	3	4		5	6
9	PANGAN	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah cadangan pangan X100%		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Jumlah kebutuhan pangan 16.590,78 X100%			
			42,194,00			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN	
1	2	3	4		5	6	
10	PERTANAHAN	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukan izin lokasi	X100%	100%	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
			Seluruh luas tanah yang diberikan ijin lokasi				
			24	X100%			
		Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	Luas penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	X100%	0%	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
			Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum				
			0	X100%			
		Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi	X100%	0%	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
			Luas izin lokasi yang diterbitkan				
			0	X100%			
		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah penerima tanah obyek land reform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha	X100%	0%	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
			Jumlah penerima tanah obyek landreform				
			0	X100%			
		Tersedianya tanah untuk masyarakat	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah	X100%	0%	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
			Luas izin membuka tanah yang diterbitkan				
			0	X100%			
		Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani	X100%	100%	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
			Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan				
			1	X100%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
11	LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	IKLH Kab/Kota = (IKA 30%) + (IKD 30%) + (ITH 40%). IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara ITH = Indeks Tutupan Hutan IKA = 56,37 IKU = 84,96 ITH = 53,55		67,33 %	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	$\frac{\text{Total volume sampah yang dapat ditangani}}{\text{Total volume timbunan sampah kabupaten/kota}} \times 100\%$ $\frac{137.418}{217.620} \times 100\%$	63,146 %	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah kab/kota}}{\text{Usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan}} \times 100\%$ $\frac{6}{8} \times 100\%$	75%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Perekaman KTP Elektronik	$\frac{\text{Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP}}{\text{Jumlah penduduk 17 tahun ke atas}} \times 100\%$	101,83 %	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			$\frac{272.226}{267.325} \times 100\%$			
			Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA			
		$\frac{43.689}{121.129} \times 100\%$				
		Kepemilikan akta kelahiran	$\frac{\text{Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir}}{\text{Jumlah anak usia 0-18 tahun}} \times 100\%$	87,129 %		
		$\frac{112.509}{129.129} \times 100\%$				
		Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	$\frac{\text{Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$			
		$\frac{5}{45} \times 100\%$				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun	X100%	33.33 %	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n)			
			$\frac{1}{3}$	X100%		
		Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun	X100%	8,93%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n)						
$\frac{5}{56}$	X100%					



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
14	PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,11 Per Perempuan Usia 15 -49 tahun		DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	$\frac{\text{Jumlah peserta KB aktif modern}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$	69.91 %	DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	
		Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)	$\frac{\text{Jumlah PUS yang ingin ber-KB tidak terlayani}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$	14.43 %	DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	
			$\frac{44,889}{64,208} \times 100\%$			
			$\frac{9.265}{64.208} \times 100\%$			



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
15	PERHUBUNGAN	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan) IK1 = 1.10 Bobot angkutan jalan = 70 IK2 = 0.38 Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan = 30	93	DINAS PERHUBUNGAN	
		V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	0.27		DINAS PERHUBUNGAN	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	$\frac{\text{Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$	100%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	$\frac{\text{Jumlah layanan publik diselenggarakan secara online dan terintegrasi}}{\text{Jumlah layanan publik}} \times 100\%$	100%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	67,563 %	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
17	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset	X100%	18,697 %	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
			Jumlah seluruh koperasi	X100%		
			66	X100%		
		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha	X100%	0,47%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
			Jumlah usaha mikro keseluruhan	X100%		
			129	X100%		
27.188						



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
18	PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	Jumlah investasi tahun n - Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota	$\frac{\quad}{\quad} \times 100\%$ $\frac{-1.725.107.280.000}{6.583.455.850.000} \times 100\%$	- 26,20 %	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU ATAP



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten/kota	X100%	0.11%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
			Jumlah pemuda (16-30 tahun) di kabupaten/kota	X100%		
			414	X100%		
		388.330		0.171 %	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota			X100%
			Jumlah pemuda (16-30 tahun) di kabupaten/kota			X100%
644	X100%					
388.330		2 Medali	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional					



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
20	STATISTIK	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan $\frac{\text{Jumlah OPD}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$ 45 45	100%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan pembangunan daerah $\frac{\text{Jumlah OPD}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$ 45 45	100%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN	
1	2	3	4		5	6	
21	PERSANDIAN	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi	X100%	43,60 %	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
218	X100%	5					



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
22	KEBUDAYAAN	Terlestarikannya Cagar Budaya	$\frac{\text{Jumlah cagar budaya yang dilestarikan}}{\text{Jumlah cagar budaya yang terdata}} \times 100\%$ $\frac{180}{189} \times 100\%$	95,24 %	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
23	PERPUSTAKAAN	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat	53,79	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM) . UPLM 1 = Pemerataan layanan perpustakaan UPLM 2 = Ketercukupan koleksi UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan . UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan UPLM 5 = Perpustakaan ber-SNP UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan UPLM 7 = Anggota perpustakaan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat = $\sum \frac{UPLM}{AM} \times 100$ UPLM 1= 45 UPLM 2= 36.887 UPLM 3= 100 UPLM 4= 16.181 UPLM 5= 35 UPLM 6= 3.248 UPLM 7= 4.053	15,58 %	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
24	KEARSIPAN	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	$T = (a + i + s + j)/4$ <p>T = Tingkat ketersediaan arsip a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip i = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN</p> <p>a = 18,87 i = 67,10 s = 14,03 j = 3.328</p>	33,33 %	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	$T = (m + b + g + a + c + i)/6$ <p>T = Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Kab.yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK a = Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK i = Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK</p> <p>m = 0 b = 0 g = 0 a = 0 c = 0 i = 0</p>	0%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
25	PERIKANAN	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah kabupaten (sumber data: one data KKP)	13.188,64 Ton	40181,64 Ton	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			26.993 Ton			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
26	PARIWISATA	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	$\frac{\text{Jumlah wisatawan tahun n} - \text{jumlah wisatawan tahun n-1}}{\text{Jumlah wisatawan tahun n-1}} \times 100\%$	-	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
		$\frac{-660}{675} \times 100\%$	97,778 %			
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah wisatawan tahun n} - \text{jumlah wisatawan tahun n-1}}{\text{Jumlah wisatawan tahun n-1}} \times 100\%$	-		
		$\frac{-153.885}{219.392} \times 100\%$	70,142 %			
		Tingkat Hunian Akomodasi	$\frac{\text{Jumlah kamar yang terjual}}{\text{Jumlah kamar yang tersedia}} \times 100\%$	8525,279%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
		$\frac{45.866}{538} \times 100\%$				
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	0,38%			
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	2,02%		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
27	PERTANIAN	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	$\frac{\text{Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun}}{\text{Luas panen}} \times 100\%$	6,34%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			$\frac{305.701.120}{48,263} \times 100\%$			
		Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	$\frac{\text{Jumlah kejadian /kasus penyakit hewan tahun berjalan - jumlah kejadian /kasus penyakit hewan tahun sebelumnya}}{\text{jumlah kejadian /kasus penyakit hewan tahun sebelumnya}} \times 100\%$	123,37 %	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			$\frac{1.568}{1.271} \times 100\%$			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
28	PERDAGANGAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah pelaku usaha di wilayah kab/kota}} \times 100\%$	1,173 %	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
			$\frac{319}{27.188} \times 100\%$			
		Persentase kinerja realisasi pupuk	$\frac{\text{Realisasi RDKK}}{\text{}} \times 100\%$	189,04 2%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
			$\frac{24.978.11}{13.213} \times 100\%$			
		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera yang berlaku	$\frac{\text{Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kab/kota}} \times 100\%$	61,115 %	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
			$\frac{943}{1.543} \times 100\%$			



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
29	PERINDUSTRIAN	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah industri kecil dan menengah tahun 2021} - \text{Jumlah industri kecil dan menengah tahun 2020}}{\text{Jumlah IKM 2020}} \times 100\%$	92%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU ATAP	
		$\frac{\text{Jumlah industri kecil dan menengah tahun 2020}}{\text{Jumlah IKM 2021}} \times 100\%$				
		$\frac{11}{12} \times 100\%$				
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Jika terdapat N indikator pembangunan industri dalam RPIK maka nilai masing-masing bobot indikator adalah (100/N)% Untuk masing-masing penilaian indikator adalah persentase capaian indikator dibagi target dikali (100/N)% Nilai akhir adalah akumulasi dari N indikator tersebut	100%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU ATAP	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$	100%		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU ATAP
		$\frac{23}{23} \times 100\%$				
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$	0%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU ATAP	Tidak Terdapat Permohonan Izin Perluasan Industri		
$\frac{0}{0} \times 100\%$						
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$	0%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU ATAP	Tidak Terdapat Kawasan Industri Di Kabupaten Maros		
$\frac{0}{0} \times 100\%$						
Tersedianya informasi industri secara lengkap dan	1) Keterkinian informasi industri : - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%)		DINAS PENANAMAN MODAL DAN	Tidak Tersedia Informasi		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN				
1	2	3	4	5	6				
		terkini	<p>- Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%)</p> <p>- Tidak menyampaikan informasi industri (0%)</p> <p>2) Kelengkapan informasi industri meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none">- Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%)- Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) <p>Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)</p> <table border="1" data-bbox="643 703 1158 792"><tr><td data-bbox="643 703 1070 736">1) Keterkinian informasi industri = 5%</td><td data-bbox="1070 703 1158 736"></td></tr><tr><td data-bbox="643 736 1070 770">2) Kelengkapan informasi industri = 5%</td><td data-bbox="1070 736 1158 770">10%</td></tr></table>	1) Keterkinian informasi industri = 5%		2) Kelengkapan informasi industri = 5%	10%	PELAYANAN TERPADU SATU ATAP	Industri Secara Lengkap dan Terkini
1) Keterkinian informasi industri = 5%									
2) Kelengkapan informasi industri = 5%	10%								



2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

NO	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
1	PERENCANAAN DAN KEUANGAN	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan}}{\text{Jumlah APBD}} \times 100\%$ $\frac{237.290.456.631}{2.369.013.459.742,7} \times 100\%$	10,016%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
		Rasio PAD	$\frac{\text{Jumlah PAD}}{\text{Jumlah PDRB Non Migas}} \times 100\%$ $\frac{303.957.119.011}{1.602.847.711.169,02} \times 100\%$	189,636%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 3	INSPEKTORAT	
		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 3	INSPEKTORAT	
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	$\frac{\text{Jumlah belanja urusan pemerintahan - transfer expenditures}}{\text{Jumlah belanja APBD}} \times 100\%$ $\frac{82.675.288.816}{1.465.676.989.301} \times 100\%$	5,641%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
		Opini Laporan Keuangan	2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021	DISCLAIMER WDP WDP WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
2	PENGADAAN	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama	$\frac{\text{Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun 2021}}{\text{Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun 2021}} \times 100\%$	0%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
			Jumlah kontrak keseluruhan tahun 2021 $\frac{0}{0} \times 100\%$			
		Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	$\frac{\text{Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif}}{\text{Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan tanpa kompetitif}} \times 100\%$ $\frac{266}{293} \times 100\%$	90,78 5%	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA	
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	$\frac{\text{Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan}}{\text{Total belanja langsung}} \times 100\%$ $\frac{301.777.656.075,51}{232.130.849.298} \times 100\%$	93,39 2%	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA	
3	KEPEGAWAIAN	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{\text{Jumlah pegawai menurut pendidikan PT ke atas}}{\text{Seluruh jumlah pegawai dengan pendidikan SMA/ke bawah}} \times 100\%$ $\frac{2.000}{1.133} \times 100\%$	176,5 23%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{\text{Jumlah pegawai PNS/Fungsional (di luar guru dan tenaga kesehatan)}}{\text{Seluruh jumlah pegawai pemerintah (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}} \times 100\%$ $\frac{498}{3.133} \times 100\%$	15,89 5%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{\text{Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi}}{\text{Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}} \times 100\%$ $\frac{159}{498} \times 100\%$	31,92 8%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
4	MANAJEMEN KEUANGAN	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	$\left[\left(\frac{\text{Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi}}{\text{Total belanja APBD}} \right) - 1 \right] \times 100\%$	-19,24%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
			Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi =	1.170.640.767.864,02		
			Total belanja APBD=	1.449.473.299.517		
		Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	$\left[\left(\frac{\text{Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi}}{\text{Total PAD dalam APBD}} \right) - 1 \right] \times 100\%$	-47,2673%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
			Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi =	160.284.771.169,02		
			Total PAD dalam APBD =	303.957.119.011		
		Asset Management	1. Apakah ada daftar aset tetap? (Ya/Tidak)	Ya	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
			2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap? (Ya/Tidak)	Ya		
			3. Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan? (Ya/Tidak)	Ya		
			4. Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)	Ya		
		Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	$\frac{\text{Nilai realisasi SILPA}}{\text{Total belanja anggaran tahun sebelumnya}} \times 100\%$	3,406%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
			$\frac{52.838.953.741,18}{1.551.449.773.598,6} \times 100\%$			
5	TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	$\frac{\text{Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda}}{\text{Realisasi belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda}} \times 100\%$	0%	BPKPD/KOMINFO	
			$\frac{4}{4} \times 100\%$			
		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	$\frac{\text{Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website pemda}}{\text{Total jumlah dokumen yang telah dirinci}} \times 100\%$	50%	BPKPD/KOMINFO	
			$\frac{1}{2} \times 100\%$			



2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas Kinerja merupakan pengukuran tingkat capaian kinerja yang diperoleh berdasarkan perbandingan antara target dengan realisasi yang berhasil dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berjalan. Capaian kinerja Kabupaten Maros tahun 2021 didapatkan dengan membandingkan antara realisasi yang dicapai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Indikator Utama Kabupaten Maros tahun 2021 dalam Perjanjian Kinerja. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik dan sebaliknya jika semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk. Perhitungan Capaian Kinerja diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi/Rencana}) \times 100\%$$

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama tahun 2021 ini merupakan lanjutan dari rangkaian tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Maros tahun 2016 - 2021. Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Maros tahun 2021 diuraikan berdasarkan sasaran tiap-tiap misi.

a. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Maros tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Maros 2021 - 2026. Ini berarti, dokumen RKPD Tahun 2021 merupakan tahun pertama penjabaran pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros 2021 -2026.

Sejumlah sasaran strategis yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Maros dapat dicapai melalui pencapaian target indikator program dan kegiatan berdasarkan tugas, pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Maros sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2021 - 2026 dan RKPD Kabupaten Maros Tahun 2021 melaksanakan 178 (seratus tujuh puluh delapan) program prioritas. Adapun sasaran dan indikator sasaran serta indikasi program dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2021 meliputi :

Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Pemerintah Kabupaten Maros

MISI 1			
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Prioritas Pembangunan 1 : Pemantapan Ekonomi Daerah Yang berbasis Pada Ekonomi Kreatif, Industri Kecil menengah, UKM, Pariwisata dan Pertanian			
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Persentase Pertumbuhan PDRB	7,66 Persen
2	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat.	PDRB Per Kapita	46,48 Rp/Jiwa
3	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Tingkat Kemandirian Kabupaten	17,28
4	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja dan Kesempatan kerja	Produktifitas Total Daerah	72,49
5	Terkendalinya Inflasi Daerah	Laju Inflasi	1,94
6	Meningkatnya Nilai Investasi	Pertumbuhan PMTB	7,00
Prioritas Pembangunan 2 : Pemantapan Upaya Penanggulangan Kemiskinan Melalui Layanan Sosial Dasar Masyarakat Dan Usaha Ekonomi Produktif.			
5	Menurunnya Kesenjangan Tingkat Pendapatan Masyarakat	Rasio Gini	0,370 Persen
6	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan	90,63
MISI 2			
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
Prioritas Pembangunan 3 : Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi, Pelaksanaan Pilkada, Penciptaan Kondusifitas Wilayah dan Pemenuhan Target Standar Pelayanan Minimal			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Yang Bersih, Akuntabel, Efisien, Dan Efektif.	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	60,20 IRB
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,5 IKM
MISI 3			
MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT			
Prioritas Pembangunan 3 : Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi, Pelaksanaan Pilkada, Penciptaan Kondusifitas Wilayah dan Pemenuhan Target Standar Pelayanan Minimal			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Stabilitas Keamanan, Ketertiban, Kerukunan Hidup, dan Perlindungan Masyarakat Termasuk Perempuan dan Anak	Angka Kriminalitas Tertangani	0,183
Prioritas Pembangunan 4 : Pemantapan Kualitas SDM Melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Gizi, Pengarusutamaan Gender dan Pengendalian Penduduk			
1	Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat.	Indeks Pembangunan Manusia	70,14 IPM
2	Meningkatnya Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,5 IPG
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	72,73 IDG
3	Meningkatnya Kualitas Dan Ketersediaan Bahan Pangan Masyarakat.	Indeks Ketahanan Pangan Daerah	85,71 Persen
4	Terkendalinya Pertumbuhan Dan Persebaran Penduduk Sesuai Daya Dukung Lingkungan Daerah.	Laju Pertumbuhan Penduduk	2,04 Persen



MISI 4			
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KAWASAN			
Prioritas 5 Pembangunan Tahun 2021 : Pemantapan Daya Saing Wilayah Melalui Pembangunan Kawasan Perdesaan, Ketaatan Terhadap Tata Ruang Wilayah, pembangunan Wilayah.			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Pemerataan Dan Percepatan Pembangunan Desa	Indeks Pembangunan Desa (IPD)	0,65 IPD
2	Terwujudnya Ruang Kota Yang Layak Huni Pembangunan	Indeks Kota Berkelanjutan (IKB)	0,67 IKB
3	Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Tingkat Kesesuaian Terhadap RTRW	3,58 Persen
MISI 5			
MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM			
Prioritas 6 Pembangunan Tahun 2021 : Pemantapan Daya Dukung Lingkungan Dan SDA Yang Berkelanjutan Melalui pengelolaan Lahan, Sumberdaya Air, Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Produksi Pemanfaatan Lahan Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Dan Peternakan	Indeks Produksi Sub sektor pertanian	102,05 Nilai Indeks
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Hidup.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63,54 IKLH
3	Menurunnya Potensi Kerugian Dan Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana.	Indeks Resiko Bencana (IRD)	141,35 IRB
MISI 6			
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI INFORMATIKA			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Prioritas 6 pembangunan Tahun 2021 : pemantapan Pusat-Pusat Pertumbuhan Baru melalui Konektifitas Infrastruktur Transportasi, Komunikasi dan Informasi, Pemerintahan, Pelayanan Dasar dan Ekonomi			
1	Meningkatnya Ketersediaan Sarana Prasarana Umum Yang Berkualitas	Indeks Daya Saing Infrastruktur	65,05 Nilai Indeks
2	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Informasi Publik.	Indeks Pembangunan TIK (IP-TIK)	3,00 IP-TIK

b. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2020 Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai adalah membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Maros dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing Indikator Kinerja Utama.

➤ **Capaian Kinerja Sasaran**

Adapun pengukuran kinerja dilakukan terhadap target tahunan



yang dilakukan analisis terkait program dan kegiatan yang mendukung atau menghambat keberhasilan serta permasalahan dan solusi atas keberhasilan capaian tersebut sebagai berikut :

- 1) Misi 1 : Meningkatkan perekonomian Daerah
Tujuan : Mewujudkan pembangunan Ekonomi Daerah yang berkualitas

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Pemerintah
Kabupaten Maros Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (IMPACT)				
		TOLOK UKUR	TARGET KINERJA	REALISASI	%	Kategori
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah.	Persentase Pertumbuhan PDRB	-1,81 %	1,36 Persen	175,14	ST
	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat.	PDRB Per Kapita	46,48 Rp/Jiwa	47,88 Rp/Jiwa	103,01	ST
	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah.	Tingkat Kemandirian Kabupaten	17,28 Persen	16,32 Persen	16,32	ST
	Terkendalinya Inflasi Daerah.	Laju Inflasi Daerah	1,94 Persen	0,92 persen	210,87	ST
	Menurunnya Tingkat Kemiskinan.	Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan	90,63 Persen	90,43 Persen	99,78	ST
	Menurunnya Kesenjangan Tingkat Pendapatan Masyarakat	Rasio Gini	0,370 Rasio	0,365 Rasio	99,46	ST
	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja dan Kesempatan kerja	Produktifitas Total Daerah	72,49	77,19	106,48	ST

Sasaran meningkatnya pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan indikator: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan untuk data tingkat pengangguran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.3.6
Penduduk Usia Kerja, Angkatan Kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka.

No	KARAKTERISTIK	TAHUN			
		2018	2019	2020	2021
1	Penduduk Usia kerja	249.456,00	252.588,00	266.630,00	160.661,00
2	Angkatan kerja	143.250,00	159.217,00	166.446	160.661
	a. Bekerja	133.998,00	151.722,00	155.993	150.533
	b. Pengangguran	9.253,00	7.495,00	10.453	10.128

Penduduk Usia Kerja Pada Kabupaten Maros pada tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya pada tahun 2020 penduduk usia kerja 266.630 jiwa sedangkan tahun 2021 penduduk usia kerja 160.661



jiwa, dan jumlah pengangguran menurun dari 10.453 jiwa menjadi 10.128 jiwa.

Tabel 3.7
Jumlah Penduduk Miskin

Uraian	2018	2019	2020	2021
Jumlah Penduduk Miskin	35.970	34.850	34.620	34.110
Tingkat Kemiskinan Maros	10,31	9,89	9,74	9,57
Garis Kemiskinan Maros	376.479	405.944	414.342	424.637
Indeks Kedalaman (P1) Maros	2,19	2,50	1,45	1,61
Indeks Keparahan (P2) Maros	0,71	0,89	0,34	0,41
Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	89,69	90,11	90,26	90,43
Gini Ratio	0,337	0,382	0,386	0,365

Tingkat Kemiskinan Maros sebesar 9,57 %. Persentase Angka penduduk miskin di kabupaten Maros 90,43 persen, keberhasilan menekan angka kemiskinan dari 34.620 jiwa menjadi 34.110 jiwa atau menurun sekitar 510 jiwa walaupun penurunnya sangat kecil. Sedangkan untuk tingkat kemiskinan Maros tahun 2021 9,57 % menurun dibandingkan 2020 yaitu 9,74 %.

Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan salah satunya dengan melakukan program/kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Maros untuk meningkatkan Partisipasi Angkatan Kerja sehingga mengurangi angka kemiskinan.

Permasalahan :

1. Penurunan PDRB dikarenakan adanya penurunan sector transportasi dan perdagangan mengalami kontraksi
2. Penurunan Tingkat kemandirian kabupaten terjadi dikarenakan adanya refofusing anggaran terutamanya penyesuaian kembali pendapatan asli daerah yang disebabkan oleh adanya pandemic covid-19
3. Penyandang masalah kesejahteraan sosial masih tinggi
4. Jumlah pengangguran di Kabupaten Maros masih ada
5. Sumberdaya manusia tenaga kerja masih rendah dan belum berdaya saing.
6. Masih ada buta aksara tersebar di 14 kecamatan.



Solusi :

1. Menghidupkan kembali Pariwisata dan mencari objek wisata baru.
2. Perlu ada program/kegiatan yang difokuskan kepada pembinaan dan pengembangan kompetensi seperti pelatihan kerja. Peningkatan ketersediaan infrastruktur dan sarana pelayanan dasar bagi keluarga kurang mampu Peningkatan cakupan perlindungan sosial bagi masyarakat
3. Penumbuhan wirausaha muda, Peningkatan kerjasama lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, dan lembaga pemberi kerja, Perluasan kesempatan kerja melalui Penciptaan lapangan kerja dan budaya masyarakat bekerja
Peningkatkan pelatihan berbasis kompetensi
4. Melaksanakan pelatihan kerja berbasis kompetensi yang diarahkan sesuai kebutuhan berdasarkan standar kompetensi perusahaan, yang didukung dengan sertifikasi profesi, pemagangan, pelayanan penempatan, peningkatan produktifitas tenaga kerja. Dan Meningkatkan program perluasan kesempatan kerja yang diarahkan untuk kegiatan kewirausahaan
5. Memberikan pendampingan dan pelatihan/pendidikan non formal (a,b dan c)

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan untuk sasaran strategis tersebut, antara lain :

1. Program Upaya Peningkatan Perlindungan Jaminan Sosial
2. Penyelenggaraan Dan Pembinaan Pendidikan Dasar
3. Pendidikan Anak Usia Dini
4. Pendidikan Non Formal
5. Pemberdayaan Perempuan Dan Kesetaraan Gender
6. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
7. Pembinaan Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan
8. Pembinaan Dan Pengembangan Pemuda
9. Pemberdayaan Kepemudaan
10. Pengembangan Dan Pemberdayaan UMKM/UKM
11. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Membangun Desa
12. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan



13. Perencanaan Dan Pengendalian Bidang Pembangunan Ekonomi Dan Sumber Daya Alam

Sasaran Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah dengan indikator: *Tingkat kemandirian Kabupaten* dengan capaian 79,54 % atau realisasi 16,45 % dengan target 20,68 % termasuk kategori Baik.

Permasalahan :

1. Banyak sektor Pendapatan Asli Daerah tertutup diakibatkan adanya pandemic Covid-19.
2. Kurangnya penerapan standar pelayanan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam peningkatan kualitas pelayanan pemungutan pajak dan retribusi daerah

Solusi :

1. Peningkatan kualitas pelayanan, Sistem Data Informasi serta Manajemen Pendapatan Daerah, Mempersingkat birokrasi Pemungutan pajak, dan Melakukan Monitoring dan Evaluasi

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan untuk sasaran strategis tersebut, antara lain :

1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Bersumber dari Pajak, Retribusi dan Dana Perimbangan
2. Pengelolaan Dan Pengendalian PBB/BPHTB
3. Peningkatan Efisiensi Dan Pengamanan Perdagangan Serta Perlindungan Konsumen
4. Pengelolaan Destinasi Dan Usaha Kepariwisata Daerah
5. Pengelolaan Angkutan Dan Lalu Lintas Sungai, Laut, Dan Udara
6. Pengelolaan Angkutan Dan Lalu Lintas Darat
7. Peningkatan Pelayanan Dan Pengelolaan Administrasi Perijinan Daerah
8. Pengembangan Promosi Dan Kerjasama Investasi
9. Pembinaan Dan Pengawasan Penanaman Modal
10. Program Peningkatan Sarana Prasarana Kerja Aparatur

Sasaran Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah dengan indikator: *Tingkat kemandirian Kabupaten* dengan capaian 94,44 % atau



realisasi 16,32 % dengan target 16,45% termasuk kategori Sangat Tinggi. Beberapa program yang dilaksanakan untuk sasaran strategi tersebut antara lain : Pembinaan dan pemantauan pemberdayaan ekonomi dan pengelolaan SDA, Peningkatan ketahanan pangan, peningkatan produksi peternakan dan pencegahan penyakit, pengembangan dan pemberdayaan UMKM/UKM, pengembangan sentra industri potensial dan industri kecil menengah, peningkatan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.

Inflasi adalah kondisi meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus (kontinyu) dalam jangka waktu tertentu. Penyebab meningkatnya berkaitan dengan mekanisme pasar antara lain; konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Sasaran Terkendalnya Inflasi Daerah dengan indikator: *laju Inflasi Daerah dengan capaian* 210,87 persen dengan target 1,94 persen atau realisasi 0,92 persen termasuk kategori Sangat Tinggi.

Sasaran Menurunnya Kesenjangan Tingkat Pendapatan Masyarakat. dengan indikator: *Rasio Gini* dengan capaian rasio 99,46 % dengan target rasio 0,370 rasio dengan realisasi 0,365 Rasio termasuk kategori Sangat Tinggi. Indeks Gini adalah Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Indeks gini Kabupaten Maros menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan berada pada kategori sedang. Indeks Gini Kabupaten Maros tiga tahun terakhir cukup menggembirakan. Pada tahun 2016 pada angka 0,41. Pada tahun 2017 indeks gini Kabupaten Maros mencapai angka 0,40 dan tahun 2018 angka 0,33 dan tahun 2019 yaitu 0,38 sedangkan 2020 yaitu 0,36 Dan pada tahun ini mencapai 0,365. Hal ini mengindikasikan bahwa semua kelompok penduduk memperoleh manfaat dari pertumbuhan.

Permasalahan :

1. Kemampuan daya beli yang terbatas

Solusi :



1. Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif
2. Bantuan Langsung Tunai (BLT)
3. Menggunakan Tenaga Kerja Lokal dan Padat Karya

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan untuk sasaran strategis tersebut, antara lain :

1. Program Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif
 2. Pengembangan Sentra Industri Potensial Dan Industri Kecil Menengah
 3. Pembinaan Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan
 4. Pengembangan Budidaya Perikanan
 5. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Dan Hortikultura
 6. Peningkatan Kualitas Dan Pemberdayaan Lembaga Koperasi
1. Sasaran meningkatnya pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan indikator: Persentase Pertumbuhan *PDRB* dengan target -1,81 % namun realisasi mencapai 1,36 % dengan kategori Sangat Tinggi. Hal ini disebabkan salah satu sektor yang paling besar kontribusinya adalah sektor transportasi
- Capaian pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 juga melewati target RPJMD tahun pelaksanaan 2021, dengan target sebesar -1,81 persen. Pertumbuhan ekonomi yang membaik pada tahun 2021 disebabkan membaiknya kondisi transportasi udara pada tahun 2021 yang masih memiliki kontribusi terbesar pada struktur *PDRB* Kabupaten Maros (24,88 %), dengan pertumbuhan sebesar 0,28 persen
- Sektor yang sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 adalah sektor pertanian, dimana produksi yang cukup besar dari sektor tersebut mengakibatkan kontribusi sektor pertanian meningkat dari 18,72 persen pada tahun 2020 menjadi 19,74 persen pada tahun 2021, dengan pertumbuhan sebesar 8,15 persen.

Permasalahan :

1. Pencapaian *PDRB* berdasarkan 17 sektor lapangan usaha dan sektor transportasi dalam pergudangan dalam hal ini transportasi udara (bandara) terjadi pandemic Covid-19 yang mengakibatkan penutupan bandara selama kurang lebih 3 bulan hal ini menyebabkan tingkat pembelian konsumen menurun yang



berimbang pada PDRB Kabupaten Maros sehingga hal ini berpengaruh pada sektor transportasi.

Solusi :

1. Mengembangkan nilai tambah produksi dari sektor lain seperti pertanian, akomodasi dan makan minum serta sektor konstruksi dan jasa lainnya.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan untuk sasaran strategis tersebut, antara lain :

1. Program Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Daerah
2. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Dan Hortikultura
3. Penyelenggaraan Jalan Dan Jembatan
4. Pengembangan Perumahan
5. Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
6. Pengembangan Sentra Industri Potensial Dan Industri Kecil Menengah
7. Peningkatan Pelayanan Dan Pengelolaan Administrasi Perijinan Daerah
8. Peningkatan Efisiensi Dan Pengamanan Perdagangan Serta Perlindungan Konsumen
9. Pengembangan Dan Pemberdayaan UMKM/UKM
10. Pengelolaan Destinasi Dan Usaha Kepariwisata Daerah

Pendapatan per kapita adalah total pendapatan suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk di daerah tersebut untuk tahun yang sama. Angka yang digunakan semestinya adalah total pendapatan regional dibagi jumlah penduduk. Akan tetapi angka ini sangat sulit diperoleh sehingga diganti dengan total PDRB atas dasar harga pasar dibagi dengan jumlah penduduk.

Sasaran meningkatnya meningkatnya pendapatan masyarakat dengan indikator : *PDRB Perkapita* dengan capaian 103,01 % dengan target 46,48 Rp/Jiwa dan realisasi 47,88 Rp/Jiwa % termasuk kategori Sangat Tinggi.

Permasalahan :

1. Dari 17 sektor yang mengalami penurunan, sector yang mengalami pertumbuhan adalah sector informasi dan telekomunikasi dan jasa kesehatan dan kegiatan social disebabkan oleh Pandemi Covid-19 dan yang berkontraksi adalah



sector pertanian, kehutanan dan perikanan dan sector industry pengolahan, pengadaan listrik dan gas, sector perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor transportasi dan pergudangan, sector penyediaan akomodasi dan makan minum, sector jasa perusahaan, sector administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan social wajib dan sector lainnya mengalami perlambatan.

Solusi :

1. Peningkatan produksi pertanian, perikanan dan peternakan
2. Pembinaan dan Pelatihan keterampilan dan wirausaha
3. Mencari Objek Wisata Baru
4. Peningkatan Infrastruktur daerah pelosok

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan untuk sasaran strategis tersebut, antara lain :

1. Pelayanan Penempatan Dan Pemberdayaan Tenaga Kerja
2. Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif
3. Penyelenggaraan Jalan Dan Jembatan
4. Pengelolaan Sumber Daya Air
5. Pembinaan Dan Pengembangan Pemuda

- 2) Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
 Tujuan I : Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang Profesional dan berkinerja Tinggi
 Tujuan II : Mewujudkan Pelayanan Publik yang berkualitas

Tabel 3.8
Target dan Realisasi Misi 2

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (IMPACT)				
		TOLOK UKUR	TARGET KINERJA	REALISASI	%	Kategori
2	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Yang Bersih, Akuntabel, Efisien, Dan Efektif.	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	60,2 IRB	50,20 IRB	83,39	T
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,5	82,87	99,25	ST

Sasaran Terwujudnya Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) dengan target kinerja 60,2 IRD dan realisasi 50,20 dengan persentase capaian 83,39 dengan kategori Tinggi



Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, dengan indikator : *Persentase pencapaian Target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*. Untuk Indeks Kualitas Masyarakat (IKM) dengan target 83,5 IKM dengan realisasi 82,87 dengan persentase capaian 99,25 % dengan kategori Sangat Tinggi.

Dalam rangka pencapaian IRB yang lebih baik, Pemerintah Kabupaten Maros telah melakukan beberapa terobosan dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat diantaranya pelayanan E-KTP di kecamatan-kecamatan sehingga masyarakat tidak menumpuk di Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Pencatatan Sipil. Selain itu pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan terhadap investor juga telah dilakukan, dan paling utama adalah pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) yang akan menjadi pusat semua jenis pelayanan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan untuk sasaran strategis tersebut, antara lain :

1. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pendidikan
2. Peningkatan mutu dan professional pendidik serta tenaga kependidikan
3. Pendidikan Non Formal
4. Peningkatan Pelayanan Dan Pengelolaan Administrasi Perijinan Daerah
5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan
6. Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil
7. Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat
8. Pelayanan Penempatan Dan Pemberdayaan Tenaga Kerja
9. Pengelolaan Data/Informasi Dan Layanan Kepegawaian

3) Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

Tujuan : Meningkatkan taraf hidup Penduduk, baik sebagai Individu maupun sebagai masyarakat

Tabel 3.9.
Target dan Realisasi Misi 3

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (IMPACT)				
		TOLOK UKUR	TARGET KINERJA	REALISASI	%	Kategori
3	Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat.	Indeks Pembangunan Manusia	70,49 IPM	69,86 IPM	99,10	ST
	Meningkatnya Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,50	89,20	99,66	ST
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	72,76	72,43	99,55	ST



Meningkatnya Stabilitas Keamanan, Ketertiban, Kerukunan Hidup, Dan Perlindungan Masyarakat Termasuk Perempuan Dan Anak.	Angka kriminalitas yang tertangani	0,183	0,187	102,17	ST
Meningkatnya Kualitas Dan Ketersediaan Bahan Pangan Masyarakat.	Indeks Ketahanan Pangan Daerah	85,71	83,62	97,56	ST
Terkendalinya Pertumbuhan Dan Persebaran Penduduk Sesuai Daya Dukung Lingkungan Daerah.	Laju Pertumbuhan Penduduk	2,04	1,99	102,51	ST

Sasaran Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat, dengan indikator : *Persentase pencapaian Indeks pembangunan manusia dengan Capaian 99,10 % dengan target 70,49 % dan realisasi 69,86% atau dengan kategori Baik Sekali.* Adapun data IPM adalah sebagai berikut :

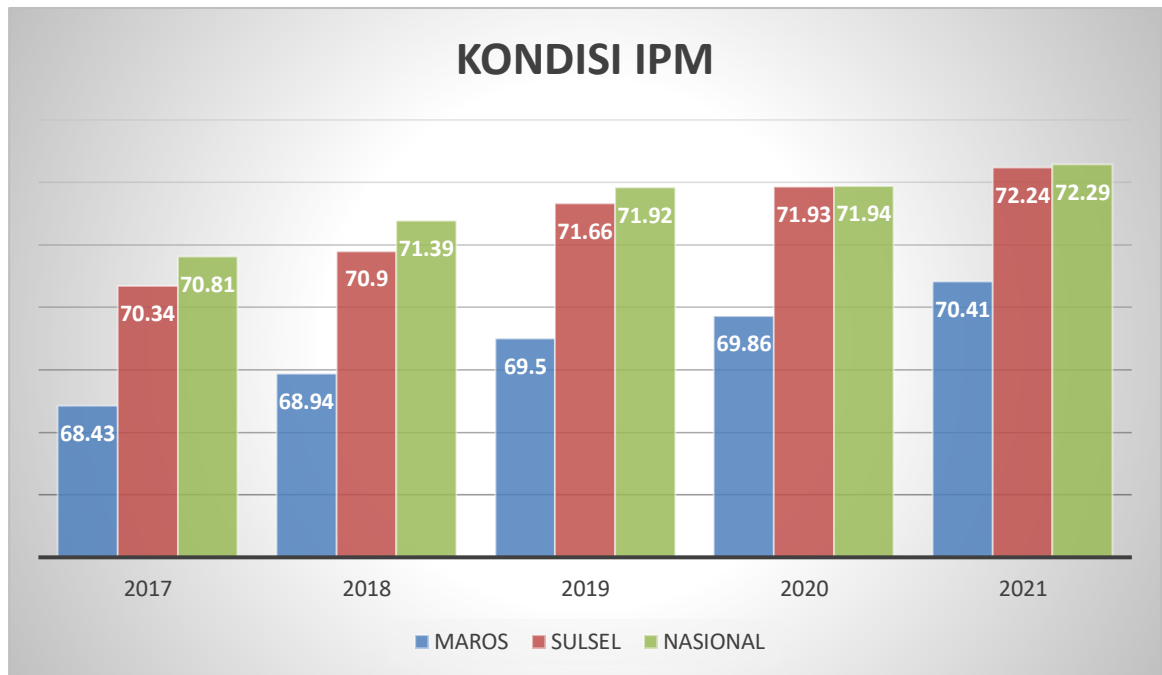
URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,97	12,99	13,02	13,04	13,16
Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Ribu Rp)	10.127	10.331	10.981	10.963	11.032
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,42	7,5	7,46	13,16	8,01
Umur Harapan Hidup (tahun)	68,6	68,74	68,98	69,02	69,04
IPM	68,43	68,94	69,8	69,86	70,41

Pertumbuhan IPM Kabupaten Maros Untuk tahun 2021 mencapai 70,41. Dalam perhitungan IPM, komponen indikator IPM yaitu Angka harapan Hidup, Harapan lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Per kapita.

- Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2021 yaitu 13,16
- Indeks kesehatan yaitu 75,40
- Indeks Pendidikan yaitu 63,25
- Daya Beli (PPP) yaitu Rp.11,032
- Angka Rata-Rata Lama Sekolah yaitu 8,01
- Angka Harapan Hidup yaitu 69,04

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang meliputi aspek kesehatan melalui pengukuran angka harapan hidup saat lahir, pendidikan melalui pengukuran angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta aspek kesejahteraan melalui pengukuran daya beli atau pengeluaran per kapita. Perkembangan IPM Kabupaten Maros selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup baik sebagaimana terlihat pada Grafik 2.3 berikut ini

Grafik 2.13
Kondisi IPM Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional
Tahun 2017-2021



Sumber : BPS Kab. Maros, 2021

Berdasarkan grafik tersebut diatas, terlihat bahwa kondisi IPM Kabupaten Maros sejak tahun 2017-2021 meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2017 IPM Kabupaten Maros sebesar 68,43 kemudian meningkat hingga mencapai 70,41 pada tahun 2021. Hal ini disebabkan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan yang menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Maros selama sepuluh tahun terakhir. Perbaikan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan serta peningkatan kapasitas dan kualitas sumberdaya manusia tenaga pendidik serta tenaga kesehatan dilakukan secara konsisten setiap tahunnya.

Salah satu program dalam mendukung terwujudnya IPM dengan mengoptimalkan kesehatan masyarakat, salah satu kegiatan penunjang yaitu dengan program GERMAS (Gerakan masyarakat Hidup Sehat) salah satu implemenatsi atas program ini dilaksanakan senam kebugaran , pemeriksaan kesehatan dan mengajak masyarakat untuk berperilaku hidup sehat seperti makan buah dan sayuran, membersihkan lingkungan dan rutin berolahraga, Selain GERMAS untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal dan meningkatkan derajat kesehatan beberapa



puskesams melakukan inovasi dalam pelayanan dimasyarakat antara lain puskesmas LAU membuat sebuah kegiatan inovasi MTKS GAMMARA PKM LAU, yang mengedukasi anak secara dini untuk mau berperilaku hidup sehat melalui manajemen secara terpadu dan pelayanan kesehatan yang bermutu. Selain itu dilaksanakan Car Free Day setiap hari minggu pagi yang mana kegiatan ini mengajak masyarakat untuk berolahraga yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga.

Pemerintah Kabupaten Maros juga bergerak aktif dalam pengelolaan sampah rumah tangga dengan memberikan edukasi dan mengajak masyarakat dalam membersihkan lingkungan, memanfaatkan sisa sampah untuk menjadi barang yang berguna, pemberdayaan masyarakat dalam pembuatan pupuk kompos dan membuat barang-barang bekas menjadi suatu barang atau daur ulang sampah yang bernilai jual. Dan sebagai wujud kepedulian pemerintah atas kesehatan masyarakat dibentuk tim pembina kabupaten sehat, forum kabupaten sehat serta forkom kecamatan sehat Kabupaten Maros.

Pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan tidak lepas dari peran aktif masyarakat dan dukungan seluruh sektor pemerintahan yang terkait, dalam menggerakkan, memfasilitasi serta membantu masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang sehat secara mandiri.

Selain kesehatan dalam rangka mngurangi buta aksara di Kabupaten Maros melalui Dinas pendidikan di lakukan pelatihan dan pembelajaran untuk masyarakat yang buta aksara.

Dalam Hal pendidikan, untuk menunjang proses belajar mengajar setiap tahun dikuncurkan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan baik itu dalam hal rehabilitasi, revitalisasi serta pembangunan ruang kelas baru dan pemenuhan meubeler sekolah pada jenjang pendidikan Paud/TK, SD, SMP maupun SKB.

Dalam upaya meningkatkan minat baca Dinas Perpustakaan Kabupaten Maros melaksanakan Road Show Gerakan Membaca dan Kabupaten Maros terpilih dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (RI) sebagai satu dari 65 kabupaten dan kota se Indonesia sebagai penerima manfaat program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, sebagai inovasi untuk menjadikan perpustakaan desa sebagai pusat belajar dan berkegiatan yang berkelanjutan, pada 6 (enam) desa yaitu desa



Pajukukang, Desa Labuaja, Desa Bori Kamase, Desa Bonto Tallasa , Desa Allatenggae dan Desa Baruga. Transformasi perpustakaan di desa dimulai dengan upaya merubah paradigma yang melekat di benak masyarakat selama ini bahwa perpustakaan sekedar layanan peminjaman dan pengembalian kolaksi buku, tapi kini perpustakaan telah bertransformasi menjadi pusat informasi serta tempat belajar dan bekegiatan.

Selain itu dalam hal mendukung peningkatan akses dan mutu pendidikan didirikan taman baca. Salah satu taman baca yang didirikan SDN Inpres 105 Alatengae Maros dengan konsep Taman Baca Apung, selain itu didusun salometti, desa toddolimae kec. Tompobulu didirikan taman baca pustaka alam, TBM Binaan PKBM Delia Cenrana Desa Limapoccoe Kec. Cenrana didesain unik perpaduan tempat membaca dan cafe. Pembanguna Taman Baca merupakan wujud kecintaan masyarakat Maros untuk mewujudkan masyarakat Maros gemar membaca dengan konsep yang berbeda di beberapa tempat sehingga mengundang minat baca terlebih dikalangan anak-anak dan remaja.

Permasalahan :

1. Kapasitas SDM Tenaga guru masih perlu ditingkatkan dan distribusi penempatan guru yang belum merata
2. Sarana dan prasarana pendidikan belum memadai
3. Masih Rendahnya Angka melanjutkan sekolah pendidikan dasar ke pendidikan selanjutnya
4. Masih Rendahnya Angka Partisipasi Pendidikan Kesetaraan
5. Masih ada tenaga pendidik belum bersertifikasi
6. Masih Putus sekolah
7. Belum maksimalnya pelaksanaan program pencegahan tumbuh kerdil atau stunting
8. Masih terdapat angka kematian bayi baru lahir dan Masih terdapat angka kematian ibu pasca melahirkan

Solusi :

1. pembinaan dan pendampingan peningkatan prestasi pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan formal dan non formal



2. Perlu adanya regulasi dan penataan penempatan guru serta peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
3. Penyedia sarana prasarana pembelajaran dan pemanfaatan informasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
4. Meningkatkan dan mendorong Masyarakat putus sekolah untuk mau melanjutkan pendidikannya melalui program pendidikan kesetaraan
5. Meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga pendidikan
6. Optimalisasi pelayanan kesehatan
7. Pemetaan wilayah setempat dan pendampingan tenaga kesehatan (bidan) tentang K1 Akses
8. Pemberian makanan tambahan dan gizi tambahan terhadap ibu hamil serta balita.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan untuk sasaran strategis tersebut, antara lain :

1. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pendidikan
2. Peningkatan mutu dan professional pendidik serta tenaga kependidikan
3. Pendidikan Non Formal
4. Pengelolaan dan Distribusi Tenaga Pendidik dan Kependidikan.
5. Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit
6. Upaya Kesehatan Masyarakat
7. Peningkatan Efisiensi Dan Pengamanan Perdagangan Serta Perlindungan Konsumen

Sasaran Meningkatkan peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan, dengan indikator : *Persentase pencapaian Indeks pembangunan gender* dengan Capaian 99,66 persen dengan target 89,50 % dan realisasi 89,20 % atau dengan kategori Sangat Tinggi dan *Persentase pencapaian Indeks pemberdayaan gender* dengan Capaian 99,55 persen dengan target 72,76 % dan realisasi 72,43 % atau dengan kategori Sangat Tinggi.

Permasalahan :

1. Terdapatnya kesenjangan ekonomi dan pendapatan antara perempuan dan laki-laki dalam meningkatkan perekonomian



2. Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT
3. Masih adanya kasus perkawinan usia anak.

Solusi :

1. Meningkatkan tingkat pendidikan perempuan
2. Memfasilitasi kegiatan pemberdayaan usaha industri rumahan
3. Sudah adanya Unit Pelayanan P2TP2A, Sudah ada SOP P2TP2A, sudah ada beberapa kelompok pengaduan tingkat desa dan kelurahan yang telah terbentuk
4. Telah Terbit Perda Kabupaten layak anak

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan untuk sasaran strategis tersebut, antara lain :

1. Peningkatan Kualitas Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak
2. Peningkatan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan
3. Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender
4. Peningkatan Upaya Perlindungan Dan Jaminan Sosial

Sasaran Meningkatnya Stabilitas Keamanan, Ketertiban, Kerukunan Hidup, Dan Perlindungan Masyarakat Termasuk Perempuan Dan Anak, dengan indikator : *Persentase pencapaian angka kriminalitas yang tertagani* dengan Capaian 102,17 % dengan target 0,183/10.000 penduduk dan realisasi 0,187/10.000 penduduk atau dengan kategori Sangat Tinggi. Untuk menjaga ketertiban masyarakat dalam stabilitas keamanan dibuat poskamling di setiap desa, dan dilakukan pelatihan satuan perlindungan masyarakat di perdesaan. Untuk perlindungan anak dan perempuan terhadap kekerasan dibentuk Unit Layanan Terpadu kekerasan terhadap perempuan dan anak bekerja sama dengan kepolisian, kejaksaan, rumah sakit dan pengadilan.

Permasalahan :

1. Ketentraman masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi; serta Kurangnya sarana prasarana untuk mendukung ketertantaman dan ketertiban di wilayah kecamatan



2. Jumlah kasus yang tertagani hanya kasus yang dilaporkan sedangkan banyak kasus yang tidak dilaporkan karena dianggap tabu/aib.

Solusi :

1. Perlu beberapa pembuatan sarana parasarana seperti pos kamling di wilayah kecamatan serta Mengoptimalkan program kegiatan mengenai ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan Peningkatan keamanan kota melalui pencegahan, penyediaan fasilitas dan sistem penanganan kriminalitas dan konflik.
2. Sudah adanya Unit Pelayanan P2TP2A, Sudah ada SOP P2TP2A, sudah ada beberapa kelompok pengaduan tingkat desa dan kelurahan yang telah terbentuk
3. Penerapan PERDA Pelaksanaan pembinaan dalam bentuk penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan bupati

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan untuk sasaran strategis tersebut, antara lain :

1. Program Penyelenggaraan Ketertiban Dan Ketenteraman Umum Masyarakat
2. Peningkatan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan
3. Penanganan Konflik Sosial
4. Pembinaan Kerukunan Dan Stabilitas Keamanan

Sasaran Meningkatnya Kualitas Dan Ketersediaan Bahan Pangan Masyarakat, dengan indikator : Indeks Ketahanan Pangan Daerah. Kabupaten Maros merupakan salah satu Kabupaten Penghasil Beras, dan untuk rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama yang terdiri dari Beras (Padi), sayuran, Kedelai, jagung, kacang hijau dan ubi, untuk kesediaan pangan sebesar ini artikan bahwa Kabupaten Maros memiliki cukup pangan . Persentase pencapaian Indeks ketahanan pangan daerah dengan Capaian 97,56 persen dengan target 85,71 persen dan realisasi 83,62 persen atau dengan kategori Sangat Tinggi.



Produksi pangan di Kabupaten Maros mengalami penurunan namun ketersediaan cadangan pangan jauh melebihi kebutuhan pangan masyarakat

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan untuk sasaran strategis tersebut, antara lain :

1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Dan Hortikultura
2. Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan

Sasaran Terkendalinya Pertumbuhan Dan Persebaran Penduduk Sesuai Daya Dukung Lingkungan Daerah., dengan indikator : *Persentase pencapaian laju Pertumbuhan penduduk* dengan Capaian 102,51% dengan target 2,04% dan realisasi 1,99 % atau dengan kategori sangat Tinggi.

Permasalahan :

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjadi akseptor KB
2. Angka Kelahiran Total atau TFR masih tinggi
3. Angka kelahiran remaja (ASFR) Masih tinggi
4. Laju pertumbuhan penduduk masih sangat tinggi diakibatkan migrasi penduduk terutama wilayah kecamatan yang berbatasan dengan kota Makassar
5. Rendahnya Pasangan Usia Subur yang menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang

Solusi :

- Peningkatan Kerjasama dengan Kabupaten/Kota sekitar untuk pengendalian terhadap dampak negatif dari pertumbuhan penduduk terutama masalah migrasi penduduk
- Peningkatan kesadaran masyarakat tentang keluarga berencana
- Peningkatan pelayanan dan mengembangkan metode advokasi dan KIE keluarga berencana.
- Peningkatan peserta KB aktif dan KB mandiri

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan untuk sasaran strategis tersebut, antara lain :

1. Pengembangan Kelembagaan dan pengendalian Penduduk



2. Penyuluhan Dan Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Kependudukan Dan KB
 3. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 4. Peningkatan Partisipasi Dan Pemberdayaan Masyarakat.
- 4) Misi 4 : Meningkatkan Pembangunan wilayah dan kawasan
Tujuan : Meningkatkan pembangunan wilayah perkotaan, pedesaan dan kawasan strategis

Tabel 3.10
Target dan Realisasi Misi 4

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (IMPACT)				
		TOLOK UKUR	TARGET KINERJA	REALISASI	%	Kategori
4	Meningkatnya Pemerataan Dan Percepatan Pembangunan Desa	Indeks Pembangunan Desa (IPD)	0,65	0,67	103,08	ST
	Terwujudnya Ruang Kota Yang Layak Huni	Indeks Kota Berkelanjutan (IKB)	0,67	0,69	102,99	ST
	Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Tingkat Kesesuaian Terhadap RTRW	3,58	4,32	120,67	ST

Sasaran Meningkatkan Pemerataan Dan Percepatan Pembangunan Desa, dengan indikator : *Persentase pencapaian Indeks Pembangunan Desa* dengan nilai capaian 103,08 % dengan target 0,65 % dan realisasi 0,67 % atau dengan kategori Sangat Tinggi.

Permasalahan :

1. Masih terdapat desa tertinggal di Kabupaten Maros, dikarenakan masih lemahnya beberapa dimensi pada ketahanan sosial, ekonomi, transportasi dan infrastruktur
2. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

Solusi :

1. Dibutuhkan kajian lebih dalam pada penyusunan dokumen perencanaan tahunan desa dan penganggaran desa (APBDesa) dengan keterlibatan beberapa sektor perangkat daerah untuk membantu desa meningkatkan nilai indikator di beberapa



dimensi seperti kesehatan, pendidikan, sosial, permukiman, ekonomi, transportasi dan infrastruktur

2. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa
3. Melakukan pembinaan masyarakat desa khususnya masyarakat miskin Membentuk Labsite Desa Peningkatan alokasi dana desa dalam APBD sesuai ketentuan perundang - undangan yang berlaku
4. Melakukan pelatihan Keterampilan dan membentuk Pos pelayanan Teknologi tepat guna untuk peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan untuk sasaran strategis tersebut, antara lain :

1. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Desa
2. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Membangun Desa
3. Program Pengembangan Kelembagaan Sosial Ekonomi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan.

Sasaran Terwujudnya Ruang kota Yang layak Huni, dengan indikator : *Persentase pencapaian Indeks Kota Berlanjutan (IKB)* dengan nilai capaian 102,99 % dengan target 0,67 IKB dan realisasi 0,69 atau dengan kategori Sangat Tinggi.

Sasaran Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang., dengan indikator : *Persentase Tingkat Kesesuaian Terhadap RTRW* dengan nilai capaian 120 % dengan target 3,56% dan realisasi 4,32 % atau dengan kategori Baik Sekali.

Permasalahan :

1. Masih adanya pembangunan baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun perusahaan tidak sesuai dengan Dokumen RTRW.

Solusi :



1. Dibuat produk turunan dari RTRW berupa RDTR untuk setiap kecamatan
2. Revisi RTRW

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan untuk sasaran strategis tersebut, antara lain :

1. Program Perencanaan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah
2. Perencanaan Dan pengendalian Bidang Pembangunan Wilayah Dan Kawasan

- 1) Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sumber daya Alam
Tujuan I : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemanfaatan dan pelestarian Sumber daya Alam.
Tujuan II : Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan Terhadap Mitigasi

Tabel 3.11
Target dan Realisasi Misi 5

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (IMPACT)				
		TOLOK UKUR	TARGET KINERJA	REALISASI	%	Kategori
5	Meningkatnya Produksi Pemanfaatan Lahan Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Dan Peternakan	Indeks Produksi Sub Sektor Pertanian	102,05	104,02	101,93	ST
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Hidup.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63,54	67,33	100,44	ST
	Menurunnya Potensi Kerugian Dan Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana.	Indeks Resiko Bencana (IRD)	141,35	141,87	100,37	ST

Sasaran Meningkatkan Produksi Pemanfaatan Lahan Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Dan Peternakan, dengan indikator : *Persentase pencapaian Indeks Produksi Sub Sektor* dengan Capaian 11,93 % dengan target 102,05% dan realisasi 104,02 % atau dengan kategori Sangat Tinggi. Untuk sasaran Meningkatkan Produksi Pemanfaatan Lahan Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Dan Peternakan hasil dari keseluruhan masuk dalam kategori sangat berhasil.

Permasalahan :

1. Cara bercocok tanam masih menggunakan metode Lama sehingga produksi tidak maksimal.



2. Distribusi hasil pertanian mengalami penurunan diakibatkan adanya pembatasan kegiatan masyarakat karena adanya pandemi.
3. Daya masyarakat menurun karena Pandemi.
4. Adanya anomali iklim, bencana alam dan serangan OPT mengakibatkan gagal panen dan penurunan produksi
5. Kegiatan usaha tani sebagian besar masih bersifat subsistem dengan komoditas utama berupa bahan pangan pokok (padi)
6. Kelangkaan Pupuk di Petani.
7. Terbatas wilayah area pengelolaan perikanan tangkap
8. Kurangnya RPH (rumah pemotongan Hewan).

Solusi :

1. Dukungan dan komitmen pemerintah daerah dalam hal pembangunan infrastruktur
2. Adanya sosialisasi dan penggalakan konsumsi pangan lokal
3. Adanya kerjasama dengan investor dan kemitraan serta promosi produk pertanian dan sertifikasi produk pertanian
4. Dukungan organisasi kelembagaan non pemerintah (LSM/HKTI/KTNA/Asosiasi/Koperasi Tani/Gapoktan/Poktan/P3A/GP3A) serta Pengadaan Tenaga Penyuluh Pertanian
5. Pembinaan Kelompok petani Pembudidaya dan nelayan Peningkatan kinerja sumber daya manusia dan kelembagaan perikanan.
6. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung peningkatan produksi

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan / dilaksanakan untuk sasaran strategis tersebut, antara lain :

1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Dan Hortikultura
2. Pengembangan Sarana Prasarana Penunjang Produksi Dan Agribisnis
3. Peningkatan Ketahanan Pangan
4. Pengembangan Budidaya perikanan
5. Pengembangan perikanan tangkap
6. Pembinaan dan penyediaan sarana prasarana perikanan



Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Hidup, dengan indikator : *Persentase pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup* dengan Capaian 100,44 % dengan target 63,54 IKLH dan realisasi 67,33 IKLH atau dengan kategori Sangat Tinggi.

Permasalahan

1. Berkurangnya luas tutupan hutan
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan lingkungan yang ramah lingkungan/berkelanjutan;
3. Masih adanya pencemaran dan pengrusakan lingkungan
4. Banyaknya area hutan produksi yang beralih fungsi menjadi area perkebunan yang dikelola oleh masyarakat;

Solusi :

1. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai kerusakan lingkungan
2. Sosialisasi menyeluruh terhadap budaya hidup bersih dimasyarakat lebih ditingkatkan.Peningkatan peran serta sekolah, ormas/lembaga, dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan hidup Peningkatan pengelolaan sampah berbasis 3R
3. Meningkatkan koordinasi dengan dinas terkait untuk bersama-sama melakukan pembinaan teknis dalam pengelolaan lingkungan Peningkatan upaya rehabilitasi dan konservasi lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati.
4. Pengawasan bagi industry/usaha di Kabupaten Maros. Pemantauan dan penegakan aturan tentang pengendalian pencemaran air dan udara terutama pada sektor industri dan komersial.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan / dilaksanakan untuk sasaran strategis tersebut, antara lain :

1. Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Perencanaan Dan Pengendalian Bidang Pembangunan Ekonomi Dan Sumber Daya Alam
3. Pembinaan & Pemantauan Pemberdayaan Ekonomi Dan Pengelolaan SDA
4. Penegakan Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Daerah



Sasaran Menurunnya Potensi Kerugian Dan Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana, dengan indikator : *Indeks Resiko Bencana dengan capaian* 100,37 % dengan Target 141,35 IRB dan Realisasi 141,87 dengan Kategori Baik Sekali.

Permasalahan :

1. Tingkat Ketahanan masyarakat terhadap bencana masih rendah
2. Pemahaman masyarakat terhadap pemeliharaan lingkungan dalam rangka mengantisipasi terjadi bencana masih rendah.

Solusi :

1. Meningkatkan sistem ketahanan bencana yang handal melalui pemantauan secara berkesinambungan, pemutakhiran sistem mitigasi bencana, dan penanganan bencana skala Kabupaten
2. Sosialisasi tentang lingkungan hidup.
3. Pembangunan Desa tangguh Bencana (Destana)
4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka mitigasi bencana.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan / dilaksanakan untuk sasaran strategis tersebut, antara lain :

1. Peningkatan Efektifitas Pencegahan Dan Mitigasi Bencana Alam
2. Peningkatan Upaya Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup
3. Pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran.

2) Misi 6 : Meningkatkan pembangunan Infrastruktur Dan teknologi Informatika

Tujuan I : Meningkatkan Infrastuktur pendukung pemerataan dan Keseimbangan Pembangunan

Tabel 3.12
Target dan Realisasi Misi 6

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (IMPACT)				
		TOLOK UKUR	TARGE T KINERJ A	REALISA SI	%	Kategori
6	Meningkatnya Ketersediaan Sarana Prasarana Umum Yang Berkualitas	Indeks Daya Saing Infrastruktur	65,05	69,68	107,1 2	ST



Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Informasi Publik	Indeks Pembangunan TIK (IP-TIK)	3,00	3,20	106,6 7	ST
--	---------------------------------	------	------	------------	----

Sasaran Meningkatkan Ketersediaan Sarana Prasarana Umum Yang Berkualitas, dengan indikator : *Indeks Daya Saing Infrastuktur* dengan Capaian 17,12 % dengan target 65,05 % dan realisasi 69,68 % atau dengan kategori Sangat Tinggi.

Adapun permasalahan yang dihadapi adalah :

1. Masih ada kerusakan pada sarana prasarana jalan, jembatan dan irigasi
2. Pembangunan perumahan yang layak huni belum maksimal, khususnya dikawasan pesisir dan kumuh.
3. Banyaknya pemanfaatan area sempadan sungai dan jalan yang tidak sesuai peruntukannya;
4. Sarana dan prasarana termasuk bangunan belum memperhatikan hak dan kemudahan bagi penyandang disabilitas dan kaum rentang
5. Penyediaan transportasi umum didaerah tertentu masih kurang

Solusi :

1. Untuk lebih mengoptimalkan Program kegiatan untuk mendukung peningkatan perbaikan dan pembangunan dalam bidang sarana dan prasarana
2. Untuk lebih mengoptimalkan Program kegiatan untuk mendukung peningkatan perbaikan dalam bidang perumahan sebagai wujud mencapai target 100 % rumah yang pengguna air bersih, 0 % kawasan kumuh, dan 100 % rumah tangga bersanitasi
3. Perlunya sosialisasi Produk tata ruang sebagai produk yang mempunyai kekuatan hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi perizinan bangunan
4. Penyediaan sarana dan prasarana dengan memperhatikan kebutuhan bagi penyandang disabilitas dan kaum rentang.
5. Membuka jalur transportasi umum pada daerah tertentu.



6. Peningkatan sistem manajemen angkutan umum massal yang aman, nyaman dan ramah

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan/ dilaksanakan untuk sasaran strategis tersebut, antara lain :

1. Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
2. Pembangunan Bangunan dan Gedung
3. Pengelolaan Angkutan dan Lalu lintas Sungai, Laut dan Udara
4. Pengelolaan angkutan dan lalu lintas darat
5. Pengembangan Perumahan
6. Pengembangan Kinerja Layanan Air Minum dan Sanitasi
7. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur Daerah

Persentase pencapaian Indeks pembangunan TIK (IP-TIK) dengan sasaran Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Informasi Publik dengan Capaian 106,67% dengan target 3,00 % dan realisasi 3,20 % atau dengan kategori Baik Sekali.

Dalam Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) merupakan suatu ukuran standar yang dapat menggambarkan tingkat pembangunan teknologi informasi dan komunikasi suatu wilayah, kesenjangan digital, serta potensi pengembangan TIK. Adapun permasalahan yang dihadapi adalah :

Adapun permasalahan yang dihadapi adalah :

1. Penyedia sarana dan prasarana pendukung teknologi informasi belum maksimal
2. Masih kurangnya SDM dalam bidang teknologi informasi
3. Implementasi e-government belum optimal.

Solusi :

1. Untuk lebih mengoptimalkan Program kegiatan untuk mendukung peningkatan perbaikan dan pembangunan dalam bidang sarana dan prasarana



2. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia informasi dan teknologi yang memiliki kompetensi dibidangnya
3. Pembentukan suatu kebijakan yang kuat dalam memberikan dukungan kepada pengimplementasi e-goverment dan penyediaan sarana dan prasarana pendukung.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan / dilaksanakan untuk sasaran strategis tersebut, antara lain :

1. Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Umum
2. Program Pengembangan Data dan Informasi Pemerintah Daerah
3. Program Pengamanan Data dan Informasi Pemerintah Daerah.

Dari indikator diatas dapat dilihat ringkasan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.13
Perbandingan Target sasaran dan Realisasi
Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (IMPACT)				
		TOLOK UKUR	TARGET KINERJA	REALISASI	%	Kategori
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah.	Persentase Pertumbuhan PDRB	-1,81	1,36	175,14	ST
	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat.	PDRB Per Kapita	46,48	47,88	103,01	ST
	Meningkatnya kemandirian Keuangan Daerah	Tingkat Kemandirian kabupaten	17,28	16,32	94,44	ST
	Terkendalnya Inflasi Daerah	Laju Inflasi daerah	1,94	0,92	210,87	ST
	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan	90,63	90,43	99,78	ST
	Meningkatnya Nilai Investasi	Pertumbuhan PMTB	7,00	2,91	41,57	SR
	Meningkatnya Kualitas Tenaga	Produktifitas Total Daerah	72,49	77,19	106,48	ST



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (IMPACT)				
		TOLOK UKUR	TARGET KINERJA	REALISASI	%	Kategori
	Kerja dan Kesempatan kerja					
	Menurunnya kesenjangan Tingkat pendapatan Daerah	Rasio Gini	0,370	0,365	99,46	ST
2	Terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih, akuntabel, efisien dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	60,2	50,20	83,39	T
	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,5	82,87	99,25	ST
3	Meningkatnya Stabilitas Keamanan, Ketertiban, kerukunan hidup dan perlindungan masyarakat termasuk perempuan dan anak	Angka kriminalitas yang tertagani	0,183	0,187	102,17	ST
	Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat	Indeks pembangunan Manusia	70,14	70,41	100,38	ST
	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,50	89,20	99,66	ST
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	72,76	72,43	99,55	ST
	Meningkatnya Kualitas dan ketersediaan Bahan pangan Masyarakat	Indeks ketahanan Pangan Daerah	85,71	83,62	97,56	ST
	Terkendalinya Pertumbuhan dan Persebaran Penduduk Sesuai Daya Dukung Lingkungan Daerah	Laju Pertumbuhan penduduk	2,04	1,99	102,51	ST
4	Meningkatnya Pemerataan dan percepatan	Indeks Pembangunan Desa (IPD)	0,65	0,67	103,08	ST



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (IMPACT)				
		TOLOK UKUR	TARGET KINERJA	REALISASI	%	Kategori
	pembangunan desa					
	Terwujudnya Ruang Kota Yang Layak Huni	Indeks Kota Berkelanjutan (IKB)	0,67	0,69	102,99	ST
	Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Tingkat Kesesuaian Terhadap RTRW	3,58	4,32	120,67	ST
5	Meningkatnya Produksi Pemanfaatan Lahan Pertanian, perikanan, perkebunan dan Peternakan	Indeks produksi Sub Sektor Pertanian	102,05	104,02	101,93	ST
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (KLH)	63,54	67,33	100,44	ST
	Menurunnya Potensi kerugian dan Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana	Indeks Kesiapsiagaan Bencana	141,35	141,87	100,37	ST
6	Meningkatnya Ketersediaan Sarana Prasarana Umum yang berkualitas	Indeks Daya Saing Infrastruktur	65,05	69,68	107,12	ST
	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Informasi Publik	Indeks Pembangunan TIK (IP-TIK)	3,00	3,20	106,67	ST

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 24 Indikator Kinerja Utama Bupati Maros Tahun 2021, disimpulkan bahwa 22 (Tujuh Belas) indikator dalam kategori Sangat Tinggi, sedangkan 1 (Satu) indikator sasaran mencapai nilai yang Tinggi, 1 (satu) indikator dalam kategori Rendah.

IKU yang masuk kriteria Sangat tinggi dari target yang ditetapkan yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (KLH) dengan nilai 100,44%, Indeks Kesiapsiagaan Bencana 100,37%, Indeks Daya Saing



Infrastruktur 107,12 persen, Laju pertumbuhan penduduk 102,51 persen, Persentase penduduk diatas garis kemiskinan 99,78 persen, Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) 102,99%, tingkat kesesuaian terhadap RTRW 120,67 persen, Rasio Gini 99,46 persen, indeks pembangunan manusia 100,38 persen, indeks pembangunan gender 99,66 persen, indeks ketahanan pangan daerah 97,56 persen, indeks produksi sub sector pertanian 101,93 persen, indeks pembangunan TIK (IP_TIK) 106,67 persen, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 99,25 persen, indeks pembangunan desa 103,08 persen,

Dengan demikian masih terdapat indikator sasaran yang pencapaiannya belum maksimal seperti yang diharapkan sehingga perlu perhatian sehingga pada tahun berikutnya nilai yang diharapkan dapat tercapai.

Sesuai dengan perkembangan dan dinamika dan tuntutan masyarakat, kinerja pemerintah Kabupaten Maros selalu berupaya untuk dioptimalkan.

Oleh karenanya, segala program pembangunan pemerintah daerah selalu diupayakan untuk dapat mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance).

Beberapa pelayanan dan kinerja pemerintah Daerah Kabupaten Maros mendapatkan apresiasi dan penghargaan sebagai wujud nyata dalam pembangunan menuju Maros lebih Sejahtera diantara penghargaan yang diraih Kabupaten Maros adalah akuntabilitas kinerja yang mendapatkan penilaian baik, Tahun 2019 Kabupaten Maros juga mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pemerintah Kabupaten Maros juga mendapatkan Sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia Pada Tahun 2019 dari menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, pada tanggal 17 Desember 2020 di Jakarta, Penghargaan Unit Penyelenggaraan pelayanan Publik Terbaik Kategori "Sangat Baik" (Disdukcapil) dan penghargaan Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik Terbaik Kategori Sangat Baik (DMPTSP)

c. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021 Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2020



Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2021 ataupun Tahun Terakhir adalah untuk mengetahui Realisasi Kinerja tahun bersangkutan dengan tahun - tahun yang lalu apakah mengalami peningkatan atau penurunan dalam setiap tahunnya. Berikut ini disajikan perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dan tahun 2021 sesuai dengan tabel dibawah ini :

Tabel 3.14
Perbandingan Capaian Kinerja
Tahun 2020 dan tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (IMPACT)		
		TOLOK UKUR	CAPAIAN 2020	CAPAIAN 2021
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah.	Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)	-10,87	175,14
	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat.	PDRB Per Kapita	47,53	103,01
	Menurunnya Tingkat Kemiskinan.	Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan	90,26	99,78
	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah.	Tingkat Kemandirian Kabupaten	16,45	94,44
	Terkendalinya Inflasi Daerah.	Laju Inflasi Daerah	2,13	210,87
	Menurunnya Kesenjangan Tingkat Pendapatan	Rasio Gini	0,368	99,46
	Meningkatnya Nilai Investasi	Pertumbuhan PMTB	11,38	41,57
	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja dan	Produktifitas Total Daerah	73,50	106,48
2	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Yang Bersih,	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	50,20	83,39
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,87	99,25
3	Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat.	Indeks Pembangunan Manusia	69,86	100,38
	Meningkatnya Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,23	99,66
		Indeks Pemberdayaan Gender	72,43	99,55
Meningkatnya Stabilitas Keamanan, Ketertiban, Kerukunan Hidup, Dan Perlindungan Masyarakat Termasuk Perempuan Dan Anak.	Angka kriminalitas yang tertangani	0,177/10000	102,17	



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (IMPACT)		
		TOLOK UKUR	CAPAIAN 2020	CAPAIAN 2021
	Meningkatnya Kualitas Dan Ketersediaan Bahan Pangan Masyarakat.	Indeks Ketahanan Pangan Daerah	83,11	97,56
	Terkendalinya Pertumbuhan Dan Persebaran Penduduk Sesuai Daya Dukung Lingkungan Daerah.	Laju Pertumbuhan Penduduk	2.05	102,51
4	Meningkatnya Pemerataan Dan Percepatan Pembangunan Desa	Indeks Pembangunan Desa (IPD)	0,66	103,08
	Terwujudnya Ruang Kota Yang Layak Huni	Indeks Kota Berkelanjutan (IKB)	0,6	102,99
	Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Tingkat Kesesuaian Terhadap RTRW	2,83	120,67
5	Meningkatnya Produksi Pemanfaatan Lahan Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Dan Peternakan.	Indeks Produksi Sub Sektor Pertanian	99,00	101,93
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Hidup.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	61,79	100,44
	Menurunnya Potensi Kerugian Dan Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana.	Indeks Kesiapsiagaan Bencana	145,46	100,37
6	Meningkatnya Ketersediaan Sarana Prasarana Umum Yang Berkualitas	Indeks Daya Saing Infrastruktur	62,64	107,12
	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Informasi Publik.	Indeks Pembangunan TIK (IP-TIK)	2,67	106,67



d. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021 Dibandingkan dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Periode terakhir dokumen RPJMD Kabupaten Maros, Perbandingan ini untuk mengetahui apakah sasaran strategis dan capaiannya setiap tahun telah sesuai dengan perencanaan Jangka menengah Daerah. Perbandingan antara Target RPJMD dengan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.14
Perbandingan Capaian Kinerja
Tahun 2020 dan tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (IMPACT)		
		TOLOK UKUR	CAPAIAN 2020	CAPAIAN 2021
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah.	Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)	-10,87	7,66
	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat.	PDRB Per Kapita	47,53	46,48
	Menurunnya Tingkat Kemiskinan.	Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan	90,26	90,63
	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah.	Tingkat Kemandirian Kabupaten	16,45	17,28
	Terkendalinya Inflasi Daerah.	Laju Inflasi Daerah	2,13	1,94
	Menurunnya Kesenjangan Tingkat Pendapatan	Rasio Gini	0,368	0,370
	Meningkatnya Nilai Investasi	Pertumbuhan PMTB	11,38	7,00
	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja dan	Produktifitas Total Daerah	73,50	72,49
2	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Yang Bersih,	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	50,20	60,20
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,87	83,5
3	Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat.	Indeks Pembangunan Manusia	69,86	70,14
	Meningkatnya Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,23	89,5
		Indeks Pemberdayaan Gender	72,43	72,73



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (IMPACT)		
		TOLOK UKUR	CAPAIAN 2020	CAPAIAN 2021
	Meningkatnya Stabilitas Keamanan, Ketertiban, Kerukunan Hidup, Dan Perlindungan Masyarakat Termasuk Perempuan Dan Anak.	Angka kriminalitas yang tertangani	0,177/ 10000	0,183/10.0 00
	Meningkatnya Kualitas Dan Ketersediaan Bahan Pangan Masyarakat.	Indeks Ketahanan Pangan Daerah	83,11	85,71
	Terkendalinya Pertumbuhan Dan Persebaran Penduduk Sesuai Daya Dukung Lingkungan Daerah.	Laju Pertumbuhan Penduduk	2.05	2,04
4	Meningkatnya Pemerataan Dan Percepatan Pembangunan Desa	Indeks Pembangunan Desa (IPD)	0,66	0,65
	Terwujudnya Ruang Kota Yang Layak Huni	Indeks Kota Berkelanjutan (IKB)	0,6	0,67
	Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Tingkat Kesesuaian Terhadap RTRW	2,83	3,58
5	Meningkatnya Produksi Pemanfaatan Lahan Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Dan Peternakan.	Indeks Produksi Sub Sektor Pertanian	99,00	102,05
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Hidup.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	61,79	63,54
	Menurunnya Potensi Kerugian Dan Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana.	Indeks Kesiapsiagaan Bencana	145,46	141,35
6	Meningkatnya Ketersediaan Sarana Prasarana Umum Yang Berkualitas	Indeks Daya Saing Infrastruktur	62,64	65,05
	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Informasi Publik.	Indeks Pembangunan TIK (IP-TIK)	2,67	3,00



e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai

1. Struktur Organisasi

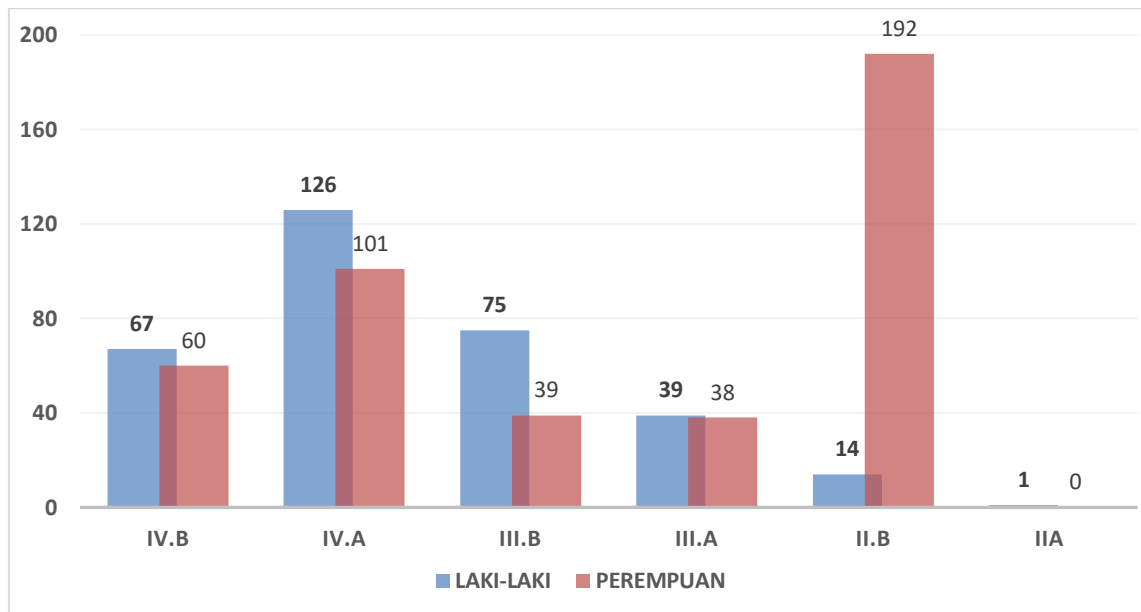
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, oleh Pemerintah Kabupaten Maros telah dilakukan penyesuaian dan penataan organisasi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah tersebut, sehingga pada tahun 2016 telah ditetapkan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Maros dan Peraturan Bupati Maros tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Maros.

Fungsi aparatur negara/pemerintah dalam menjalankan pelayanan merupakan fungsi penunjang yang bersifat relatif. Fungsi ini ditujukan bagi terlaksananya tujuan negara dalam melayani warga negaranya melalui aparatur pemerintah. Pelayanan merupakan salah satu produk organisasi berupa jasa, sehingga pada dasarnya pelayanan tidak kasat mata, diraba, dan dimiliki, melainkan hanya sebatas digunakan, dirasakan, dibeli, atau disewa. Sekalipun demikian, dalam kehidupan organisasi, fungsi pelayanan memiliki nilai strategis dibandingkan dengan fungsi organisasi lainnya. Ini karena fungsi pelayanan sangat berpotensi dalam menentukan kelanggengan, perkembangan dan keunggulan bersaing organisasi di masa yang akan datang. Jumlah ASN Negeri Sipil berdasarkan golongan dan pejabat Struktural/Fungsional Kabupaten Maros sebanyak 6.363 orang.

Jumlah ASN berdasarkan eselon Kabupaten Maros sebanyak 557 orang yang terdiri dari 1 Orang yang menduduki eselon II-A, 35 orang yang menduduki jabatan pada eselon II-B, 53 orang yang menduduki jabatan pada eselon III-A, 114 orang yang menduduki jabatan pada eselon III-B, 227 orang yang menduduki jabatan pada eselon IV-A serta 127 orang ASN yang menduduki jabatan pada eselon IV-B.



Grafik 1.7
Jumlah ASN Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin
Kabupaten Maros Tahun 2021



Sumber : BKPSDM Kab. Maros, 2021

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2016 tersebut, Pemerintah Kabupaten Maros memiliki 31 (tiga puluh satu) Satuan Kerja Perangkat Daerah, 14 (empat belas) Kecamatan dan 23 (dua puluh tiga) Kelurahan serta 80 (delapan puluh) Desa dan 9 (Sembilan) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan dan Dinas.

Berdasarkan uraian jabatan dan jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diatas yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Maros nomor 07 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, diurai sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah Tipe A;
2. Sekretariat DPRD Tipe B;
3. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A yang melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah;
4. Dinas Terdiri Dari :
 - 1) Dinas Pendidikan merupakan dinas tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - 2) Dinas Kesehatan merupakan dinas tipe A yang merupakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;



- 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- 4) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan dinas tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- 5) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan dinas tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- 6) Dinas Sosial merupakan dinas tipe A yang melaksanakan urusan bidang sosial;
- 7) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan dinas tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- 8) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan dinas tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 9) Dinas Lingkungan Hidup merupakan dinas tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
- 10) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan dinas tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- 11) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan dinas tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- 12) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan dinas tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 13) Dinas Perhubungan merupakan dinas tipe yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- 14) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan dinas tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;



- 15) Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan merupakan dinas tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, UKM dan perdagangan;
 - 16) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan dinas tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
 - 17) Dinas Kepemudaan dan Olah Raga merupakan dinas tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemuda dan olahraga;
 - 18) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan dinas tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata;
 - 19) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan dinas tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
 - 20) Dinas Perikanan merupakan dinas tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
 - 21) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan merupakan dinas tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan ketahanan pangan;
5. Badan Daerah, terdiri dari :
- 1) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah merupakan Badan tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan dan pembangunan daerah;
 - 2) Badan Pengelola Keuangan dan pendapatan Daerah merupakan Badan tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang keuangan;
 - 3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia merupakan Badan tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah;
 - 4) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan Badan tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan daerah;



- 5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan Badan tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana ;
 - 6) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah merupakan Badan tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
6. Balai Layanan Umum Daerah (BLUD), terdiri dari :
- 1) RSUD Salewangang merupakan RSUD Tipe C

Disamping Dinas Daerah dan Badan Daerah, serta Lembaga Penunjang Daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maros, terdapat pula 3 (tiga) kelompok jabatan Staf Ahli Bupati yakni :

- a. Staf Ahli Bidang Sosial, Politik dan Hukum;
- b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Sumber Daya Manusia;
- c. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Sumber Daya Alam;

Kecamatan, terdiri dari :

1. Kecamatan Marusu dengan tipe A
2. Kecamatan Moncongloe dengan tipe A
3. Kecamatan Mandai dengan tipe A
4. Kecamatan Tanralili dengan tipe A
5. Kecamatan Tompobulu dengan tipe A
6. Kecamatan Turikale dengan tipe A
7. Kecamatan Maros Baru dengan tipe A
8. Kecamatan Lau dengan tipe A
9. Kecamatan Bontoa dengan tipe A
10. Kecamatan Bantimurung dengan tipe A
11. Kecamatan Simbang dengan tipe A
12. Kecamatan Cenrana dengan tipe A
13. Kecamatan Camba dengan tipe A
14. Kecamatan Mallawa dengan tipe A

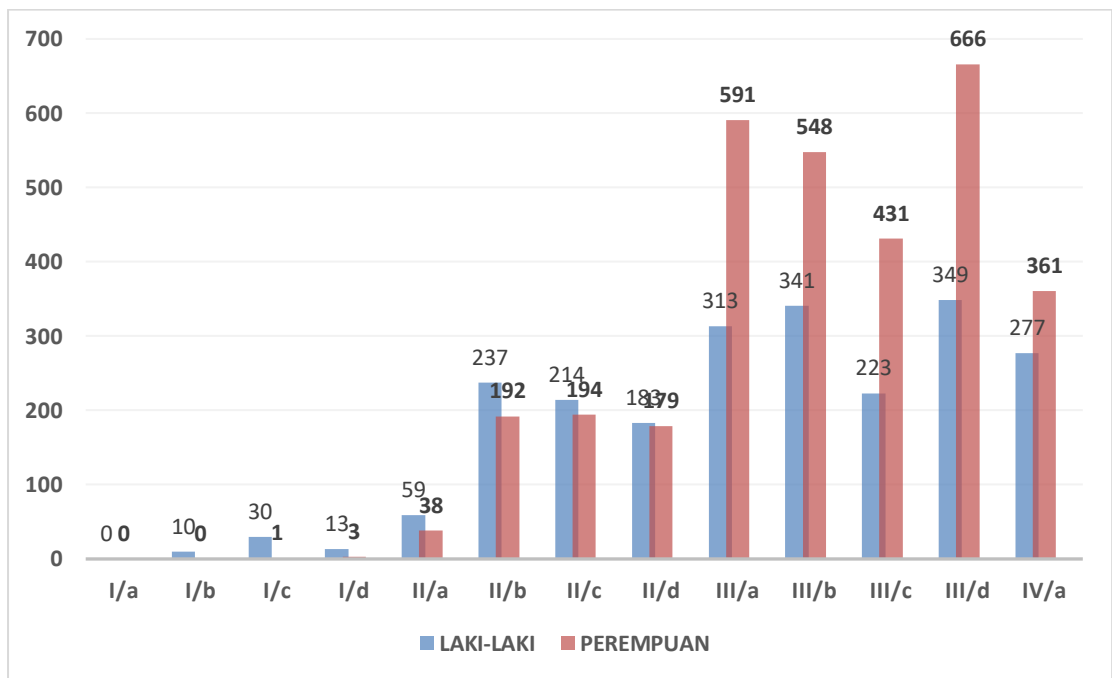
2. Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara (ASN)

Jumlah ASN Negeri Sipil berdasarkan golongan dan pejabat Struktural/Fungsional Kabupaten Maros sebanyak 6.363 orang. Jumlah ASN



berdasarkan golongan ruang dan jenis kelamin Kabupaten Maros paling besar terdapat pada golongan III/D, dimana pada golongan tersebut terdapat 666 orang pegawai, kemudian diikuti oleh golongan III/A dengan jumlah ASN sebanyak 591 orang, kemudian golongan III/B dengan jumlah ASN sebanyak 548 orang. Secara lengkap jumlah ASN berdasarkan golongan ruang dan jenis kelamin dapat dilihat pada Grafik dibawah ini.

**Grafik Jumlah ASN
Berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin
Kabupaten Maros Tahun 2021**



Sumber : BKPSDM Kab. Maros, 2021

f. Analisis Program dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Secara umum Program/Kegiatan Pemerintah Kabupaten Maros menunjang keberhasilan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Maros, namun demikian program/kegiatan tersebut akan selalu dilakukan Review apakah dalam tahun pelaksanaan terdapat program/kegiatan yang harus segera dilaksanakan atau dihentikan yang dinilai berdasarkan pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Maros. Rencana dan Realisasi Program/kegiatan untuk tahun 2021 terdiri dari 136 (seratus tiga puluh enam) program dan terdapat 26 program Pembangunan. Adapun program pembangunan adalah sebagai berikut :



NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
Misi 1		
Sasaran : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah		
Indikator Kinerja : Pertumbuhan PDRB		
1	Program Penguatan Sektor Ekonomi Daerah	Sekretariat Daerah
2		Bappeda
3		Balitbangda
4		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
5		Dinas Perikanan
6		Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
7		Dinas Koperasi, UKM, Dan Perdagangan
8		Dinas Penanaman Modal Dan PTSP
9		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
10		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
Sasaran : Meningkatnya Pendapatan Masyarakat		
PDRB Per Kapita		
1	Program Pengembangan potensi ekonomi lokal	Sekretariat Daerah
2		Dinas Koperasi, UKM, Dan Perdagangan
3		Dinas Penanaman Modal Dan PTSP
4		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
5		Dinas Perikanan
6		Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
7		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
8		Seluruh Kecamatan
9		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
10		Balitbangda
11		Badan Keuangan Daerah
12		Bappeda
Sasaran : Menurunnya Kesenjangan Tingkat Pendapatan Masyarakat		
Rasio Gini		
1	Program Pemerataan Distribusi Pendapatan Masyarakat	Sekretariat Daerah (Asisten Administrasi Pengembangan Ekonomi)
2		Dinas Koperasi, UKM, Dan Perdagangan
3		Dinas Penanaman Modal Dan PTSP
4		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
5		Dinas Perikanan
6		Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
7		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
8		Dinas Pendidikan
9		Dinas Kesehatan
10		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
11		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
12		Balitbangda
Sasaran : Menurunnya Tingkat Kemiskinan.		
Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan		
1	Program Penanganan Masyarakat Miskin Dan Rentan	Sekretariat Daerah (Asisten Administrasi Pengembangan Ekonomi)
2		Bappeda
3		Badan Keuangan Daerah
4		Balitbangda
5		Dinas Pendidikan
6		Dinas Kesehatan
7		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan



NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		Perlindungan Anak
8		Dinas Sosial
9		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
10		Seluruh Kecamatan
11		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
12		Dinas Perikanan
13		Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
14		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
15		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
16		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
17		Dinas Administrasi Penduduk Dan Catatan Sipil
18		Dinas Koperasi, UKM, Dan Perdagangan
19		Dinas Pemuda Dan Olahraga
Sasaran : Meningkatnya Pendapatan Daerah.		
Tingkat Kemandirian Kabupaten		
1	Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Badan Keuangan Daerah
2		Balitbangda
3		Dinas Koperasi, UKM, Dan Perdagangan
4		Dinas Perhubungan
5		Seluruh Kecamatan
6		Dinas Perikanan
7		Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
8		Dinas Kesehatan
9		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
10		Dinas Penanaman Modal Dan PTSP
11		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Sasaran: Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja Dan Kesempatan Kerja		
Produktifitas Total Daerah		
1	Program Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	Sekretariat Daerah (Asisten Administrasi Pengembangan Ekonomi)
2		Bappeda
3		Balitbangda
4		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
5		Dinas Pendidikan
6		Dinas Koperasi, UKM, Dan Perdagangan
7		Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
8		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
9		Dinas Perikanan
10		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
11		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
SASARAN: Terkendalinya Inflasi Daerah		
Laju Inflasi Daerah		
1	Program Pengendalian Inflasi Daerah	Sekretariat Daerah (Asisten Administrasi Pengembangan Ekonomi)
2		Bappeda



NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
3		Balitbangda
4		Dinas Koperasi, UKM, Dan Perdagangan
5		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
6		Dinas Perikanan
7		Dinas Perhubungan
8		Dinas Penanaman Modal Dan PTSP
9		Satuan Polisi Pamong Praja Dan Damkar
SASARAN: Meningkatnya Nilai Investasi		
Pertumbuhan PMTB		
1	Program Peningkatan Investasi Padat Karya	Sekretariat Daerah (Asisten Administrasi Pengembangan Ekonomi)
2		Bappeda
3		Badan Keuangan Daerah
4		Balitbangda
5		Dinas Penanaman Modal Dan PTSP
6		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
7		Dinas Perikanan
8		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
9		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
10		Dinas Komunikasi Dan Informatika
Misi 2		
SASARAN: Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Yang Bersih, Akuntabel, Efisien, Dan Efektif.		
Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)		
1	Program Pengelolaan Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik	Sekretariat Daerah (Asisten Administrasi Sosial Dan Pemerintahan)
2		Inspektorat Kabupaten
3		Badan Keuangan Daerah
4		Bappeda
5		Dinas Komunikasi Dan Informatika
6		Seluruh SKPD/OPD
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.		
Indeks Kepuasan Masyarakat		
1	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah (Asisten Administrasi Sosial Dan Pemerintahan)
2		Inspektorat Kabupaten
3		Badan Keuangan Daerah
4		Bappeda
5		Balitbangda
6		Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah
7		Dinas Komunikasi Dan Informatika
8		Dinas Penanaman Modal dan PTSP
9		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
10		Dinas Pendidikan
11		Dinas Kesehatan
12		Dinas Administrasi Penduduk Dan Catatan Sipil
13		RSUD Salewangang
14		Dinas Perpustakaan Dan Arsip
15		Seluruh Kecamatan
16		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
1	Program Percepatan Pencapaian Target Standar	Sekretariat Daerah



NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Pelayanan Minimal	(Asisten Administrasi Sosial Dan Pemerintahan)
2		Bappeda
3		Balitbangda
4		Inspektorat Kabupaten
5		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
6		Dinas Pendidikan
7		Dinas Kesehatan
8		RSUD Salewangang
9		Dinas Sosial
10		Satuan Polisi Pamong Praja Dan Damkar
11		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
MISI 3		
Sasaran : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat.		
Indeks Pembangunan Manusia		
1	Program Pembangunan Sumberdaya Manusia Masyarakat	Sekretariat Daerah (Asisten Administrasi Sosial Dan Pemerintahan)
2		Bappeda
3		Balitbangda
4		Dinas Pendidikan
5		Dinas Kesehatan
6		Dinas Sosial
7		RSUD Salewangang
8		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
9		Dinas Perpustakaan Dan Arsip
10		Dinas Komunikasi Dan Informatika
11		Dinas Pengendalian Penduduk
12		Dan Keluarga Berencana
13		Dinas Pemuda Dan Olahraga
14		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
15		Dinas Koperasi, UKM, Dan Perdagangan
Sasaran : Meningkatkan Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan.		
Indeks Pembangunan Gender (IPG)		
1	Program : Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Sekretariat Daerah (Asisten Administrasi Sosial Dan Pemerintahan)
2		Bappeda
3		Balitbangda
4		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
5		Dinas Pendidikan
6		Dinas Kesehatan
7		Dinas Sosial
8		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
9		Dinas Perpustakaan Dan Arsip
10		Dinas Komunikasi Dan Informatika
11		Dinas Pemuda Dan Olahraga
12		Dinas Koperasi, UKM, Dan Perdagangan
13		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian



NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1		Dinas Perikanan
4		
1		Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
5		
SASARAN: Meningkatnya Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan		
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		
1	Program Peningkatan Peran Aktif Perempuan Dalam Pembangunan	Sekretariat Daerah (Asisten Administrasi Sosial Dan Pemerintahan)
2		Bappeda
3		Balitbangda
4		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
5		Badan Keuangan Daerah
6		Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah
7		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Sasaran : Meningkatnya Stabilitas Keamanan, Ketertiban, Kerukunan Hidup, Dan Perlindungan Masyarakat Termasuk Perempuan Dan Anak.		
Angka kriminalitas yang tertangani		
1	Program Pemeliharaan Ketertiban, Ketentraman, Keamanan Dan Perlindungan Masyarakat	Sekretariat Daerah (Asisten Administrasi Sosial Dan Pemerintahan)
2		Satuan Polisi Pamong Praja Dan Damkar
3		Inspektorat Kabupaten
4		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
5		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
6		Seluruh Kecamatan
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Dan Ketersediaan Bahan Pangan Masyarakat		
Indeks Ketahanan Pangan Daerah		
1	Program Penguatan Ketahanan Pangan Daerah	Sekretariat Daerah (Asisten Administrasi Pengembangan Ekonomi)
2		Dinas Koperasi, UKM, Dan Perdagangan
3		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
4		Dinas Perikanan
5		Dinas Kesehatan
6		Seluruh Kecamatan
Sasaran : Terkendalinya Pertumbuhan Dan Persebaran Penduduk Sesuai Daya Dukung Lingkungan Laju Pertumbuhan Penduduk		
1	Program Pengendalian Pertumbuhan Dan Distribusi penduduk	Sekretariat Daerah (Asisten Administrasi Sosial Dan Pemerintahan)
2		Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
3		Bappeda
4		Balitbangda
5		Dinas Administrasi Penduduk Dan Catatan Sipil
6		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
7		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
8		Seluruh Kecamatan
9		Dinas Kesehatan
MISI : 4		
SASARAN: Meningkatnya Pemerataan Dan Percepatan Pembangunan Desa		
Indeks Pembangunan Desa (IPD)		
1	Program Percepatan Pembangunan Desa	Sekretariat Daerah (Asisten Administrasi Sosial Dan Pemerintahan)
2		Bappeda
3		Balitbangda
4		Badan Keuangan Daerah
5		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
6		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang



NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
7		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
8		Dinas Koperasi, UKM, Dan Perdagangan
9		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
10		Dinas Perikanan
11		Dinas Kesehatan
12		Dinas Pendidikan
13		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
14		Dinas Perpustakaan Dan Arsip
15		Dinas Komunikasi Dan Informatika
16		Dinas Pemuda Dan Olahraga
17		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
18		Seluruh Kecamatan
Sasaran : Terwujudnya Ruang Kota Yang Layak Huni		
Indeks Kota Berkelanjutan (IKB)		
1	Program Pengelolaan Kawasan Perkotaan	Sekretariat Daerah (Asisten Administrasi Pengembangan Ekonomi)
2		Bappeda
3		Balitbangda
4		Badan Keuangan Daerah
5		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
6		Dinas Koperasi, UKM, Dan Perdagangan
7		Dinas Kesehatan
8		Dinas Pendidikan
9		Dinas Komunikasi Dan Informatika
10		Dinas Perhubungan
11		Dinas Lingkungan Hidup
12		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
Sasaran : Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang		
Tingkat Kesesuaian Terhadap RTRW		
1	Program Pengendalian Dan Pemanfaatan Ruang	Sekretariat Daerah (Asisten Administrasi Pengembangan Ekonomi)
2		Bappeda
3		Balitbangda
4		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
5		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
6		Dinas Perhubungan
7		Dinas Lingkungan Hidup
8		Satuan Polisi Pamong Praja Dan Damkar
9		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
MISI 5		
Sasaran : Meningkatnya Produksi Pemanfaatan Lahan Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Dan Peternakan		
Indeks Produksi Sub Sektor Pertanian		
1	Program Peningkatan Produksi Pertanian	Sekretariat Daerah (Asisten Administrasi Pengembangan Ekonomi)



NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
2		Bappeda
3		Balitbangda
4		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
5		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
6		Seluruh Kecamatan
7	Program Peningkatan Produksi Perikanan	Sekretariat Daerah (Asisten Administrasi Pengembangan
8		Ekonomi)
9		Bappeda
1		Balitbangda
0		
1		Dinas Perikanan
1		
Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Hidup.		
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		
1	Program Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Sumberdaya Alam	Sekretariat Daerah (Asisten Administrasi Pengembangan Ekonomi);
2		Dinas Lingkungan Hidup;
3		Bappeda;
4		Balitbangda;
5		Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar;
6		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
7		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian;
8		Dinas Perhubungan;
Sasaran : Menurunnya Potensi Kerugian Dan Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana.		
Indeks Resiko Bencana (IRB)		
1	Program Penanganan Resiko Bencana	Sekretariat Daerah (Asisten Administrasi Pengembangan Ekonomi);
2		Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
3		Dinas Lingkungan Hidup;.
4		Badan Keuangan Daerah;
5		Bappeda;
6		Balitbangda;
7		Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar;
8		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
9		Dinas Sosial;
1		Dinas Kesehatan;
0		
1		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1		
MISI 6		
Sasaran : Meningkatnya Ketersediaan Sarana Prasarana Umum Yang Berkualitas		
Indeks Daya Saing Infrastruktur		
1	Program Peningkatan Kualitas Dan Ketersediaan Infrastruktur Daerah	Sekretariat Daerah (Asisten Administrasi Pengembangan Ekonomi);
2		Dinas Lingkungan Hidup;
3		Badan Keuangan Daerah;
4		Bappeda;
5		Balitbangda;
6		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
7		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
8		Satuan Polisi Pamong Praja Dan Damkar;
9		Dinas Perhubungan;
1		Seluruh Kecamatan
0		



NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
Sasaran : Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Informasi Publik.		
Indeks Pembangunan TIK (IP-TIK)		
1	Program Peningkatan Kualitas Dan Ketersediaan Infrastruktur Penunjang Informasi Publik	Sekretariat Daerah (Asisten Administrasi Pengembangan Ekonomi);
2		Bappeda;
3		Balitbangda;
4		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
5		Dinas Komunikasi Dan Informatika;
6		Seluruh Kecamatan

Program Penunjang Pencapaian Sasaran Kabupaten Tahun 2021

Pelaksanaan program tersebut dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan urusan kewenangan masing- masing. Dalam Pelaksanaan urusan tersebut masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, adapun permasalahan tersebut berdasarkan urusan Pemerintahan adalah sebagai berikut:

**Tabel Permasalahan dan Solusi
Berdasarkan Urusan Pemerintahan**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	PENDIDIKAN	1 Beberapa indikator Standar Pelayanan Minimal urusan pendidikan belum tercapai;	1 Penganggaran untuk mendukung fungsi pendidikan perlu ditingkatkan dalam rangka mengentaskan dan meningkatkan angka melek huruf serta untuk mendukung dan memberikan jaminan kepada anak-anak usia sekolah di Kabupaten Maros dapat bersekolah sampai pada tingkat pendidikan
		2 Angka kelulusan belum mencapai 100 % dari semua tingkatan;	2 Pembinaan dan pendampingan peningkatan prestasi pendidikan Peningkatan kualitas pendidikan formal dan non formal
		3 Kapasitas SDM tenaga guru masih perlu ditingkatkan;	3 Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
		4 Distribusi penempatan tenaga guru belum merata.	4 Perlu adanya regulasi dan penataan penempatan guru se Kabupaten maros
		5 Sarana dan prasarana pendidikan belum memadai (Sekolah Dasar)	5 Penyediaan sarana prasarana pembelajaran dan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Pemerataan aksesibilitas pendidikan formal dan non formal diseluruh wilayah Kabupaten Maros.
		6 Tugas guru sebagai ASN yang wajib bekerja selama 37,5 jam per pekan belum terpenuhi	6 Perlunya adanya regulasi dan penempatan jam-jam belajar untuk memaksimalkan waktu mengajar
2	KESEHATAN	1 Beberapa indikator Standar Pelayanan Minimal urusan kesehatan belum tercapai	1 Penganggaran untuk mendukung program yang berkaitan dengan SPM dan Melakukan perhitungan SPM Kesehatan



NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERMASALAHAN	SOLUSI
		<p>2 Masih kurangnya kesadaran masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat;</p> <p>3 Perbaikan gizi balita belum</p> <p>4 Masih terdapat beberapa Puskesmas yang belum terakreditasi dan Puskesmas yang sudah terakreditasi perlu dilakukan Reakreditasi untuk mencapai penilaian yang semakin</p> <p>5 Sarana dan prasarana puskesmas harus memenuhi standar SPM</p> <p>6 Masih terdapat angka kematian bayi baru lahir</p> <p>7 Masih terdapat angka kematian ibu pasca melahirkan</p> <p>8 Belum maksimalnya pelaksanaan program pencegahan tumbuh kerdil</p> <p>9 Ketersediaan tenaga kesehatan masih kurang.</p>	<p>2 Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pola hidup sehat dan Penciptaan budaya hidup bersih dan sehat di</p> <p>3 Peningkatan cakupan pelayanan gizi bagi ibu</p> <p>4 Mengusulkan dan Menganggarkan akreditasi Puskesmas</p> <p>5 Peningkatan ketersediaan sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan yang berkualitas. Peningkatan ketersediaan dan pendistribusian obat dan perbekalan</p> <p>6 Pemetaan wilayah setempat dan pendampingan tenaga kesehatan (bidan) tentang K1</p> <p>7 Penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran Stimulasi makanan tambahan pada Ibu Hamil</p> <p>8 Optimalisasi pelayanan kesehatan sesuai tata laksana gizi buruk</p> <p>9 Penambahan dan distribusi SDM kesehatan sesuai dengan Abk dan ANJAB.</p>
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	<p>1 Tingkat kerusakan sarana prasarana jalan, jembatan dan</p> <p>2 Sarana dan prasarana termasuk bangunan belum memperhatikan hak dan kemudahan bagi penyandang</p> <p>3 Kurangnya kesadaran masyarakat dalam tertib</p> <p>4 Banyaknya area hutan produksi yang beralih fungsi menjadi permukiman yang dikelola oleh masyarakat;</p> <p>5 Banyaknya pemanfaatan area sempadan sungai, jalan dan area pantai yang tidak sesuai</p> <p>6 Ketersedian sumber air bersih pada kawasan pesisir masih</p> <p>7 Masih tingginya RT yang tidak memenuhi sanitasi yang layak;</p> <p>8 Produk tata ruang yang telah disusun belum disadari sebagai produk yang mempunyai</p> <p>9 Banyaknya sarana prasarana air bersih yang sudah terbangun tetapi</p>	<p>1 Untuk lebih mengoptimalkan Program kegiatan untuk mendukung peningkatan perbaikan dan pembangunan dalam bidang sarana dan prasarana</p> <p>Perlunya sosialisasi Produk tata ruang sebagai produk yang mempunyai kekuatan hukum</p> <p>Perlunya sosialisasi tentang pemahaman pemeliharaan sarana dan prasana infrastruktur</p> <p>Untuk menerbitkan Perbup tentang alih fungsi lahan dan pemanfaatan area sempadan sungai, jalan dan area pantai</p>
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	<p>1 Pengelolaan perumahan yang layak huni belum maksimal, khususnya</p> <p>2 Sarana dan prasarana dasar permukiman belum memadai;</p> <p>3 Jumlah RT yang tidak memenuhi sanitasi yang layak</p>	<p>1 Untuk lebih mengoptimalkan Program kegiatan untuk mendukung peningkatan perbaikan dalam bidang perumahan sebagai wujud mencapai target 100 % rumah yang pengguna air bersih, 0 % kawasan kumuh, dan 100 % rumah tangga bersanitasi</p>



NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERMASALAHAN	SOLUSI
		4 Penanganan terhadap kejadian bencana belum sepenuhnya berjalan optimal.	Peningkatan harmonisasi dalam pemanfaatan, penataan dan pengendalian ruang pada seluruh Kawasan Strategis (Nasional, Provinsi, dan Kabupaten) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi perizinan bangunan.
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1 Ketentraman masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi;	1 Mengoptimalkan program kegiatan mengenai ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Peningkatan keamanan kota melalui pencegahan, penyediaan fasilitas dan sistem penanganan kriminalitas dan konflik, serta memberdayakan modal sosial masyarakat kota yang berbasis TIK
		2 Belum optimalnya penerapan perda;	2 Mensosialisasikan penerapan PERDA Pelaksanaan pembinaan dalam bentuk penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat terhadap peraturan daerah dan
6	SOSIAL	1 Angka kemiskinan masih tinggi;	1 Peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat kurang mampu dalam kesempatan kerja serta pengembangan wirausaha Peningkatan pelaksanaan dan peningkatan keterpaduan program/kegiatan pengentasan kemiskinan baik prespektif gender Peningkatan akses dan penerimaan manfaat
		2 Tingkat pengangguran terbuka masih terbilang cukup tinggi;	2 Penumbuhan wirausaha muda Peningkatan kerjasama lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, dan lembaga pemberi kerja Perluasan kesempatan kerja melalui Penciptaan lapangan kerja dan budaya
		3 Penyandang masalah kesejahteraan sosial masih tinggi;	3 Perlu ada program/kegiatan yang difokuskan kepada pembinaan dan pengembangan kompetensi seperti pelatihan kerja. Peningkatan ketersediaan infrastruktur dan sarana pelayanan dasar bagi keluarga kurang mampu Peningkatan cakupan
		4 Bencana banjir masih sering melanda pada wilayah-wilayah tertentu;	4 Perlunya sosialisasi tentang menjaga lingkungan.
7	TENAGA KERJA	1 Angka pengangguran masih relatif tinggi.	1 Menekan angka pengangguran dengan menyiapkan tenaga kerja siap pakai. Dan Meningkatkan investasi daerah dalam rangka
		2 Sumberdaya manusia tenaga kerja masih rendah dan belum berdaya saing.	2 Melaksanakan pelatihan kerja berbasis kompetensi yang diarahkan sesuai kebutuhan berdasarkan standar kompetensi perusahaan, yang didukung dengan sertifikasi profesi, pemagangan, pelayanan penempatan, peningkatan produktifitas tenaga kerja. Dan Meningkatkan program



NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERMASALAHAN	SOLUSI		
8	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1	Masih adanya kejadian kasus kekerasan dalam rumah	1	Penguatan lembaga perlindungan anak.
		2	Anak jalanan, anak terlantar, anak korban narkoba dan anak putus sekolah masih ada.	2	Sosialisasi kepada masyarakat dan generasi muda tentang Narkoba Membuat Pelatihan/keterampilan anak putus sekolah.
9	PANGAN	1	Diversifikasi produk pangan lokal belum optimal	1	Melakukan sosialisasi Diversifikasi produk pangan lokal
		2	Menurunnya kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi produk pangan local	2	Mengembangkan diversifikasi produk pangan olahan
10	PERTANAHAN	1	Penetapan batas wilayah kecamatan belum akurat;	1	Melakukan pengukuran batas wilayah Menetapkan batas wilayah kecamatan lewat PERBUP
11	LINGKUNGAN HIDUP	1	Meningkatnya dampak emisi gas rumah kaca;	1	Meningkatkan koordinasi dengan dinas terkait untuk bersama-sama melakukan pembinaan teknis dalam pengelolaan lingkungan Peningkatan upaya rehabilitasi dan konservasi lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati
		2	Menurunnya ketersediaan dan kualitas sumber air baku;		
		3	Meningkatnya pencemaran dan pengrusakan lingkungan;	2	Pengawasan bagi industry/usaha di Kabupaten Maros. Pemantauan dan penegakan aturan tentang pengendalian pencemaran air dan udara terutama pada sektor industri dan komersial
		4	Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan lingkungan yang ramah lingkungan/ berkelanjutan;	3	Sosialisasi menyeluruh terhadap budaya hidup bersih dimasyarakat lebih ditingkatkan. Peningkatan peran serta sekolah, ormas/lembaga, dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan hidup Peningkatan pengelolaan sampah
12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1	Masih adanya masyarakat yang belum memahami pentingnya kepemilikan KTP	1	Menyusun data kependudukan dengan melibatkan pemerintah ditingkat bawah (kelurahan dan desa).
		2	Layanan administrasi kependudukan masih belum berjalan secara efisien dan efektif;	2	System penataan administrasi kependudukan ditingkat kelurahan dan desa agar setiap hari lebih up date.
		3	Ketersediaan sarana dan prasarana layanan administrasi kependudukan belum maksimal	3	Penambahan sarana dan prasarana kependudukan
13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1	Masih rendahnya realisasi pelaksanaan program kegiatan Dana Desa.	1	Perlu dilaksanakan bimbingan teknis terhadap pemerintah desa tentang pelaksanaan penyusunan perencanaan Melaksanakan Evaluasi dan pemantapan penggunaan aplikasi keuangan Desa Pembinaan terhadap peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa
		2	Perlunya dilakukan evaluasi atas pemberdayaan masyarakat yang sudah dilaksanakan.	2	Monitoring dan Evaluasi pengeluaran ADD.



NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERMASALAHAN	SOLUSI
		3 Belum optimalnya perhatian dan pembinaan terhadap masyarakat desa khususnya masyarakat miskin, marginal dan terpinggirkan.	3 Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa Melakukan pembinaan masyarakat desa khususnya masyarakat miskin Membentuk Labsite Desa Peningkatan alokasi dana desa dalam APBD sesuai ketentuan perundang - undangan yang berlaku Melakukan pelatihan Keterampilan dan membentuk Pos pelayanan Teknologi tepat guna Peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan
14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1 Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjadi akseptor KB;	1 Peningkatan kesadaran masyarakat tentang keluarga berencana Peningkatan pelayanan dan mengembangkan metode advokasi dan KIE keluarga berencana Peningkatan peserta KB aktif dan KB mandiri
		2 Laju pertumbuhan penduduk masih relatif tinggi;	2 Program pemberdayaan keluarga sejahtera lebih ditingkatkan. Peningkatan Kerjasama dengan Kabupaten/Kota sekitar untuk pengendalian terhadap dampak negatif dari pertumbuhan penduduk Pengendalian angka Total Fertility Rate (TFR)
		3 Masih rendahnya tingkat kapasitas tenaga penyuluh KB;	3 Pelatihan kompetensi untuk tenaga penyuluh dan Menambah jumlah sarana dan prasarana UPTD KB.
		4 Masih kurangnya sarana prasarana layanan KB.	
15	PERHUBUNGAN	1 Layanan transportasi angkutan umum belum memberikan jaminan	1 Peningkatan sistem manajemen angkutan umum massal yang aman, nyaman dan ramah Pembangunan dan pengembangan prasarana transportasi yang aman, nyaman dan terintegrasi dengan pelayanan regional dan nasional Penyediaan prasarana fasilitas perlengkapan jalan Pelaksanaan pengujian kelayakan kendaraan angkutan umum (KIR) sesuai
		2 Terminal angkutan umum belum berfungsi dengan.	
		3 Masih rendahnya kedisiplinan masyarakat sebagai pengguna jalan	
		4 Masih rendahnya ketersediaan rambu- rambu lalu lintas	
16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1 Implementasi e-government dan pelayanan telekomunikasi belum	1 Peningkatan prasarana dan sarana jaringan IT pada instansi, tingkat desa, kelurahan, kecamatan dan sekolah-sekolah didukung kompetensi sumber daya manusia di bidang teknisi IT
		2 Infrastruktur sarana dan prasarana data centre harus	
		3 Sarana dan prasarana TIK belum tersedia	
		4 Pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi belum tersed	2 Penyediaan infrastruktur Pengendalian keamanan data dan informasi (aplikasi, data, jaringan, perangkat keras) Program pemeliharaan infrastruktur lebih ditingkatkan Pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat proses pelayanan publik secara integratif, aman, mudah, murah, dan
		5 Belum tersedianya jaringan sistem kebencanaan yang terintegrasi	
17	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	1 Belum tersedianya data pelaku UMKM	1 Melakukan pencatatan data pelaku UMKM yang sudah terlegalitas (memiliki izin)
		2 Tingkat kapasitas SDM pelaku UMKM masih rendah	2 Menyelenggarakan program pelatihan kompetensi SDM Pelaku Koperasi dan UMKM Peningkatan Kualitas SDM Usaha mikro dalam usaha mikro dalam



NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERMASALAHAN	SOLUSI
		3 Masih tingginya koperasi yang tidak aktif	3 Memfasilitasi kemitraan koperasi dengan perusahaan swasta dan Perbankan. Mendorong partisipasi masyarakat dalam berkoperasi Peningkatan Pengawasan dan pembinaan terhadap koperasi Peningkatan proporsi jumlah koperasi sehat melalui
18	PENANAMAN MODAL	1 Pelayanan investasi masih belum optimal	1 Meningkatkan informasi penanaman modal yang berbasis Informasi Teknologi dalam mendukung iklim investasi di daerah. Melakukan Indeks kepuasan Masyarakat terhadap layanan Perizinan Melakukan Pelayanan Perizinan keliling di 14 Kecamatan
		2 Pelayanan perijinan berinvestasi belum efektif	
19	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	1 Masih terbatas sarana dan prasarana olah raga;	1 Meningkatkan anggaran pembangunan sarana olahraga.
		2 Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan masih relatif	2 Menggalakkan olahraga di masyarakat dengan penyelenggaraan perlombaan
		3 Pembinaan terhadap peningkatan prestasi olahraga	3 Meningkatkan pembinaan cabang olahraga dengan memberikan insentif bagi cabang
20	STATISTIK	1 Profil daerah yang berkualitas harus senantiasa tersedia	1 Menyediakan profil daerah yang mudah diakses (pada website daerah)
		2 Ketersediaan Kabupaten dalam angka dan PDRB harus tepat waktu	2 Merekrut tenaga dalam pengambilan data untuk penyusunan data Kabupaten Data Membuat jejaring ke instansi untuk mengirimkan data yang dibutuhkan
21	PERSANDIAN	1 Jaringan komunikasi persandian belum tersedia	1 Membuat Jaringan komunikasi persandian
		2 Belum terdatanya aplikasi OPD secara menyeluruh	2 Mendata aplikasi OPD secara menyeluruh
22	PERPUSTAKAAN	1 Masih rendahnya minat baca masyarakat.	1 Melakukan sosialisasi Pemasarakatan literasi Kepada masyarakat dan sekolah tentang Penting Membaca Road Show Gerakan gemar membaca Bagi pelajar
		2 Ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan masih terbatas	2 Menyediakan sarana dan prasarana penunjang perpustakaan
		3 Regulasi tentang Perpustakaan belum berjalan secara maksimal	3 Mengusulkan Regulasi keperputakaan Membuat peraturan Bupati tentang Perpustakaan
23	KEARSIPAN	1 Belum memadainya SDM tentang kearsipan;.	1 Perlu penambahan petugas arsip daerah dan peningkatan kompetensinya dalam
		2 Sarana prasarana kearsipan masih terbatas	2 Menyediakan sarana dan prasarana penunjang kearsipan
		3 Regulasi tentang kearsipan belum berjalan secara	3 Mengusulkan Regulasi kearsipan Membuat peraturan Bupati tentang Kearsipan
24	KELAUTAN DAN PERIKANAN	1 Masih tingginya tingkat kerusakan hutan mangrove.	1 Sosialisasi sangat dibutuhkan kepada masyarakat dan perlu ditingkatkan intensitasnya agar masyarakat dapat
		2 Belum optimalnya pembinaan terhadap kelompok- kelompok petani pembudidaya dan	2 Pembinaan Kelompok petani Pembudidaya dan nelayan Peningkatan kinerja sumber daya manusia dan kelembagaan perikanan.



NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERMASALAHAN	SOLUSI
		3 Masih rendahnya pendapatan petani.	3 Bantuan dana dari pemerintah pusat masih sangat dibutuhkan Bantuan Pemasaran untuk hasil olah ikan. Peningkatan hasil pengolahan dan nilai tambah produk perikanan dan kelautan. Peningkatan produksi perikanan dan kelautan
		4 Sarana prasarana jalan produksi masih belum optimal	4 Menyediakan sarana dan prasarana jalan produksi
25	KEBUDAYAAN	1 Nilai – nilai budaya yang ada dalam masyarakat harus senantiasa	1 Perlunya meningkatkan pembinaan dengan sasaran pelaku seni generasi muda melalui berbagai ajang festival seni budaya daerah maupun pengiriman kontingen atau duta seni budaya ke luar daerah untuk menambah wawasan dan kreatifitas serta promosi seni budaya ke luar daerah.
		2 Ketersediaan dan SDM pelaku budaya masih sangat terbatas	
26	PARIWISATA	1 Belum optimalnya pengelolaan potensi pariwisata	1 Perlu adanya dukungan penambahan event/kegiatan pariwisata
		2 Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan tempat-tempat wisata belum maksimal	2 Pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat baik itu pelatihan/kursus bahasa, pembuatan produk dan kursus pendukung lainnya
		3 Pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata belum optimal	3 Lebih meningkatkan promosi wisata baik ditingkat nasional maupun manca negara.
27	PERTANIAN	1 Berkurangnya lahan / areal persawahan akibat alih fungsi lahan	1 Perlu dibuat regulasi Peraturan daerah tentang penguatan lahan pertanian dalam rangka mengatasi alih fungsi lahan akibat perkembangan kota maros. dan Cetak sawah baru
		2 Kontribusi sektor pertanian terhadap	2 Perlu dilakukan usaha-usaha peningkatan produksi padi dengan melakukan penerapan
		3 Wabah antraks masih sering terjadi,;	3 Sosialisasi pencegahan wabah antraks
		4 Produksi dan produktivitas perkebunan masih rendah	4 Pemenuhan sarana prasarana infrastruktur pertanian Pembinaan, pemberdayaan dan pendampingan bagi kelompok tani
28	PERDAGANGAN	1 Adanya perdagangan bebas yang menjadi tantangan bagi daerah;	1 Sosialisasi kepada pelaku usaha perdagangan tentang perdagangan bebas dan Bimbingan teknis tentang Daya Saing Pemanfaatan Inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam peningkatan produksi dan pemasaran produk usaha
		2 Sarana prasarana pasar tradisional belum memadai;	2 Penyediaan dan peningkatan sarana ekonomi, khususnya sektor perdagangan dan jasa termasuk perbaikan pasar tradisional
		3 Sarana prasarana pasar harus selalu terpelihara dan dalam kondisi yang Baik	3 Memberikan sosialisasi dan pemahaman tentang pemeliharaan sarana dan prasarana kepada pedagang pasar serta anggaran untuk pemeliharaan sarana dan prasarana pasar ditingkatkan
29	PERINDUSTRIAN	1 Terbatasnya lahan bagi industri berskala menengah dan besar;	1 Membuat regulasi Pengembangan Sentra Industri sebagai cikal bakal kawasan industri Maros yang terintegrasi dengan sumber bahan baku lokal dan pemasaran produksi hasil industri



NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERMASALAHAN	SOLUSI
		2 Industri- industri potensial harus senantiasa dikembangkan	2 Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan dan Produktivitas Pelaku sektor industri kreatif. Pengembangan hasil usaha kelompok usaha ekonomi masyarakat Peningkatan Kualitas SDM Usaha mikro dalam pengaplikasian teknologi tepat guna
		3 Belum terpromosinya industri-industri kecil;	3 Melakukan promosi hasil produksi masyarakat pelaku IKM (Industri kecil menengah) Pembentukan Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat dan Memantau serta mengembangkannya secara berkelanjutan. Membangun Show Room Untuk Hasil Olahan Masyarakat Pelaku IKM
30	TRANSMIGRASI	1 Animo masyarakat untuk bertransmigrasi lokal relatif rendah dan ketidakpastian	1 Menyelenggarakan Bimbingan dan fasilitasi serta sosialisasi ketransmigrasian
		2 Semakin rendahnya transmigrasi umum dan transmigrasi swakarya	2
32	KEPEGAWAIAN	1 Belum optimalnya kompetensi ASN yang sesuai dengan unit kerja Perangkat Daerah;	1 Peninjauan kembali terhadap kesesuaian lembaga/struktur OPD dengan tugas pokok dan fungsinya. Uji Kompetensi Jabatan struktural dan Fungsional Administrasi Mutasi ASN Peningkatan kapasitas dan kinerja sumberdaya manusia aparatur melalui pendidikan, pelatihan, uji kompetensi, pemberian reward, dan penerapan punishment.
		2 Masih belum optimalnya pembinaan disiplin dan terdapat ASN yang tidak disiplin di setiap unit kerja;	2 Penanganan kasus- kasus pelanggaran disiplin dan kode etik ASN Penegakan Disiplin Aparatur
		3 Jumlah ASN yang lebih besar daripada beban kerja yang terdapat pada setiap unit kerja utamanya yang berposisi sebagai tenaga administrator dan pengarsipan, sedangkan disisi lain ASN yang berposisi pada jabatan fungsional terutama tenaga pendidik, tenaga kependidikan, tenaga kesehatan dan tenaga fungsional tertentu belum mencukupi untuk memenuhi beban kerja yang ada.	3 Penyusunan Dokumen Analisa Beban Kerja Perekrutan/penerimaan CPNS dan P3K untuk jabatan fungsional Peningkatan kualitas, ketersediaan, dan pemanfaatan Data dan Informasi yang terpilah sebagai dasar dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian pemerintahan dan pembangunan Daerah.
33	PERENCANAAN	1 Integrasi perencanaan dan penganggaran yang belum optimal;	1 Pemanfaatan Teknologi informasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran
		2 Kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah belum optimal, disebabkan kurangnya kapasitas SDM perencana;	2 Peningkatan kapasitas tenaga perencana, baik di Bappeda maupun yang ada di masing-masing OPD melalui Diklat/Bimtek perencanaan



NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERMASALAHAN	SOLUSI
		3 Banyaknya amanat pemerintah untuk menyusun dokumen perencanaan multisektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbaru yang harus	3 Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah maupun lembaga kemsyarakatan lainnya
		4 Belum optimalnya kerjasama pembangunan dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat	
		5 Kurangnya ketersediaan data dan informasi untuk menunjang perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	6 Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi pembangunan daerah
34	KEUANGAN	1 Belum optimalnya pendapatan asli daerah khususnya yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah terlihat dari persentase besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD pada tahun sebelumnya	1 Mempersingkat Regulasi Pemungutan pajak Membuat Peraturan Tentang Mekanisme pajak BPHTB Pencatatan kembali Pajak Per-Tahun Melakukan Monitoring dan Evaluasi Melakukan sosialisasi Pajak
		2 Kurangnya penerapan standar pelayanan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam peningkatan kualitas pelayanan pemungutan pajak dan retribusi daerah	2 Dibuatkan aplikasi pelayanan pemungutan pajak (secara Online) Dibuatkan SOP standar pelayanan
		3 Belum optimalnya kualitas manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis accrual	3 Memberikan pelatihan kompetensi tentang manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis accrual



BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian Tugas Pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum.

Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa. Dana tugas pembantuan merupakan bagian anggaran kementerian/lembaga yang dialokasikan untuk daerah provinsi atau Kabupaten/kota dan/atau Desa, sesuai dengan beban dan jenis penugasan yang diberikan dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberi penugasan.

Pengalokasian dana tugas pembantuan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi, dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public, dan pembangunan di daerah, serta menciptakan keselarasan dan sinergi antara program dan kegiatan tugas pembantuan yang didanai oleh APBN.

3.1. Dasar hukum Penyelenggaraan tugas Pembantuan

Dasar hukum atau peraturan yang digunakan secara umum dalam pengelolaan pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi program/kegiatan tugas pembantuan adalah :

1. Undang – undang Nomor 5317 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional;
3. Undang – Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
4. Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja Keuangan Daerah; dan



6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

3.2. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan

3.2.1. Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Kabupaten Maros

Pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Maros tidak menerima anggaran Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat diakibatkan adanya refocusing anggaran dalam rangka penanggulangan pandemic COVID-19.

3.2.2. Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Kabupaten Maros

Pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Maros tidak menerima anggaran Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat diakibatkan adanya refocusing anggaran dalam rangka penanggulangan pandemic COVID-19.

3.3. Permasalahan dan Kendala

Adanya pandemi COVID-19 yang masih terjadi pada tahun 2021 mengakibatkan tidak adanya terlaksananya tugas pembantuan di Kabupaten Maros sehingga memunculkan suatu kendala tersendiri dalam pelaksanaan pembangunan pada daerah-daerah yang masih sangat membutuhkan anggaran tambahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan Masyarakat.

3.4. Saran dan Tindak Lanjut

Diharapkan untuk tahun 2022 ini, pemerintah melalui Kementerian tetap menganggarkan ataupun menyalurkan anggaran tugas pembantuan mengingat adanya tren penurunan angka kasus COVID-19 di Indonesia, sehingga hal tersebut dapat menjadi suatu hal yang bisa mendorong dan membantu daerah-daerah untuk dapat meningkatkan seluruh aspek yang berdampak baik kepada Masyarakat.



BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi pencapaian dan penerapan SPM yang dilaksanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sampai dengan akhir tahun anggaran sesuai target yang telah ditetapkan oleh Kementerian / Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) pusat masing-masing bidang SPM dan diharapkan setiap SKPD dapat mengintegrasikan program kegiatan SPM tersebut ke dalam dokumen perencanaan pelaksanaan kegiatan setiap tahunnya. Kegiatan ini sangat penting karena indikator-indikator yang terdapat pada setiap bidang SPM merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat.

Penerapan dan pencapaian ini dimaksudkan untuk memenuhi regulasi yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri Nomor 100/1023/SJ Tentang Percepatan Pelaksanaan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di daerah, tertanggal 26 Maret 2012 bahwa setiap Pemerintahan Daerah harus melaporkan kegiatan SPMnya kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah.

Penerapan dan pencapaian ini juga memberikan informasi mengenai capaian kinerja pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang harus dilaksanakan oleh seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia sesuai amanat yang termaktub dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta secara teknis dijelaskan secara rinci melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Pemahaman yang akurat mengenai kondisi/status penerapan dan pencapaian SPM di Kabupaten Maros, sangat membantu penyusunan rencana pencapaian SPM yang lebih realistis dan dapat dicapai. Hal ini dimulai dengan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi terkait pencapaian SPM di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disajikan dalam bentuk profil pelayanan dasar.



Profil singkat pelayanan dasar Kabupaten Maros merupakan sekumpulan data dan informasi yang dikumpulkan, distrukturkan dan diolah untuk menggambarkan kondisi pelayanan dasar sebagai bahan masukan dalam menyusun dan mengembangkan rencana pencapaian SPM ke depan. Profil pelayanan dasar disusun melalui pengumpulan data dan informasi pencapaian SPM di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sudah tersedia dan/atau data dan informasi yang dihasilkan dari proses diskusi yang dilakukan selama proses penggalian data dan informasi di Kabupaten Maros.

Profil pelayanan dasar menggambarkan kondisi pencapaian SPM di Kabupaten Maros melalui data dan informasi yang dikumpulkan oleh setiap SKPD pemangku SPM dan pemangku kepentingan. Proses pengumpulan data dan informasi melibatkan semua pemangku kepentingan terkait. Penyusunan profil difokuskan kepada data dan informasi merujuk pada indikator-indikator SPM.

Di bawah ini akan diuraikan kompilasi masing-masing bidang SPM yang terdiri atas kriteria indikator yang belum, sudah memenuhi dan melampaui dari target nasional yang telah ditetapkan. Kriteria tersebut diperoleh berdasarkan hasil analisa dalam pengumpulan data dan informasi sesuai dengan indikator bidang masing masing SPM. Hasil analisis untuk kriteria setiap Jenis Pelayanan Dasar SPM dan setiap indikator sebagai berikut :

4.1. Bidang Urusan Pendidikan

4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar bidang urusan pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Maros terdiri atas :

a. Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan anak usia dini merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

b. Pelayanan Pendidikan Dasar

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan dasar merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.

c. Pelayanan Pendidikan Kesetaraan



Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan kesetaraan merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

4.1.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Maros tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.1
Target Pencapaian SPM Urusan Pendidikan
Dinas Pendidikan Kabupaten Maros Tahun 2021

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Layanan	Jumlah Orang Yang Akan Mendapatkan Layanan	Capaian = (5): (4) x 100%
1	2	3	4	5	6
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	14.826	14.826	100 %
2	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	65.517	65.517	100 %
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	236	236	100

4.1.3. Realisasi

Realisasi target pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Maros tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel. 2.2
Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pendidikan
Dinas Pendidikan Kabupaten Maros Tahun 2021

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Layanan	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Layanan	Capaian = (5): (4) x 100%
1	2	3	4	5	6
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	14.826	10.744	72,47 %
2	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	65.517	70.250	107,22 %
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	236	192	81 %

Sumber data Dinas Pendidikan

4.1.4. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran untuk pemenuhan SPM bidang Urusan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Maros tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.2.3
Alokasi Anggaran SPM Dinas Pendidikan Kabupaten Maros Tahun 2021

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran	Realisasi	% Realisasi	Sumber Dana
1	2	4	5	6	
1	Pendidikan Anak Usia Dini	6.069.821.000	5.687.527.000	93,70 %	APBD
2	Pendidikan Dasar	95.735.491.171,88	91.126.205.836	95,18 %	APBD
3	Pendidikan Kesetaraan	1.039.543.200	576.180.000	55,43 %	APBD
Total Anggaran SPM		102.844.855.371,88	97.389.912.836	94,69 %	
Total Anggaran SKPD		379.850.339.814	368.440.120.769	96,99 %	



Persentase Alokasi Anggaran SPM	27,07 %	26,43 %		
--	----------------	----------------	--	--

4.1.5. Dukungan Personil

Sumber daya Aparatur pada Dinas Pendidikan Kabupaten Maros dalam rangka mendukung pemenuhan SPM bidang urusan pendidikan digambarkan sebagai berikut :

Tabel. 2.4
Daftar Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Maros Berdasarkan Golongan

NO	GOL	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	GOL. IV	40	17	57
2	GOL. III	25	28	53
3	GOL. II	13	8	21
4	GOL. I	1	0	1
	JUMLAH	79	53	132

Sumber data BPKSDM

a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidik PAUD yang ada di Kabupaten Maros digambarkan pada tabel berikut :

Tabel. 2.5
Daftar Guru PAUD Kabupaten Maros Berdasarkan Jenis PAUD

No.	Kecamatan	TK	RA	KAB	TPA	SPS	JUMLAH
1	Bantimurung	39	7	6			
2	Camba	26	0	4			
3	Cenrana	15	0	24			
4	Mallawa	27	0	2			
5	Mandai	47	10	18			
6	Maros Baru	15	3	32			
7	Bontoa	12	5	41			
8	Marusu	31	4	11			
9	Moncongloe	43	5	13			
10	Simbang	26	9	21			
11	Tanralili	18	11	39			
12	Tompobulu	0	3	25			
13	Lau	18	6	13			
14	Turikale	46	24	17	3		
	JUMLAH	363	87	266	3		

Sumber data Dinas Pendidikan



Sedangkan Pemilik PAUD yang ada di Kabupaten Maros digambarkan pada tabel berikut :

Tabel. 2.6
Daftar Pemilik PAUD Kabupaten Maros Berdasarkan Wilayah

No.	Wilayah Kecamatan	Pemilik PAUD		
		L	P	JUMLAH
1	Turikale	2	1	3
2	Maros Baru	-	2	2
3	Mandai	2	-	2
4	Bontoa	3	-	3
5	Lau	1	-	1
6	Tanralili	2	1	3
7	Tompobulu	1	-	1
8	Moncongkoe	1	-	1
9	Bantimurung	1	-	1
10	Simbang	2	-	2
11	Cenrana	1	-	1
12	Camba	2	-	2
13	Mallawa	2	-	2
14	Marusu	1	-	1
	JUMLAH	21	4	25

Sumber data Dinas Pendidikan

Secara umum jumlah Lembaga dan jumlah peserta didik dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.7
Jumlah Lembaga PAUD Kabupaten Maros

No.	Kecamatan	TK	RA	KAB	TPA	SPS	JUMLAH
1	Bantimurung	12	2	3	-		
2	Camba	13	-	2	-		
3	Cenrana	7	-	8	-		
4	Lau	7	4	4	-		



5	Mallawa	10	-	2	-		
6	Mandai	14	5	10	-		
7	Maros Baru	7	1	13	-		
8	Bontoa	5	1	17	-		
9	Marusu	11	1	4	-		
10	Moncongloe	15	1	9	-		
11	Simbang	9	3	10	-		
12	Tanralili	8	3	19	-		
13	Tompobulu	0	1	12	-		
14	Turikale	16	8	10	2		
	JUMLAH	134	30	123	2		

Sumber data Dinas Pendidikan

Tabel.2.8
Jumlah Peserta Didik PAUD Kabupaten Maros

No.	Kecamatan	TK	RA	KAB	TPA	SPS	JUMLAH
1	Bantimurung	506	22	109	-		
2	Camba	331	0	54	-		
3	Cenrana	205	0	226	-		
4	Lau	271	84	184	-		
5	Mallawa	327	0	56	-		
6	Mandai	512	227	237	-		
7	Maros Baru	234	46	412	-		
8	Bontoa	225	25	547	-		
9	Marusu	417	37	174	-		
10	Moncongloe	501	38	132	-		
11	Simbang	251	75	250	-		
12	Tanralili	322	98	518	-		
13	Tompobulu	0	10	430	-		
14	Turikale	504	223	199	55		
	JUMLAH	4606	885	3528	55		

Sumber data Dinas Pendidikan



b. Pendidikan Dasar

Jumlah guru SD sebagai berikut :

Tabel 2.9
Daftar Guru SD Kabupaten Maros Tahun 2021

No.	Wilayah Kecamatan	Guru SD		Jumlah
		L	P	
1	Bantimurung	85	191	276
2	Camba	57	115	172
3	Cenrana	57	115	172
4	Lau	48	151	199
5	Mallawa	58	96	154
6	Mandai	67	230	297
7	Maros Baru	50	134	184
8	Bontoa	84	165	249
9	Marusu	69	127	196
10	Moncongloe	31	73	104
11	Simbang	58	139	197
12	Tanralili	55	160	215
13	Tompobulu	52	88	140
14	Turikale	76	265	341
	JUMLAH	847	2.049	2.896

Sumber data Dinas Pendidikan

Tabel 2.10
Daftar Guru SMP Kabupaten Maros

No.	Wilayah Kecamatan	Guru SMP		
		L	P	JUMLAH
1	Bantimurung	46	84	130
2	Camba	46	52	98
3	Cenrana	46	52	98
4	Lau	45	98	143
5	Mallawa	36	35	71
6	Mandai	28	121	149
7	Maros Baru	33	55	88
8	Bontoa	39	58	97



9	Marusu	40	51	91
10	Moncongloe	43	43	86
11	Simbang	39	57	96
12	Tanralili	20	40	60
13	Tompobulu	28	40	68
14	Turikale	42	102	144
	JUMLAH	531	888	1.419

Sumber data Dinas Pendidikan

Tabel. 2.11
Total Guru SD dan SMP Kabupaten Maros

No.	Wilayah Kecamatan	Total Guru SD dan SMP		
		L	P	JUMLAH
1	Bantimurung	131	275	406
2	Camba	103	167	270
3	Cenrana	103	167	270
4	Lau	93	249	342
5	Mallawa	94	131	225
6	Mandai	95	351	446
7	Maros Baru	83	189	272
8	Bontoa	123	223	346
9	Marusu	109	178	287
10	Moncongloe	74	116	190
11	Simbang	97	196	293
12	Tanralili	75	200	275
13	Tompobulu	80	128	208
14	Turikale	118	367	485
	JUMLAH	1.378	2.937	4.315

Sumber data Dinas Pendidikan



Tabel. 2.12
Daftar Guru MI Kabupaten Maros

No.	Wilayah Kecamatan	Guru MI		Jumlah
		L	P	
1	Bantimurung	6	4	10
2	Camba	2	7	9
3	Cenrana	2	1	3
4	Lau	1	11	12
5	Mallawa	5	2	7
6	Mandai	9	29	38
7	Maros Baru	4	13	17
8	Bontoa	2	9	11
9	Marusu	8	19	27
10	Moncongloe	3	6	9
11	Simbang	7	18	25
12	Tanralili	2	10	12
13	Tompobulu	19	25	44
14	Turikale	16	43	59
	JUMLAH	86	197	283

Sumber data Dinas Pendidikan

Tabel. 2.13
Daftar Guru MTs Kabupaten Maros

No.	Wilayah Kecamatan	Guru MTs		
		L	P	JUMLAH
1	Bantimurung	22	44	66
2	Camba	8	15	23
3	Cenrana	6	8	14
4	Lau	38	57	95
5	Mallawa	0	0	0
6	Mandai	41	26	67
7	Maros Baru	14	20	34
8	Bontoa	16	15	31
9	Marusu	19	21	40
10	Moncongloe	6	10	16



11	Simbang	27	40	67
12	Tanralili	10	17	27
13	Tompobulu	23	25	48
14	Turikale	11	30	41
	JUMLAH	241	328	569

Sumber data Dinas Pendidikan

Tabel. 2.14
Total Guru MI dan MTS Kabupaten Maros Tahun 2021

No.	Wilayah Kecamatan	Total Guru MI dan Guru MTS		
		L	P	JUMLAH
1	Bantimurung	28	48	76
2	Camba	10	22	32
3	Cenrana	8	9	17
4	Lau	39	68	107
5	Mallawa	5	2	7
6	Mandai	50	55	105
7	Maros Baru	18	31	49
8	Bontoa	18	27	45
9	Marusu	27	46	73
10	Moncongloe	9	16	25
11	Simbang	34	58	92
12	Tanralili	12	27	39
13	Tompobulu	42	50	92
14	Turikale	27	73	100
	JUMLAH	327	530	857

Sumber data Dinas Pendidikan

Sedangkan Pengawas Sekolah yang ada di Kabupaten Maros digambarkan pada tabel berikut :

Tabel. 2.15
Daftar Pengawas SD Sekabupaten Maros Berdasarkan Wilayah

No.	Wilayah Kecamatan	Pengawas SD		
		L	P	JUMLAH
1	Mallawa	1	1	2



2	Camba	2	-	2
3	Cenrana	2	-	2
4	Simbang	1	1	2
5	Bantimurung	2	1	3
6	Turikale	1	1	2
7	Tompobulu	2	-	2
8	Maros Baru	2	-	2
9	Lau	1	1	2
10	Bontoa	2	1	3
11	Marusu	1	1	2
12	Mandai	1	-	1
13	Tanralili	2	-	2
14	Moncongloe	1	-	1
	JUMLAH	21	7	28

Sumber data Dinas Pendidikan

Tabel. 2.16
Daftar Pengawas SMP Kabupaten Maros Berdasarkan Bidang Studi

No.	Bidang Studi	Pengawas SMP		
		L	P	Jumlah
1	Matematika	1	-	1
2	IPA	2	-	2
3	IPS	-	-	-
4	Bahasa Inggris	2	-	2
5	Bahasa Indonesia	-	-	-
6	PKN	1	-	1
7	PAI	-	-	-
8	Seni Budaya	-	-	-
9	Prakarya	-	-	-
10	Muatan Lokal	-	-	-
11	Penjaskes	-	-	-
	JUMLAH	6	-	6

Sumber data Dinas Pendidikan



Secara umum kondisi Pendidikan di Kabupaten Maros dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Satuan Pendidikan Dasar

Tabel.2.17
Jumlah Sekolah Kabupaten Maros Tahun 2021

NO	Uraian	Jumlah Sekolah	Keterangan
1	SD	240	
2	MI	28	
3	SMP	74	
4	MTs	44	
	TOTAL	386	

Sumber data Dinas Pendidikan

2. Peserta Didik

Tabel.2.18
Jumlah Peserta Didik Kabupaten Maros Tahun 2021

NO	Uraian	Jumlah Peserta Didik	Keterangan
1	SD	41.231	
2	MI	5.909	
	Jumlah	47.140	
3	SMP	15.450	
4	MTs	4.978	
	Jumlah	20.269	
	TOTAL	67.409	

Sumber data Dinas Pendidikan

3. Ruang Kelas

Tabel 2.19
Jumlah Ruang Kelas Kabupaten Maros Tahun 2021

NO	Uraian	Jumlah Ruang Kelas	Keterangan
1	SD	1.724	
2	MI	203	



3	SMP	576	
4	MTs	229	
	TOTAL	2.802	

Sumber data Dinas Pendidikan

4. Rombongan Belajar

Tabel 2.20
Jumlah Rombongan Belajar Kabupaten Maros Tahun 2021

NO	Uraian	Jumlah Rombongan Belajar	Keterangan
1	SD	1.766	
2	MI	0	
3	SMP	579	
4	MTs	0	
	TOTAL	2.345	

Sumber data Dinas Pendidikan

5. Rasio Rombel Dengan Siswa

Tabel.2.21
Rasio Rombel Dengan Siswa Kabupaten Maros Tahun 2021

NO	Uraian	Rasio Rombel dengan Siswa	Keterangan
1	SD	21,80	
2	MI	0	
3	SMP	26,82	
4	MTs	0	

Sumber data Dinas Pendidikan

6. Rasio Guru Dengan Siswa

Tabel.2.22
Rasio Guru Dengan Siswa Kabupaten Maros Tahun 2021

NO	Uraian	Rasio Guru dengan Siswa	Keterangan
1	SD	16,93	



2	MI	11,02	
3	SMP	12,36	
4	MTs	9,15	

Sumber data Dinas Pendidikan

c. Pendidikan Kesetaraan

Daftar Tutor Kesetaraan yang ada di Kabupaten Maros digambarkan pada tabel berikut :

Tabel. 2.23
Daftar Tutor Paket A Kabupaten Maros

No.	Wilayah Kecamatan	Tutor Paket A		
		L	P	JUMLAH
1	Bantimurung	-	4	4
2	Camba	-	-	-
3	Cenrana	-	4	4
4	Lau	-	-	-
5	Mallawa	-	-	-
6	Mandai	5	4	9
7	Maros Baru	-	-	-
8	Bontoa	-	-	-
9	Marusu	-	-	-
10	Moncongloe	-	-	-
11	Simbang	-	-	-
12	Tanralili	1	3	4
13	Tompobulu	2	3	5
14	Turikale	-	-	-
	JUMLAH	8	18	26

Sumber data Dinas Pendidikan

Tabel. 2.24
Daftar Tutor Paket B Kabupaten Maros

No.	Wilayah Kecamatan	Tutor Paket B		
		L	P	JUMLAH
1	Bantimurung	4	5	



2	Camba	-	-	
3	Cenrana	1	5	
4	Lau	1	5	
5	Mallawa	-	-	
6	Mandai	4	3	
7	Maros Baru	-	-	
8	Bontoa	-	-	
9	Marusu	-	-	
10	Moncongloe	-	-	
11	Simbang	-	-	
12	Tanralili	-	-	
13	Tompobulu	2	5	
14	Turikale	-	-	
	JUMLAH	12	23	

Sumber data Dinas Pendidikan

Tabel. 2.25
Daftar Tutor Paket C Kabupaten Maros

No.	Wilayah Kecamatan	Tutor Paket C		
		L	P	JUMLAH
1	Bantimurung	5	6	
2	Camba	-	-	
3	Cenrana	2	5	
4	Lau	2	5	
5	Mallawa	-	-	
6	Mandai	6	5	
7	Maros Baru	-	-	
8	Bontoa	-	-	
9	Marusu	-	-	
10	Moncongloe	-	-	
11	Simbang	-	-	
12	Tanralili	3	8	
13	Tompobulu	3	7	
14	Turikale	-	-	
	JUMLAH	21	36	

Sumber data Dinas Pendidikan



Gambaran Pendidikan Kesetaraan yang ada di Kabupaten Maros, dapat dilihat pada tabel berikut :

1. Lembaga yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan

Tabel. 2.26
Lembaga Yang Penyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan
Di Kabupaten Maros

NO	LEMBAGA	KECAMATAN	STATUS LEMBAGA	
			NEGERI	SWASTA
1	SKB/SPNF BANTIMURUNG	Bantimurung	√	-
2	PKBM MAWAR	Lau	-	√
3	PKBM MATTIRO SAWE	Mandai	-	√
4	PKBM TANRALILI	Tanralili	-	√
5	PKBM TOMPOBULU	Tompobulu	-	√
6	PKBM DELIA CENRANA	Cenrana	-	√

Sumber data Dinas Pendidikan

2. Warga belajar

Tabel 2.27
Jumlah Peserta Paket A Kabupaten Maros Tahun 2021

No.	Wilayah Kecamatan	Jumlah Peserta Didik
1	Bantimurung	0
2	Camba	0
3	Cenrana	5
4	Lau	0
5	Mallawa	0
6	Mandai	0
7	Maros Baru	0
8	Bontoa	0



9	Marusu	0
10	Moncongloe	0
11	Simbang	0
12	Tanralili	15
13	Tompobulu	2
14	Turikale	0
	JUMLAH	39

Sumber data Dinas Pendidikan

Tabel 2.28
Jumlah Peserta Paket B Kabupaten Maros Tahun 2021

No.	Wilayah Kecamatan	Jumlah Peserta Didik
1	Bantimurung	5
2	Camba	0
3	Cenrana	5
4	Lau	3
5	Mallawa	0
6	Mandai	6
7	Maros Baru	0
8	Bontoa	0
9	Marusu	0
10	Moncongloe	0
11	Simbang	21
12	Tanralili	6
13	Tompobulu	1
14	Turikale	4
	JUMLAH	51

Sumber data Dinas Pendidikan

Tabel 2.29
Jumlah Peserta Paket C Kabupaten Maros Tahun 2021

No.	Wilayah Kecamatan	Jumlah Peserta Didik
1	Bantimurung	5
2	Camba	0
3	Cenrana	13
4	Lau	1
5	Mallawa	0
6	Mandai	6
7	Maros Baru	0
8	Bontoa	0
9	Marusu	0
10	Moncongloe	0
11	Simbang	33



12	Tanralili	22
13	Tompobulu	6
14	Turikale	5
	JUMLAH	36

Sumber data Dinas Pendidikan

3. Ruang kelas

Tabel 2.30

Jumlah Ruang Kelas SPNF dan PKBM Kabupaten Maros

No.	Wilayah Kecamatan	Jumlah Ruang Belajar	Keterangan
1	SKB/SPNF BANTIMURUNG	7	
2	PKBM MAWAR	3	
3	PKBM MATTIRO SAWE	7	
4	PKBM TANRALILI	3	
5	PKBM TOMPOBULU	6	
6	PKBM DELIA CENRANA	7	
	JUMLAH	33	

Sumber data Dinas Pendidikan

4. Rombongan belajar

Tabel 2.31

Jumlah Rombongan Belajar Kesetaraan Kabupaten Maros

No.	Wilayah Kecamatan	Jumlah Rombel	Keterangan
1	SKB/SPNF BANTIMURUNG	7	
2	PKBM MAWAR	3	
3	PKBM MATTIRO SAWE	7	
4	PKBM TANRALILI	2	
5	PKBM TOMPOBULU	6	



6	PKBM DELIA CENRANA	7	
	JUMLAH	32	

Sumber data Dinas Pendidik

4.1.6. Permasalahan dan Solusi

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan, maka telah dilakukan identifikasi permasalahan terkait dengan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan sebagai berikut :

No	Tahapan	Permasalahan	Langkah Penyelesaian
1.	Pengumpulan Data	a. Struktur Pendataan yang belum terstandarisasi b. Entri data/penginputan data yang tidak konsisten. c. ketidakakuratan data / informasi yang diperoleh dari pengelola data. d. Adanya Perbedaan data dari beberapa indicator. e. terdapatnya informasi ganda dalam pengumpulan dan pengolahan data.	Menyiapkan Standarisasi permintaan kebutuhan data pada Organisasi yang terkait dengan SPM Bidang Pendidikan.
2.	Penghitungan Kebutuhan	a. Perhitungan Anak tidak Sekolah yang dilakukan <i>by name by adress</i> b. Perhitungan kebutuhan biaya Pendidikan yang harus disesuaikan dengan jumlah pagu anggaran yang dikelola OPD c. Perhitungan jumlah tenaga pendidik pada setiap wilayah. d. Perhitungan kebutuhan penanganan social bagi anak putus sekolah belum memadai.	a. Perhitungan Kebutuhan Anak tidak sekolah memungkinkan untuk dilakukan oleh pihak ketigayang secara khusus menangani/ mengumpulkan data anak tidak sekolah. b. Menyesuaikan jumlah siswa, sekolah dan tenaga pendidik yang terdapat dalam satu wilayah.
3.	Perencanaan Dan	a. Belum terakomodirnya beberapa program dan	Memaksimalkan Program dan



	Penganggaran	kegiatan dalam pemenuhan standar pelayanan minimal. b. Ketersediaan anggaran yang belum maksimal dalam penanganan Anak Tidak sekolah.	kegiatan dalam pemenuhan SPM. Mengalokasikan dana/ Anggaran
4.	Pelaksanaan	a. Aspek pelayanan pemenuhan SPM yang terkendala oleh wilayah/ lokasi pemenuhan. b. Pengurangan Anggaran yang disebabkan oleh bebepa factor sehingga beberapa layanan tidak dapat dapat dipenuhi. c. Minimannya sumberdaya yang tersedia	Pengalokasian Anggaran dalam pemenuhan layanan SPM perlu dimaksimalkan.
5.	Pelaporan	-	-
6.	Lain-lain	-	-

4.2. Bidang Urusan Kesehatan

4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar bidang urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Maros tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- b. Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- c. Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- d. Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita
- e. Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
- f. Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif
- g. Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
- h. Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
- i. Cakupan Pelayanan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
- j. Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
- k. Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV



4.2.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM bidang urusan kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Maros tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.32
Target Pencapaian SPM Urusan Kesehatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Maros Tahun 2021

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Layanan	Jumlah Orang Yang Akan Mendapatkan Layanan	Capaian = (5): (4) x 100%
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Standar	7.846	7.846	100 %
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	jumlah ibu hamil yang mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes)	7.490	7.490	100 %
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	jumlah bayi baru lahir umur 0 - 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	7.490	7.490	100 %
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang berumur 0 – 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan	35.651	35.651	100 %
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	61.295	61.295	100 %
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah orang berusia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	232.844	232.844	100 %



7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah orang berusia lebih dari 60 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	34.509	34.509	100 %
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	73.718	73.718	100 %
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Diabet Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	4.843	4.843	100 %
10	Pelayanan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang dengan gangguan Jiwa (ODG) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	822	822	100 %
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang orang terduga Tuberkulosis (TBC) yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	5.098	5.098	100 %
12	Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang orang terduga beresiko Terinfeksi virus HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	12.497	12.497	100 %

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros

4.2.3. Realisasi

Realisasi pencapaian SPM bidang urusan kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Maros tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel. 2.36
Realisasi Capaian SPM urusan kesehatan
Dinas Kesehatan Kab. Maros Tahun 2021

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Layanan	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Layanan	Capaian = (5): (4) x 100%
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Standar	7.846	6.715	85,59 %
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	jumlah ibu hamil yang mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes)	7.490	6.795	90,72 %
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	jumlah bayi baru lahir umur 0 - 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	7.490	6.774	90,44%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang berumur 0 – 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan	35.651	20.612	57,82 %
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	61.295	38.750	63,22 %
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah orang berusia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	232.844	99.260	42,63 %
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah orang berusia lebih dari 60 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	34.509	27.782	80,51 %



8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	73.718	17.022	23,09 %
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Diabet Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	4.843	3.251	67,13 %
10	Pelayanan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang dengan gangguan Jiwa (ODG) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	822	812	98,80 %
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga Tuberkulosis (TBC) yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	5.098	1.716	33,66 %
12	Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga beresiko Terinfeksi virus HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	12.497	7.471	59,78 %

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros

4.2.4. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran SPM urusan kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Tabel. 2.37
Alokasi Anggaran SPM urusan kesehatan
Dinas Kesehatan Kab. Maros Tahun 2021

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran	Realisasi	% Realisasi	Sumber Dana
1	2	4	5	6	
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.011.450.000	906.175.000	89,59	DAK NF (BOK)
2	Pelayanan kesehatan Ibu bersalin	1.168.677.000	573.663.907	49,09	DAK NF (BOK)
3	Pelayanan kesehatan Bayi baru lahir	68.410.000	51.300.000	74,99	DAK NF (BOK)
4	Pelayanan kesehatan Balita	820.551.200	659.901.200	80,06	DAK NF (BOK)
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	386.309.800	314.210.000	81,34	DAK NF (BOK)
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	0	0	0%	DAK NF (BOK)
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	292.710.000	264.720.000	90,44	DAK NF (BOK)
8	Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi				DAK NF (BOK)
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus (DM)	0	0	0%	
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	0	0	0%	DAK NF (BOK)
11	Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis	174.630.000	138.840.000	79,51	DAK NF (BOK)
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	129.750.000	111.110.000	85,63	DAK NF (BOK)
Total Anggaran SPM		4.210.118.000	3.031.575.107	72,01	
Total Anggaran SKPD					
Persentase Alokasi Anggaran SPM					

4.2.5. Dukungan Personil

Sumber daya Aparatur pada Dinas Kesehatan Kabupaten Maros dalam rangka mendukung pemenuhan SPM bidang urusan kesehatan digambarkan sebagai berikut :



1. Pegawai Struktural

-	S2	65	orang
-	S1	275	orang
-	Diploma I	3	orang
-	Diploma III	290	orang
-	Diploma IV	40	orang
-	SMU	129	orang
-	SLTP	2	orang
-	SD	2	orang
	Jumlah	806	orang

- Pegawai Fungsional

-	Dinas Kesehatan	85	orang
-	Puskesmas	721	orang
	Jumlah	806	orang

2. Berdasarkan Pangkat dan Golongan

-	Golongan IV	137	orang
-	Golongan III	438	orang
-	Golongan II	230	orang
-	Golongan I	1	orang
	Jumlah	806	orang

3. Berdasarkan Jabatan Struktural

-	Eselon II	1	orang
-	Eselon III	5	orang
-	Eselon IV	15	orang
	Jumlah	21	orang

4.2.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan SPM Bidang Kesehatan Di Kabupaten Maros pada tahun 2021 dapat dilihat sebagai berikut:

No	Tahapan	Permasalahan	Langkah Penyelesaian
1.	Pengumpulan Data	a. SDM Puskesmas terbatas dan memegang program rangkap sehingga pengumpulan data untuk beberapa Puskesmas tidak tepat	a. Melakukan Monev secara berkala kepada pemegang program di Puskesmas agar dapat melakukan



		waktu b. Data yang tidak konsisten dari penanggung program di Dinas Kesehatan sehingga masih dilakukan penginputan berulang pada Aplikasi SPM Kemenkes.	pengumpulan data tepat waktu ke Dinas Kesehatan. b. Melakukan verifikasi data sebelum melakukan penginputan pada Aplikasi SPM Kemenkes
2.	Penghitungan Kebutuhan	-	-
3.	Perencanaan Dan Penganggaran	a. Indikator SPM belum menggunakan costing SPM b. Proses pencairan Anggaran yang panjang c. Penganggaran kegiatan mengalami pengurangan dikarenakan pengalihan anggaran untuk penanganan Covid-19.	a. Penggunaan Aplikasi SISCOBIKES b. Penyederhanaan proses pencairan Anggaran c. Mengefisiensikan kegiatan dan memilah dengan memprioritaskan kegiatan SPM.
4.	Pelaksanaan	a. Pemanfaatan rumah tunggu kelahiran (RTK) yang belum maksimal b. Karena kondisi pandemi Covid-19, pelaksanaan pelayanan Posyandu menurun karena banyak ibu-ibu yang takut datang ke fasilitas kesehatan dan Banyak masyarakat (Lansia) yang merasa takut untuk berkunjung ke fasilitas Kesehatan c. Pembelajaran secara tatap muka belum rutin dilaksanakan sehingga petugas kesehatan kesulitan untuk melakukan skrining secara langsung d. Pembatasan kegiatan semasa pandemi Covid-19 sehingga Posbindu PTM berupa skrining hanya dapat dilakukan di dalam	a. Sosialisasi tentang fungsi RTK b. Memanfaatkan WA/Telepon untuk memberikan informasi dan pengetahuan c. Melakukan janji temu. d. Pelaksanaan kegiatan selama Pandemi Covid-19, dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan e. Sosialisasi tentang fungsi RTK f. Memanfaatkan WA/Telepon untuk memberikan informasi dan pengetahuan g. Melakukan janji temu h. Pelaksanaan kegiatan selama Pandemi Covid-



		<p>Puskesmas</p> <p>e. Pemanfaatan rumah tunggu kelahiran (RTK) yang belum maksimal</p> <p>f. Karena kondisi pandemi Covid-19, pelaksanaan pelayanan Posyandu menurun karena banyak ibu-ibu yang takut datang ke fasilitas kesehatan dan Banyak masyarakat (Lansia) yang merasa takut untuk berkunjung ke fasilitas Kesehatan</p> <p>g. Pembelajaran secara tatap muka belum rutin dilaksanakan sehingga petugas kesehatan kesulitan untuk melakukan skrining secara langsung</p> <p>h. Pembatasan kegiatan semasa pandemi Covid-19 sehingga Posbindu PTM berupa skrining hanya dapat dilakukan di dalam Puskesmas</p> <p>i. Pelayanan pasien ODGJ di masa pandemi Covid-19 hanya dilakukan di Puskesmas</p> <p>j. Kepatuhan meminum obat bagi penderita TB yang belum maksimal.</p> <p>k. Masih terdapat stigma dan diskriminasi di masyarakat tentang HIV I. Bahan medis habis pakai (BMHP) yang berkaitan dengan indikator SPM dari Dinas Kesehatan belum mencukupi untuk pemeriksaan pelayanan kesehatan di Puskesmas</p>	<p>19, dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan</p> <p>i. Tenaga kesehatan melakukan kunjungan rumah untuk keadaan darurat dengan protokol kesehatan yang berlaku.</p> <p>j. Perlu adanya pendamping minum obat (PMO) dari keluarga pasien TB.</p> <p>k. Penyebaran informasi tentang HIV dan skrining kepada sasaran usia muda (Anak sekolah dan Kuliah), usia produktif (para pekerja di instansi/pabrik yang masih kurang terpapar informasi tentang HIV)</p> <p>l. Membuat Rencana Anggaran Belanja (RAB) BMHP.</p>
5.	Pelaporan	-	-



6.	Lain-lain		
----	-----------	--	--

4.3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar urusan pekerjaan umum yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maros tahun 2021 terdiri dari :

a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari

Rumah Tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum.

b. Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik

Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik kabupaten/kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.

4.3.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM bidang urusan pekerjaan umum yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maros tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.38
Target Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum
Dinas PUPR Kabupaten Maros Tahun 2021

N O	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapat kan Layanan	Jumlah Orang Yang Akan Mendapa tkan Layanan	Capaian = (5): (4) x 100%
1	2	3	4	5	6
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum	2.445	2.445	100 %



		sehari-hari			
2	Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang berhak memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	3.000	3.000	

4.3.3. Realisasi

Realisasi pencapaian SPM bidang urusan pekerjaan umum yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maros tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.39
Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum
Dinas PUPR Kabupaten Maros Tahun 2021

N O	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Layanan	Jumlah Orang Yang Akan Mendapatkan Layanan	Capaian = (5): (4) x 100%
1	2	3	4	5	6
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	2.445	2.295	93,87%
2	Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang berhak memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	3.000	2.900	96,67%

Sumber data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

4.3.4. Alokasi Anggaran



Alokasi Anggaran SPM bidang urusan pekerjaan umum yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maros tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.40
Alokasi Anggaran SPM Urusan Pekerjaan Umum
Dinas PUPR Kabupaten Maros Tahun 2021

N O	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran	Realisasi	% Realisa si	Sum ber Dana
1	2	4	5	6	
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	8.063.248.000	7.643.375.123,51	94,79%	APB D
2	Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik	5.499.224.550	5.385.806.550	97.94%	APB D
Total Anggaran SPM		13.562.472.550	13.029.181.673,51	97,94	
Total Anggaran SKPD		275.525.120.556	225.038.456.694,74	81.68	
Persentase Alokasi Anggaran SPM		4,92%	5,79%		

Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Maros

4.3.5. Dukungan Personil

Sumber daya Aparatur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maros dalam rangka mendukung pemenuhan SPM bidang urusan pekerjaan umum digambarkan sebagai berikut :

1. . Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

- Pegawai Struktural

SD	=	- Orang
SMP	=	1 Orang
SMU	=	30 Orang
Diploma	=	5 Orang
S1	=	52 Orang
S2	=	12 Orang



Jumlah = 100 Orang

2. Berdasarkan Jabatan Struktural

Eselon II = 0 Orang

Eselon III = 6 Orang

Eselon IV = 19 Orang

Jumlah = 25 Orang

4.3.6. Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan dan Langkah Penyelesaian terhadap proses penerapan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

No	Tahapan	Permasalahan	Langkah Penyelesaian
1.	Pengumpulan Data	Perbedaan data	Perlu selalu dilakukan koordinasi dengan instansi/stakeholder
2.	Penghitungan Kebutuhan	Kurangnya dokumen perencanaan pendukung dan tidak semua data dasar tersedia serta data cenderung kurang update	Pembuatan dokumen pendukung serta perlu kejelasan tugas dan kewenangan pihak penyedia data
3.	Perencanaan Dan Penganggaran	Belum optimalnya system perencanaan penyediaan air minum dan terbatasnya pendanaan untuk penerapan SPM	Peningkatan kapasitas SDM perangkat daerah dan memasukkan kriteria sasaran sosialisasi ke dalam kerangka acuan kegiatan serta perlu alokasi dana yang memadai mengingat hal tersebut menjadi prioritas utama (SPM) di bidang pekerjaan umum yang harus dipenuhi
4.	Pelaksanaan	a. Keterbatasan sumber	Perlunya pelatihan



		daya manusia (SDM perangkat Daerah).	dan tambahan personil (SDM Perangkat daerah)
5.	Pelaporan	Seringnya berubah ubah format laporan	Kejelasan dan ketetapan format laporan
6.	Lain-lain	RAD belum dapat diimplementasikan mengingat sering terjadi perubahan kebijakan baik di pusat maupun daerah	Review dokumen RAD-AMPL

4.4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar Urusan Perumahan Rakyat yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Maros terdiri dari :

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten

4.4.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM bidang urusan perumahan rakyat yang dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Maros tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.41
Target SPM Urusan Perumahan Rakyat
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Maros
Tahun 2021

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Layanan	Jumlah Orang Yang Akan Mendapatkan Layanan	Capaian = (5): (4) x 100%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	1.824	1.824	100 %	
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.	0	0	0 %	Tidak Ada Program Pemerintah Daerah Kab. Maros Tahun 2021 yang mengakibatkan adanya warga negara yang terkena relokasi

Sumber data : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Maros

4.4.3. Realisasi

Realisasi pencapaian SPM bidang urusan perumahan rakyat yang dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Maros tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.42
Realisasi SPM Urusan Perumahan Rakyat
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Maros
Tahun 2021

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Layanan	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Layanan	Capaian = (5): (4) x 100%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	1.824	5	0,27 %	
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.	0	0	0 %	Tidak Ada Program Pemerintah Daerah Kab. Maros Tahun 2021 yang mengakibatkan adanya warga negara yang terkena relokasi

Sumber data : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Maros

4.4.4. Alokasi Anggaran

Adapun Alokasi Anggaran urusan perumahan rakyat oleh Pemerintah Daerah pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Pemerintah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :



Tabel 2.44
Alokasi Anggaran SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Pemukiman
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Maros
Tahun 2021

N O	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran	Realisasi	% Realisasi	Sumber Dana
1	2	4	5	6	
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	100.000.000	100.000.000	100%	APBD
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten	0	0	0%	
Total Anggaran SPM		100.000.000	100.000.000	100%	
Total Anggaran SKPD		6.039.545.727	100.000.000	1,66%	
Persentase Alokasi Anggaran SPM		1,66%			

Sumber data : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Maros

4.4.5. Dukungan Personil

Sumber daya Aparatur pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Maros dalam rangka mendukung pemenuhan SPM bidang urusan perumahan rakyat digambarkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

- Pegawai Struktural

SD	=	- Orang
SMP	=	- Orang
SMU	=	13 Orang
Diploma	=	1 Orang
S1	=	21 Orang
S2	=	5 Orang
Jumlah	=	<u>40 Orang</u>

2. Berdasarkan Jabatan Struktural



Eselon II	=	1 Orang
Eselon III	=	4 Orang
Eselon IV	=	11 Orang
Jumlah	=	<u>16 Orang</u>

4.4.6. Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan dan Langkah Penyelesaian terhadap proses penerapan pelayanan dasar bidang urusan perumahan rakyat yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

No	Tahapan	Permasalahan	Langkah Penyelesaian
1.	Pengumpulan Data	Terbatasnya jangkauan pendataan	Kerjasama antar OPD terkait (Dinas Sosial)
2.	Penghitungan Kebutuhan	Terbatasnya data yang tersedia	Pendataan secara terbatas
3.	Perencanaan Dan Penganggaran	Terbatasnya alokasi anggaran yang diberikan	Pelaksanaan sesuai ketersediaan anggaran
4.	Pelaksanaan	Menunggu anggaran perubahan	Optimalisasi pelaksanaan di lapangan
5.	Pelaporan	Terbatasnya waktu yang tersedia di akhir tahun anggaran	Optimalisasi penyusunan laporan
6.	Lain-lain	-	-

4.5. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 pada 2 (dua) Organisasi Pemerintahan Daerah yaitu :

- Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah



a. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terdiri dari :

a) Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum

Adapun mutu pelayanan terkait ketentraman dan ketertiban Umum meliputi

- standar operasional prosedur Satpol PP
- standar sarana prasarana Satpol PP;
- standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat; dan
- standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

b) Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran meliputi:

- layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran;
- layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran;
- layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi;
- layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran; dan
- layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.

4.5.2. Target Pencapaian SPM Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Target pencapaian SPM bidang Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Maros tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.45
Target Pencapaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Maros
Tahun 2021

N O	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapat kan Layanan	Jumlah Orang Yang Akan Mendapa tkan Layanan	Capaian = (5): (4) x 100%
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	143	143	100 %
2	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	219	219	100 %

Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab.

Maros

4.5.3. Realisasi

Realisasi pencapaian SPM bidang Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Maros tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.46
Realisasi Pencapaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Maros
Tahun 2021

N O	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapat kan Layanan	Jumlah Orang Yang Mendapat kan Layanan	Capaian = (5): (4) x 100%
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	143	143	100 %
2	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	219	219	100 %

Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab.

Maros

4.5.4. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran SPM bidang Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Maros tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.47
Alokasi Anggaran SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Maros
Tahun 2021

N O	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran	Realisasi	% Realisa si	Sumb er Dana
1	2	4	5	6	
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	3.739.289.000	3.696.695.000	99,23 %	APBD
2	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	1.879.085.536	1.807.085.536	96,14%	APBD
Total Anggaran SPM		5.618.977.000	5.503.780.536	97,95 %	
Total Anggaran SKPD		12.284.811.537	12.003.013.079	97,71%	
Persentase Alokasi Anggaran SPM		45,74%	45,85%		

Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Maros

4.5.5. Dukungan Personil

Sumber daya Aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Maros dalam rangka mendukung pemenuhan SPM bidang urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat digambarkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
 - Pegawai Struktural

SD = 1 Orang

SMP = 3 Orang



SMU	=	52 Orang
DIPLOMA (D3)	=	1 Orang
S1	=	38 Orang
S2	=	5 Orang
Jumlah	=	100 Orang

2. Berdasarkan Pangkat dan Golongan

- Pegawai Struktural

Golongan IV	=	8 Orang
Golongan III	=	37 Orang
Golongan II	=	52 Orang
Golongan I	=	3 Orang
Jumlah	=	100 Orang

3. Berdasarkan Jabatan Struktural

Eselon II	=	1 Orang
Eselon III	=	4 Orang
Eselon IV	=	10 Orang
Jumlah	=	15 Orang

4.5.6. Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan dan Langkah Penyelesaian terhadap proses penerapan pelayanan dasar bidang urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut

:

No	Tahapan	Permasalahan	Langkah Penyelesaian
1.	Pengumpulan Data	Tidak tersedianya data (tidak terdokumen secara baik) sejumlah kegiatan dilaksanakan tetapi tidak tercatat karena Kurangnya sumber daya aparatur yang mampu mengoperasikan komputer dengan baik	Memberikan kesempatan kepada perencana dan pelaksana teknis untuk mengikuti pelatihan mengenai Standar Pelayanan Minimal



		dan mahir;	
2.	Penghitungan Kebutuhan	<p>a. Belum adanya pemetaan daerah-daerah yang rawan bencana kebakaran;</p> <p>b. Banyaknya jumlah tenaga honor satpol PP dan Damkar, sehingga anggaran yang ada di peruntukan untuk memenuhi jasa tenaga honor;</p> <p>c. c Kondisi sarana prasarana masih perlu di tambah utamanya mobil operasional Satdalmas, Patroli dan Armada Pemadam Kebakaran masih terdapat beberapa Kecamatan yang belum memiliki Armada dan Penempatan personil Sektor di Kecamatan (Tompobulu, Mallawa, Cenrana, Simbang, Lau, MarosBaru dan Mandai).</p>	<p>a. Perlu adanya pemetaan daerah rawan bencana kebakaran dan penambahan beberapa Wilayah Manajemen Kebakaran;</p> <p>b. Mengajukan untuk melakukan pengangkatan khusus kepada tenaga honor Satpol PP dan Damkar serta melakukan seleksi kembali untuk mengurangi jumlah tenaga honor yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya;</p> <p>c. Penambahan jumlah sarana prasaran berupa armada pengangkut petugas</p>
3.	Perencanaan Dan Penganggaran	<p>a. Kurangnya Anggaran dalam mendukung program dan kegiatan</p> <p>b. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;</p>	Mengusulkan penambahan anggaran ke Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas operasional;
4.	Pelaksanaan	<p>a. Lemahnya fungsi koordinasi dan sinergitas antara dinas/instansi terkait;</p> <p>b. Masih banyaknya Aparatur yang belum memenuhi standar</p>	<p>a. Meningkatkan kerjasama yang intensif dengan berbagai pihak guna mengoptimalkan penyelenggaraan ketertiban umum</p>



		kompetensi sesuai Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah Peraturan Pemerintah 16 tahun 2018 tentang Satpol PP	dan ketentraman masyarakat; b. Mengirim Aparatur untuk mengikuti Diklat pengembangan SDA Aparatur Satpol PP dan Damkar
5.	Pelaporan	Pelaporan Belum Berbasis SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Sebaiknya Pelaporan Berbasis SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Segera di Terapkan Agar Lebih Efisien dan Cepat
6.	Lain-lain	a. Tidak adanya Hydran sumber air untuk pemadam kebakaran; b. Masih adanya kondisi jalan yang rusak dan sulit dijangkau mobil pemadam kebakaran; c. Kurangnya wilayah manajemen kebakaran yang mengakibatkan sulitnya pengendalian kebakaran di lokasi luar WMK;	a. Mengusulkan kepada Pemerintah Daerah untuk menambah pos pemadam kebakaran; b. Perbaiki jalan yang tidak bisa dijangkau oleh mobil damkar; c. Perlu adanya pembuatan sumur penampungan air di beberapa titik yang tersebar di WMK sebagai sumber air bagi pemadam kebakaran

b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar



Jenis pelayanan dasar urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :

a. Pelayanan Informasi rawan bencana

Pelayanan Informasi rawan bencana meliputi :

- penyusunan kajian risiko bencana;
- Komunikasi Informasi dan Edukasi rawan bencana.

b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana meliputi

- penyusunan rencana penanggulangan bencana;
- pembuatan rencana kontinjensi;
- pelatihan pencegahan dan mitigasi;
- gladi kesiapsiagaan terhadap bencana;
- pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
- penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana meliputi

- respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas;
- respon cepat darurat bencana;
- aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana;
- pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana;
- pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.

4.5.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM bidang Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.48
Target Pencapaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Layanan	Jumlah Orang Yang Akan Mendapatkan Layanan	Capaian = (5): (4) x 100%
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan Informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	93.331	93.331	100 %
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100	100 %
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	348.387	348.387	100%

Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Maros

4.5.3. Realisasi

Realisasi pencapaian SPM bidang Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.49
Realisasi Pencapaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Layanan	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Layanan	Capaian = (5): (4) x 100%
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan Informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	93.331	93.331	100 %
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100	100 %
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	348.387	348.387	100%

Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Maros

4.5.4. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran SPM bidang Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.50
Alokasi Anggaran SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran	Realisasi	% Realisasi	Sumber Dana
1	2	4	5	6	
1	Pelayanan Informasi rawan bencana	163.737.000	61.050.000	37,29%	APBD
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	525.462.000	214.037.714	40,73 %	APBD
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	306.023.000	214.437.000	70,07%	APBD
Total Anggaran SPM		995.222.000	550.175.428	49,19 %	
Total Anggaran SKPD		5.206.374.247	3.888.921.761	75 %	
Persentase Alokasi Anggaran SPM		19 %	14 %		

Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Maros

4.5.5. Dukungan Personil

Sumber daya Aparatur pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros dalam rangka mendukung pemenuhan SPM bidang urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat digambarkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

- Pegawai Struktural

SLTP = 1 Orang

SMU = 10 Orang

Diploma = - Orang

S1 = 18 Orang



S2 = 5 Orang

Jumlah = 34 Orang

2. Berdasarkan Pangkat dan Golongan

- Pegawai Struktural

Golongan = 5 Orang

IV

Golongan III = 19 Orang

Golongan II = 10 Orang

Golongan I = 0 Orang

Jumlah = 34 Orang

3. Berdasarkan Jabatan Struktural

Eselon II = 1 Orang

Eselon III = 4 Orang

Eselon IV = 9 Orang

Jumlah = 14 Orang

4.5.6. Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan dan Langkah Penyelesaian terhadap proses penerapan pelayanan dasar bidang urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut :

Permasalahan

1. Adanya pandemic Covid 19
2. Jumlah Kerugian tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan
3. Dukungan sarana dan prasarana perkantoran serta operasional yang belum memadai;
4. Kualitas Sumber Daya Manusia yang belum memadai dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan
5. Pelaksanaan program dan kegiatan belum sepenuhnya mengacu pada rencana matriks kegiatan dan masih bertumpuk pada akhir anggaran
6. Belum seimbangnya antara jumlah aparat dengan volume kerja
7. Belum terukurnya dengan jelas tingkat capaian kinerja yang dicapai (Output/outcome kegiatan tidak jelas/tidak terukur) dalam penyusunan anggaran dan masih monoton



8. Kurangnya pemahaman dan kepedulian aparat tentang pentingnya pelaporan tepat waktu.
9. Masih lemahnya fungsi koordinasi antara stakeholder dalam pelaksanaan program dan kegiatan
10. Belum tersedianya lembaga penanggulangan bencana di kecamatan.

Solusi

1. seluruh program dan kegiatan harus mengacu pada rencana operasional kegiatan
2. perlunya penataan penempatan personil sesuai dengan beban kerja
3. perlunya mengenali, memahami uraian tugas pokok dan fungsi
4. mengedepankan fungsi koordinasi dalam pelaksanaan program
5. meningkatkan kreatifitas dan inovasi dalam menyusun rencana kerja
6. meningkatkan budaya etos kerja, integritas, dan profesionalisme
7. perlu adanya lembaga penanggulangan bencana di kecamatan
8. perlunya penambahan sarana dan prasarana operasional penanggulangan bencana
9. perlunya penambahan personil dalam kesiapsiagaan dan tanggap darurat yang profesional

4.6. Bidang Urusan Sosial

4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar bidang urusan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar Panti Sosial.
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial.
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial.
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan telah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota.

4.6.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah



Target pencapaian SPM bidang Urusan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas sosial Kabupaten Maros tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut

:

Tabel 2.50
Target Pencapaian SPM Urusan Sosial
Dinas Sosial Kabupaten Maros Tahun 2021

N O	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapat kan Layanan	Jumlah Orang Yang Akan Mendapa tkan Layanan	Capaian = (5): (4) x 100%
1	2	3	4	5	6
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	1.636	1.636	100 %
2	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi social diluar panti	2	2	100 %
3	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti sosial.	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	9.151	9.151	100%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna social khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi social dasar tuna sosial diluar panti	38	38	100%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat	Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh	346	346	100%



	tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kab/kota	perlindungan dan jaminan sosial			
--	--	---------------------------------	--	--	--

Sumber Data : Dinas Sosial Kab. Maros

4.6.3. Realisasi

Realisasi pencapaian SPM bidang Urusan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas sosial Kabupaten Maros tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.51
Target Pencapaian SPM Urusan Sosial
Dinas Sosial Kabupaten Maros Tahun 2021

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Layanan	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Layanan	Capaian = (5) : (4) x 100%
1	2	3	4	5	6
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	1.636	1.636	100 %
2	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi social diluar panti	2	2	100 %
3	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial.	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	9.151	9.151	100%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna	Jumlah warga negara gelandangan dan	38	38	100%



	social khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	pengemis yang memperoleh rehabilitasi social dasar tuna social diluar panti			
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	346	346	100%

Sumber Data : Dinas Sosial Kab. Maros

4.6.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran SPM bidang Urusan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas sosial Kabupaten Maros tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut

:

Tabel 2.52
Alokasi Anggaran SPM Urusan Sosial
Dinas Sosial Kabupaten Maros Tahun 2021

N O	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran	Realisasi	% Realisasi	Sumber Dana
1	2	4	5	6	
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	15.805.938	0	0 %	APBD
2	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	12.775.500	12.775.500	100%	APBD
3	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial.	22.793.000	17.593.000	77 %	APBD
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna social khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	36.670.500	36.670.500	100 %	APBD
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban	172.945.000	165.195.000	96%	APBD



bencana kab/kota				
Total Anggaran SPM	260.989.938	232.069.000	88,92%	
Total Anggaran SKPD	2.042.351.992	1.851.909.604	90,67 %	
Persentase Alokasi Anggaran SPM	12,77%	12,31%		

Sumber Data : Dinas Sosial Kab. Maros

4.6.5. Dukungan Personil

Capaian SPM Dinas Sosial Kabupaten Maros tergantung juga dari dukungan personil sebagai pelaksana program/kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial. Untuk tahun 2021 Dinas Sosial Kabupaten Maros didukung oleh personil sebanyak 46 orang PNS, 96 orang TAGANA aktif, 54 Pendamping PKH, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 14 orang, pendamping SLRT sebanyak 8 orang, pendamping Peksos 4 orang.

4.6.6. Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan dan Langkah Penyelesaian terhadap proses penerapan pelayanan dasar bidang sosial yang dilakukan Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

No	Tahapan	Permasalahan	Langkah Penyelesaian
1.	Pengumpulan Data	Belum sempurnanya data base penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).	Melakukan pendataan minimal 1 kali dalam 3 tahun dan updating data setiap Bulan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) .
2.	Penghitungan Kebutuhan	-	-
3.	Perencanaan Dan Penganggaran	a. Terbatasnya kemampuan pembiayaan pemerintah yang diperuntukkan penanganan kesejahteraan sosial. b. Terbatasnya pemahaman	a. Mengusulkan/maksimal anggaran untuk ditambahkan pada program dan kegiatan dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)



		pelaksana tentang standar operasional pelayanan kesejahteraan sosial.	b. Peningkatan SDM yang memiliki kompetensi melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial sesuai SOP.
4.	Pelaksanaan	Saran prasarana pendukung pelayanan kurang memadai.	Peningkatan sarana prasarana yang memudahkan akses pelayanan kesejahteraan sosial.
5.	Pelaporan	-	-
6.	Lain-lain	-	-



BAB V

PENUTUP

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beberapa tahun yang lalu yang telah direvisi melalui Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah melahirkan paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Semua bentuk penyelenggaraan pemerintahan harus dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik yang pada akhirnya mendorong meningkatnya partisipasi publik. Hal ini sangat diperlukan dan merupakan nilai-nilai dasar yang harus diwujudkan secara nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tuntutan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2021 yang telah disusun ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Maros kepada publik yang menyajikan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Maros yang mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan.

Pembahasan mengenai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diuraikan secara lengkap pada BAB I menggambarkan tentang informasi tentang profil daerah Kabupaten Maros secara umum, perencanaan pembangunan daerah dan kebijakan umum penerapan standar pelayanan minimal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Maros. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari : capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. diuraikan secara lengkap pada BAB II. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang dijelaskan pada BAB III menguraikan tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Adapun penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang dijelaskan pada BAB IV menguraikan tentang pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar yaitu : Urusan Pendidikan,



Urusan Kesehatan, Urusan Pekerjaan Umum, Urusan Perumahan Rakyat, Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan Urusan Sosial yang telah dilaksanakan di Kabupaten Maros.

Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Maros tahun 2021 diwujudkan melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memperoleh alokasi dana baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun yang berasal dari sumber pendanaan lainnya. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut telah mampu mendorong perkembangan pembangunan di Kabupaten Maros. Banyaknya program dan kegiatan yang sifatnya strategis dan mendesak sementara sumber pendanaan masih terbatas sehingga, menyebabkan pelaksanaan program dan kegiatan harus didasarkan pada skala prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Maros.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2021 Kabupaten Maros telah melalui tahapan review dan Evaluasi Mandiri terhadap seluruh capaian indikator kinerja kunci urusan wajib, urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Maros yang tertuang dalam Surat Perintah Inspektur Nomor 094/18/A.4/ITDA tanggal 7 Februari 2022 untuk melakukan Review dan Evaluasi terhadap Seluruh Dokumen Pendukung Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD Kabupaten Maros Tahun 2021 yang berlangsung dari tanggal 7 Februari s/d 4 Maret 2022 di Ruang Bagian Pemerintahan.

Kami juga menyadari sepenuhnya bahwa, dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang telah dilaksanakan beberapa tahun terakhir ini belum dapat memuaskan semua pihak dan menyelesaikan semua masalah yang ada, namun dengan berbagai usaha dan upaya sungguh-sungguh yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Maros saat ini telah membawa perubahan yang jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.



Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2021 ini kami buat untuk menjadi bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Maros untuk Tahun Anggaran 2022, dengan harapan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini benar-benar menjadi bahan evaluasi Pemerintah dalam mengambil kebijakan secara adil dan bijaksana dalam melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Maros.

Semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini dapat memberikan manfaat untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang, dan Pemerintah Kabupaten Maros akan terus melakukan segala upaya yang diperlukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki untuk lebih mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penerapan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



H. A. S. GHAI DIR SYAM, S.I.P., M. H